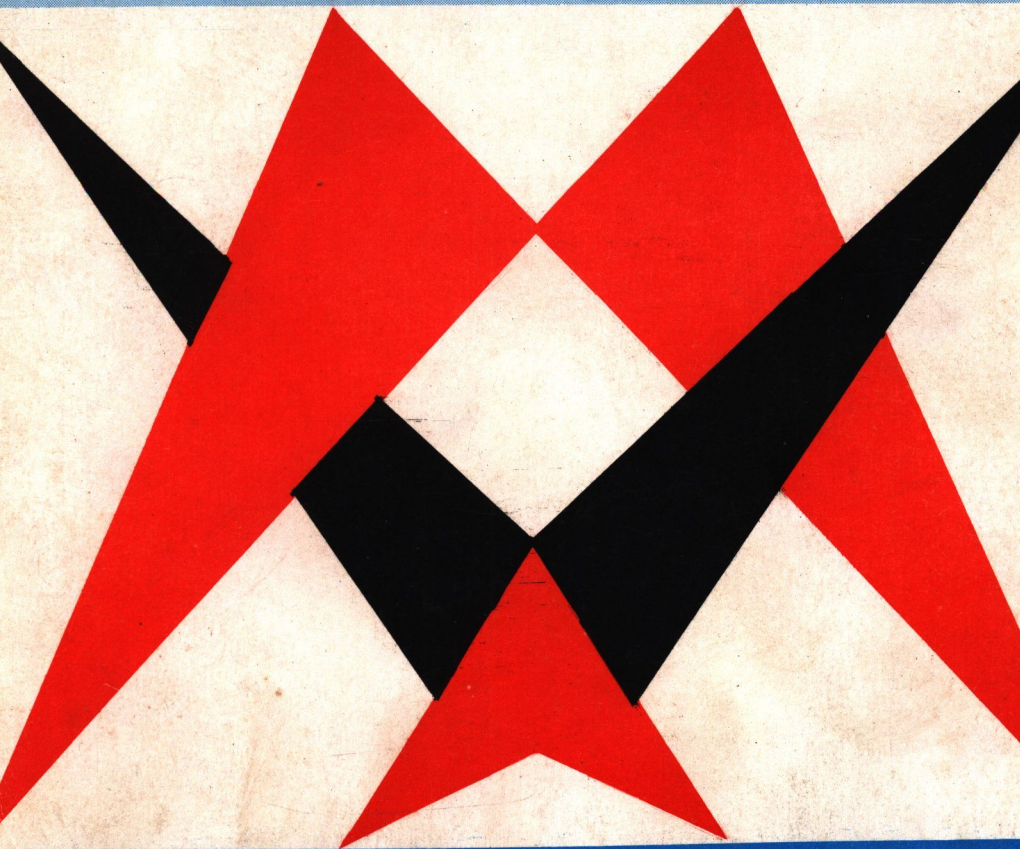


KOTA PALEMBANG

SEBAGAI

"KOTA DAGANG DAN INDUSTRI"



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984/1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

KOTA PALEMBANG

SEBAGAI

''KOTA DAGANG DAN INDUSTRI''

Tim Penulis :

Ketua : Drs. Makmun Abdullah
Anggota : Dr. Nangsari Ahmad
Dr. F.A. Soetjipto
Drs. Mardanas Safwan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984/1985

Penyunting :

1. Drs. R.Z. Leirissa, MA
2. Drs. P. Wayong
3. Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

Gambar kulit oleh :

M.S. Karta

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Nopember 1984.
Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Soebadio', written in a cursive style.

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventariasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan pesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Sejarah Sosial ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia maka diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau untuk memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri untuk keperluan pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, permulaan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Nopember 1984
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

BAB	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBU- DAYAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
I PENDAHULUAN	1
II IDENTIFIKASI	12
1. Lokasi	12
2. Sistem Mata Pencaharian	16
3. Latar Belakang Sosial Budaya	20
III KOTA PALEMBANG DALAM LINTASAN SEJARAH LOKAL	26
1. Palembang di Bawah Kekuasaan Hindia Be- landa	26
2. Posisi dan Arti Palembang pada Awal Abad ke-20	39
3. Sistem dan Administrasi Pemerintahan	44
4. Modernisasi dan Dampak Sosial	60

5.	Stratifikasi Sosial Dalam Kota Palembang ..	79
6.	Kegiatan Budaya dan Peranan Organisasi Sosial.	190
IV	PALEMBANG SEBELUM DAN SESUDAH PROKLAMASI	107
1.	Pendudukan Balatentara Jepang di Palembang	107
2.	Antara Harapan dan Kenyataan Pada Awal Revolusi Fisik	120
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	135
	PETA KOTAMADYA PALEMBANG	139

BAB I

PENDAHULUAN

Kota Palembang adalah salah satu kota terbesar yang terdapat di daerah Sumatera Selatan dan tergolong kota-kota tertua di Indonesia yang cukup panjang sejarahnya. 1) Dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada pada penulis untuk mengungkapkan kota ini sebagai kota "dagang/industri", maka laporan ini belumlah dapat memenuhi target yang diharapkan, mengingat masa setengah abad yang cukup lama itu (1900–1950) tidak semua dapat diungkapkan secara terperinci. Menurut pengetahuan penulis sampai saat ini belum ada tulisan sejarah yang mengungkapkan hal tersebut secara khusus, walaupun sudah pernah dicoba oleh beberapa penulis barat.²⁾ Karangan-karangan yang pernah ditulis oleh penulis-penulis itu, nampaknya tidak menunjukkan kisah-sejarah yang bulat dan utuh. Di samping itu mereka menulis

1) Humas Kotamadya Palembang, *Buku penemuan Hari-jadi Kota Palembang*. Humas Pemerintah Kotamadya, Palembang, 1973.

2) J.L. Sevenhoven, *Beschrijving van de Hoofdplaats van Palembang*, VBG.X, 1823 (*Lukisan Tentang Ibukota Palembang*). Bhratara, Jakarta, 1981 P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Bhratara, Jakarta, 1971 Micheil Otto Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*, ('s-Gravenhage: VKI, 1975).

untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kepentingan politik Kolonial Belanda sebagai subyek.

Seperti telah kita ketahui peristiwa sejarah yang penting dan cukup berarti biasanya membawa akibat perubahan-perubahan di dalam masyarakat termasuk masyarakat yang tinggal di dalam kota itu sendiri. Perubahan-perubahan itu menyangkut segala aspek, terutama dalam lapangan politik, ekonomi dan kebudayaan. Nampak betul perubahan itu terlihat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan tentara Jepang dan pada awal Perang Kemerdekaan.

Setelah sistem kesultanan Palembang dihapuskan pada awal abad ke-19 dan kemudian dijalankan politik Pasifikasi di daerah ini pada awal abad ke-20, maka mulailah sejarah kota Palembang sebagai pusat konsentrasi Kolonial Belanda di daerah ini dengan segala macam kegiatan, yang akan menguntungkan pihak penguasa dalam memantapkan kekuasaannya di daerah ini secara keseluruhan. Kekuasaan itu cukup lama dan baru berakhir tahun 1942, yaitu setelah datang tentara Jepang di daerah ini. Pendudukan tentara Jepang yang relatif singkat waktunya, menunjukkan keadaan masyarakat kota Palembang jauh lebih buruk dari pada masyarakat yang tinggal di pedusunan (pedalaman). Hubungan kota dengan daerah pedalaman tidak semakin lancar, bahkan sebaliknya lebih buruk dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat kota yang selama ini tidak memiliki basis agraris dan sangat tergantung kepada produksi pertanian yang datang dari daerah pedusunan, sekarang terpaksa mengubah cara hidup sehari-hari dengan mengencangkan ikat-pinggang.

Fokus dari laporan ini terutama diarahkan pada peranan Kota Palembang sebagai pusat kegiatan pelayaran-perdagangan dan industri, karena dari kota itu pulalah kegiatan daerah sekitarnya diarahkan, diatur dan diawasi secara saksama. Mengingat pembahasan hanya terbatas pada kota Palembang saja, maka pendekatan yang ditekankan pada sistem antar hubungan dengan menentukan faktor-faktor yang memiliki

fungsi integratif dipandang sangat cocok. Sumber sejarah yang ada menunjukkan adanya hubungan timbal-balik antara kota dengan daerah-daerah pedusunan dalam berbagai kegiatan. Hubungan yang mempunyai fungsi integratif itu antara lain mengenai politik, ekonomi, agama dan kebudayaan.

Pada zaman dulu Selat Malaka merupakan "jalan-dagang tradisional" yang digunakan untuk lalu-lintas pelayaran dan perdagangan laut yang menghubungkan bagian barat dan bagian timur Kepulauan Nusantara. Jalur ini telah menyinggung wilayah pantai timur daerah Sumatera Selatan, yang ternyata juga digunakan sebagai jalur kekuasaan politik, penyebaran agama dan kebudayaan.

Sebagai jembatan antara benua Asia ke Kepulauan Nusantara, kunci dua samudera, geografis daerah ini amat terbuka bagi migrasi bangsa-bangsa. Letak geografis itu pulalah yang menyebabkan perkembangan budi daya yang tidak seimbang dengan daerah-daerah Indonesia lainnya. Kota Palembang yang terletak pada atau dekat urat-nadi lalu-lintas perdagangan internasional, mendapat kontak atau sentuhan dengan kebudayaan asing, yang hampir selalu mengakibatkan terjadinya proses akulturasi di atas tubuh peradaban Indonesia asli, yang ternyata menambah sumber daya cipta dalam perjalanan sejarah lokal di daerah ini abad ke abad. Di perairan Selat Bangka, jalur perdagangan laut itu ada yang membelok ke muara Sungai Musi sampai ke Kota Palembang dan ada juga yang meneruskan ke arah utara (Laut Cina Selatan) dan Timur melintasi daerah pintu utara Pulau Jawa sampai ke daerah Maluku

Komunikasi antar kota-kota pantai di sebelah menyebelah Selat Malaka, sampai pada permulaan abad ke-20 lebih mudah dilakukan melalui jalur-laut daripada jalur darat. Baru pada permulaan abad ke-20 hubungan melalui darat di daerah ini agak lebih mudah, berkat pembuatan jalan-jalan besar pada masa pemerintahan Hindia Belanda, setelah adanya perkebunan-perkebunan asing dan dalam kerangka politik pasifi-

kasi ke daerah pedalaman. Meskipun sudah ada jalan-jalan besar yang menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain, namun belumlah begitu baik jalan tersebut untuk dilalui oleh kendaraan kereta. Memang pembuatan jalan-jalan itu pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan kolonialisme dalam memantapkan kekuasaannya dan mengeksploitasi daerah ini.

Mengingat banyaknya anak-anak Sungai Musi yang dapat dilayari oleh perahu-perahu sebagai alat transportasi, maka jalur melalui sungai di daerah ini lebih berperan dan dominan. Dalam hal ini nampak sekali jalur sungai lebih membudaya dari pada jalur darat, karena di samping biaya lebih murah juga lebih memungkinkan. Di daerah Sumatera Selatan yang lazim dikenal dengan nama "daerah Batanghari Sembilan"³⁾, cukup besar peranannya dalam ikut serta mengembangkan Palembang sebagai kota dagang/industri yang terletak di tepi Sungai Musi, yaitu salah satu sungai terbesar dan terpanjang di daerah ini, yang diperkirakan letak kota ± 90 km dari muaranya yang mengalir ke sebelah timur yaitu ke Selat Bangka.⁴⁾

Palembang yang dibangun di suatu tempat yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang seksama, dimana lalu-lintas semua anak Sungai Musi dapat dikuasai. Oleh karena itu kota ini cukup strategis dalam segi politis, sebagai salah satu faktor integratif untuk menguasai daerah-daerah *hinterland* yang memiliki basis agraris. Perkembangan sejarah di daerah-daerah sekitar Selat Malaka dan selat Bangka, menunjukkan adanya peranan kekuasaan pusat di Palembang kota baik kekuasaan tradisional maupun kolonial, dalam memberikan kerangka kegiatan di berbagai bidang politik,

3) Yang disebut Batanghari Sembilan adalah: s. Komeriing, s. Ogan, s. Lematang, s. Batanghari Laka, s. Rawas, s. Kelingi, s. Lakitan, s. Rapit, s. Beliti.

4) E.de Bruyne et. al, *Winkler Prins Eccylopoedie*, XV, Amsterdam, 1952, halaman 110.

ekonomi, agama dan kebudayaan. Kekuasaan formal-tradisional dan kekuasaan formal di daerah-daerah pedalaman, merupakan sub sistem yang dalam beberapa hal mengikuti pola pusat. Namun demikian hal itu tidak berarti mengingkari adanya ciri-ciri khas daerah-pantai yang tetap mewarnai masyarakat dan kebudayaan sekitarnya.

Untuk lebih jelas menggambarkan hubungan antara kekuasaan pusat Keresidenan dan kekuasaan di daerah sekitarnya, Keresidenan Palembang dibagi atas beberapa *Afdeeling*, yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang asisten residen. Tiap-tiap *afdeeling* dibagi lagi atas beberapa *onderafdeeling*, yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang *controleur* dengan membawahi beberapa distrik dan onderdistrik. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang Demang, sedangkan onderdistrik dikepalai oleh asisten Demang. Jabatan-jabatan seperti: residen, asisten dan *controleur* pada umumnya dipegang oleh orang-orang berkebangsaan Belanda, yang merupakan suatu korps tersendiri dan lazim disebut "*Nederlandsch Corps van het Binnenland Bestuur*". Di luar Kota Palembang sendiri pada setiap wilayah Onderafdeeling terdapat "sistem marga" yang membawahi beberapa buah dusun, dan merupakan suatu unit pemerintahan formal-tradisional yang masih terpelihara dengan baik. Sebaliknya Kota Palembang hanya dibagi atas dua distrik⁵), yaitu distrik Seberang Ilir dan distrik Seberang Ulu, yang dipisahkan oleh aliran Sungai Musi. Seperti halnya di daerah pedalaman, masing-masing distrik terbagi atas Onderdistrik yaitu: Onderdistrik Palembang Ilir Barat dan Onderdistrik Palembang Ilir Timur, yang langsung membawahi beberapa kampung atau

5) D.G. Stibbe, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, Tweede Druk, 's Gravenhage-Martinus Nijhoff. Leiden, 1977, halaman 267.

6) Resien Mgs. H. Abdurrachman, "Pemeliharaan Negeri dalam Propinsi Sumsel menurut Sejarah," dalam Majalah *Suluh Marga* No. 4 th 1. 1950; *Monographi Marga Kayuagung*, dalam *Suluh Marga* untuk Keresidenan Palembang, 9 Maret 1932, th. ke-II Margakassen Palembang, halaman 128-135.

wijk yang masing-masing dikepalai oleh seorang sirah kampung.

Hubungan antara kekuasaan pemerintah pusat di Palembang (residen) dan kekuasaan daerah/pedalaman berdasarkan konsep teritorial, yang pernah diciptakan oleh sistem Kesultanan Palembang. Unit pemerintahan terbawah di dalam kota dipimpin oleh sirah kampung dengan segala perangkat-kampungnya. Sedangkan di daerah pedalaman kita dapati sistem marga yang bersifat otonom dan diakui dengan *Staatsblad* 1922 No. 564, dan kemudian dikukuhkan dalam *Inlandsche Ordonantie Buitengewesten/IGOB* dengan No. 1938.⁶⁾ Sistem marga yang membawahi beberapa buah dusun, dibantu oleh seperangkat perabot dusun terdiri: pembarap/keiro, penggawa dan penghulu/khotib) yang terpilih oleh rakyat. Pembagian wilayah berdasarkan sistem marga di daerah pedalaman dan kampung-kampung/*wijk* di dalam Kota Palembang bertujuan untuk memudahkan penguasa dan pelaksanaan administrasi pemerintah kolonial setempat.

Berdasarkan kenyataan historis, Pemerintah Kolonial Belanda di daerah ini baru pada awal abad ke-20 dapat mengintensifkan kekuasaannya ke daerah *hinterland*, setelah beberapa puluh tahun sistem Kesultanan Palembang dihapuskan (1825). Dengan kata lain Belanda memerlukan waktu yang cukup lama untuk menguasai wilayah yang luas ini, karena terhalang oleh sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya hubungan dengan daerah-daerah pedalaman. Dalam rangka mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan dan kedudukan pemerintah Belanda sebagai tujuan pokok pemerintah kolonial, kekuatan militer merupakan faktor yang menentukan. Untuk menghadapi protes sosial yang sering timbul di daerah-daerah sebagai akibat sistem perpajakan dan kerja rodi (*gawe raje*). pemerintah Pusat di Palembang selalu mengambil tindakan kekerasan dengan mengirimkan pasukan-pasukan ekspedisi, seperti yang

pernah terjadi di Bingin Teluk (*Perang Kelambit*)⁷⁾; perlawanan rakyat di *Onderafdeeling* Rawas⁸⁾; pembunuhan atas diri asisten demang di Tulung Selapan⁹⁾ dan lain-lain. Berdasarkan uraian diatas ini, dapatlah dikatakan Pemerintah Kolonial Belanda di Palembang memiliki sifat sentralistis yang didukung oleh agen-agen kolonial di daerah, yang terdiri dari kepala distrik (Demang), kepala marga (depati) dan kepala-kepala dusun (kerio).

Ditinjau dari segi ekonomi, penguasaan politik atas daerah-daerah *hinterland* merupakan penguasaan sumber-sumber mineral dengan segala hasil hutannya. Ketika daerah ini banyak diketemukan sumber-sumber minyak dan batubara pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang sebelumnya telah diketemukan biji timah di Bangka pada tahun 1710¹⁰⁾, telah mempercepat intensifikasi kekuasaan Belanda di daerah ini dengan mengangkat agen-agensya yang setia kepada pemerintah. Oleh karena itu kekuasaan politik cukup berperanan dalam proses pengintegrasian daerah di luar kota Palembang, khusus mengenai daerah-daerah yang memiliki sumber alam dan daerah perkebunan.

Meskipun tidak setua pelayaran dan perdagangan laut yang melalui jalan dagang tradisional melalui Selat Malaka atau jalur lalu-lintas sungai di daerah ini, agama cukup berperan untuk mengintegrasikan daerah sekitar yang dilaluinya. Agama yang dimaksudkan itu adalah agama Budha yang dikembangkan oleh Kerajaan Sriwijaya, maupun agama Islam

7) Kodam IV Sriwijaya, *Dokumentasi Data sejarah Militer Kodam IV Sriwijaya*,; Dinas sosial Daerah Tk. I Sumsel, *Perintis Kemerdekaan Indonesia*, Palembang, 1978, halaman 6

8) D.G. Stibbe, *Op cit.*, halaman 267.

9) *Soeloeh Marga centoek Keresidenan Palembang*, Margakassen Palembang, No. 18. Th. ke-II, halaman 269 – 270.

10) P De Roo Faille, *op cit.*, halaman 28: Bandingkan dengan D.G. Stibbe *op cit.*, halaman 266.

yang disebarkan oleh para mubaligh pada masa Kesultanan Palembang. Agama Islam yang disebarkan oleh kaum ulama yang berasal dari Jawa (Demak, Banten dan Mataram) pada waktu itu, telah memperoleh tanah subur di daerah ini, bahkan peranannya di dalam keraton sangat menentukan. Di samping kedudukannya sebagai kiai dan penasihat sultan, dalam sistem birokrasi kesultanan terdapat lembaga tertinggi yang disebut natagama.¹¹⁾ Kedatangan Raden Rachmat (Sunan Ampel) di kota ini untuk mengislamkan penguasa Majapahit pada abad ke-15, merupakan awal dari proses islamisasi di kalangan pemegang kekuasaan, bahkan Raden Fatta sebagai sultan Demak yang pertama berasal dari Palembang.

Di samping itu adanya pesarean raja-raja Palembang terdapat kuburan guru agama (kiai) di samping makam Sultan yang pernah berkuasa. Nampak betul kekuasaan politik dalam sejarah Kesultanan Palembang, telah banyak membantu dalam usaha menyebarkan agama itu ke daerah-daerah pedalaman melalui jalur sungai, seperti di daerah OKU, daerah OKI, daerah Lahat/Pasemah, daerah LIOT, daerah MUBA dan daerah MURA.¹²⁾

Sementara agama Islam sudah kokoh kedudukannya dalam sistem birokrasi pemerintahan tradisional, kebudayaan pun telah ikut terbentuk dari percampuran antara berbagai budaya daerah asal penduduk yang berdomisili di dalam kota, terutama sekali suku-suku pendatang dari Jawa.¹³⁾ Kebudayaan Jawa di satu pihak dan kebudayaan Palembang asli di lain pihak, merupakan inti pokok di samping kebudayaan suku-suku bangsa lain yang turut mempengaruhi. Kebudayaan-

11) P. De. Roo De Faille, *op cit* halaman 31.

12) MTQ Pertamina se-Indonesia ke-II. *Masuk & Perkembangan Agama Islam di Bumi Sriwijaya*, Pertamina Unit I, Palembang, 1974. halaman 23-34.

13) D.G. Stible, *op cit* halaman 271.

an ini meliputi adat istiadat, kepercayaan, bahasa dan berbagai cabang kesenian seperti wayang dan pertunjukan rakyat. Kemudian setelah kedatangan orang Barat, khusus orang Belanda pada masa kolonial memberikan unsur baru yang berpengaruh pada satu segi budaya tertentu seperti cara berpakaian, cara makan, bahasa, transpor baru dan lain-lain.

Di dalam meneliti sejarah kota yang mempunyai peranan penting untuk terlaksananya kegiatan di berbagai bidang, secara fisik Kota Palembang memiliki sifat kota pantai dan sifat kota pedalaman. Berdasarkan sumber-sumber yang telah diperoleh dengan mengungkapkan cerita sejarah yang terjadi, laporan ini dibuat sebagai uraian yang deskriptif dan kemudian diberikan interpretasi. Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud sumber-sumber adalah dalam bentuk laporan-laporan kolonial (*kolonial-verslag*), Laporan Poltik Tahun 1837 (*Staatkundig Overzicht van Nederlandsh-Idie 1837*) yang telah diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, berita-berita Ekspedisi Militer Belanda melalui karangan-karangan orang Belanda dan beberapa sumber yang berasal dari pihak sumber penduduk setempat (sumber dalam negeri) yang dapat dipercaya, bahwa sumber tersebut dipergunakan untuk penelitian sejarah.

Sumber sekunder yang dimaksudkan adalah karya-karya umum yang ditulis baik berbentuk buku atau artikel-artikel maupun bentuk brosur yang belum diterbitkan. Keseluruhannya membicarakan dan mengungkapkan tentang latarbelakang kehidupan sosial-ekonomi, keadaan sosial-budaya, agama dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam menyusun laporan ini, dicantumkan suatu daftar bacaan yang merupakan petunjuk mengenai semua bahan yang dipergunakan. Dalam menangani berbagai sumber tersebut diperlukan ketelitian dan sikap kritis. Di samping itu telah diusahakan sedemikian rupa, agar

uraian yang bersifat analitis mengenai berbagai kegiatan di dalam kota Palembang, dapat disajikan dalam bentuk cerita sejarah yang memadai.

Apa yang diuraikan di atas mengenai Kota Palembang sebagai kota dagang/industri di kawasan ini, nampaknya juga sebagai kota pusat pemerintahan dan administrasi. Oleh sebab itu peranan kekuasaan politik sebagai faktor integratif, dalam penulisan ini selalu dikaitkan dalam memberikan kerangka kegiatan di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun laporan ini yaitu studi kepustakaan. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa yang menjadi obyek penelitian, adalah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa kolonial Belanda, pada waktu pendudukan tentara Jepang dan awal perang kemerdekaan. Oleh karena itu dengan melalui studi kepustakaan, dianggap cara yang paling tepat dan memungkinkan untuk dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan.

Di samping itu pula dipergunakan metode wawancara dan observasi, terutama sekali mengenai masa pendudukan Jepang dan awal Revolusi Fisik. Mengingat laporan ini menyangkut banyak hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial kota dan daerah sekitarnya, maka cara pendekatan akan menyangkut berbagai dimensi, sehingga diperlukan berbagai cara pendekatan.¹⁴⁾

Tahap heuristik yang menjadi bagian dari metode sejarah telah mengisyaratkan penulis untuk menggali berbagai sumber, yang ada kaitannya dengan kegiatan kota beserta isinya. Sesuai dengan kemampuan yang serba keterbatasan, baik mengenai dana maupun waktu yang tersedia untuk

14) Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan "multidimensional" menurut istilah yang digunakan oleh Sartono Kartodirdjo; Sartono Kartodirdjo, *beberapa masalah dan Metodologi Sejarah Indonesia*, dalam *LEMBARAN SEJARAH*, Nomor 6, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1970, halaman 4.

menyusun laporan ini, sudah barang tentu akan terdapat di sana-sini hal yang tidak sempurna dan kurang keseimbangan. Terhadap sumber-sumber tersebut dilakukan kritik untuk menguji otentisitas dan kredibilitasnya, sehingga dapat diyakini bahwa sumber itu asli, dan dapat digunakan sebagai sumber penulisan dalam laporan ini menjadi suatu kisah sejarah yang utuh dan bulat.

BAB II

IDENTIFIKASI

1. Lokasi

Berdasarkan lingkungan geografis, Kota Palembang terletak di kaki Bukit Siguntang dan terbentang di sebelah-menyebelah Sungai Musi, merupakan ibukota karesidenan sampai pada masa awal Revolusi Fisik. Kota ini terletak pada 2°.59'27." Lintang-Selatan dan 104°.45'.45" Bujur-Timur dari Greenwich. Sebagai bekas ibukota karesidenan dan pusat komandan melawan agresi Belanda di daerah Sumatera bagian Selatan pada awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Sekarang menjadi ibukota propinsi Sumatera Selatan dan secara administratif berstatus kotamadya. Pada tahun 1915 luas wilayah kota diperkirakan $\pm 137 \text{ km}^2$.¹⁾ dan oleh karena proses pemekaran kota dari tahun ke tahun sebagai akibat peledakan penduduk dan urbanisasi, dewasa ini telah mencapai luas $\pm 224 \text{ km}^2$.²⁾

1) D.G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Jilid III (cetakan ke-III), 's Gravenhage, Leiden, 1919, hal 270

2) Humas Kotamadya Palembang, *Buku penemuan Hari jadi kota Palembang*, Pemerintah Daerah Kodya Palembang, 1973, halaman 155.

Secara astronomis lokasinya masih termasuk dalam garis edar matahari antara $23,5^{\circ}$ Lintang Utara dan $23,5^{\circ}$ Lintang-Selatan, sehingga daerah ini termasuk iklim tropis yang rata-rata mendapat curah hujan 2663 mm dan 162 jumlah hari hujan dalam setahun. Seperti telah kita ketahui mengenai kota ini dan daerah sekitarnya sangat ditentukan oleh keadaan tata lingkungan dan iklim, yaitu pada bulan-bulan Nopember – Desember – Januari – Pebruari dan Maret angin berhembus dari arah barat dengan hujan. Sedangkan dalam bulan Mei – Juni – Juli – Agustus dan September angin berhembus dari jurusan tenggara yang membawa udara kering dari benua Australia. Mengingat letaknya di daerah tropis sebelah selatan katulistiwa dan rata-rata terletak dua meter di atas permukaan laut, maka iklimnya yang lembab dan hujan yang turun banyak sekali.

Masalah geografi Kota Palembang tidak akan terlepas dari geologi daerah Sumatera secara keseluruhan. Daerah ini pada umumnya mempunyai gunung berapi yang aktif, sedangkan satu-satunya sisa erupsi muda hanyalah terdapat di sebelah Selatan, yang sekarang menjadi lapisan sukadana basalt. Pada zaman Pleoplistosin terjadi pelengkungan yang kemudian patah secara longitudinal, sehingga patahan itu sekarang menjadi lembah Samangko yang memanjang dari Teluk Samangko menuju ke utara sampai ke daerah Sumatera Tengah. Pada pantai bagian barat terdapat dataran aluvial yang sempit dan terputus-putus, sedangkan di pantai bagian Timur terdapat dataran aluvial yang lebar terbentang dari ujung Sumatera bagian Sumatera Selatan ke Sumatera Utara. Mengenai lembah Samangko tersebut sangat panjang, yaitu dari teluk Samangko sampai ke Sumatera Selatan dan tanahnya terdiri dari andesit dan turf yang muda.

Khusus mengenai morfologi Kotamadya Palembang, termasuk daerah yang terletak di bagian timur Sumatera yang sejak zaman tetiair muda mengalami proses penurunan

dan kemudian secara perlahan-lahan mengalami proses pedangkalan. Sementara itu ada bagian-bagian tertentu berada di permukaan air laut dan terdiri atas sedimen yang banyak sekali. Nampaknya proses sedimentasi itu berlangsung terus menerus, sehingga proses tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan dataran rendah di dalam kota.

Oleh sebab itu secara menyeluruh, morfologi Kotamadya Palembang sebagai berikut: Pada bagian timur laut terdiri dari dataran rendah dan pada bagian pantai timurnya masih berawa-rawa (10–100 meter), dan pada lokasi barat-daya merupakan daerah berbukit-bukit sampai ke lereng Bukit Barisan, di mana kita dapati Gunung Dempo (3173 m), Gunung Seblat (2383 m) dan Gunung Batak (2817 m). Kemudian pada bagian tengah terdapat dataran rendah aluvial dengan berbukit-bukit (100 – 500 m), yang merupakan penghubung antara kedua daerah tersebut. Dengan penjelasan yang singkat ini, dapatlah disimpulkan bahwa morfologi kota dan daerah sekitarnya terdiri dari dataran rendah aluvial, dan di beberapa tempat Daerah Seberang Ulu dan Daerah Seberang Ilir Barat sampai saat ini masih merupakan daerah yang berawa-rawa. Daerah aluvial yang terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian 5–10 meter di atas permukaan laut, terutama sekali terdapat di sebelah utara Kotamadya Palembang. Sedangkan daerah yang agak tinggi (22 m) dari permukaan laut, terdapat di bagian timur-laut dan sebagian terdapat di bagian barat.

Keadaan tata air yang terlihat pada anak-anak sungai di dalam kota, pada umumnya aliran anak-sungai itu berpola sejajar. Mengingat banyaknya anak-sungai di dalam kota, maka yang satu dengan daerah yang lain dipisahkan oleh aliran-aliran sungai yang merupakan jalur penghubung antar kampung. Sebagian besar saluran-saluran air tersebut tidak terpelihara, sehingga proses pendangkalan dari tahun ke tahun berlangsung terus. Di antara sungai-sungai yang sampai

saat ini masih dapat dilayari oleh perahu-perahu motor dan perahu/biduk berukuran sedang antara lain: Sungai Musi, Sungai Komering dan Sungai Ogan yang kesemuanya mengalir ke Muara Sungsang. Anak-anak sungai yang ada di dalam kota, di samping sebagai sumber air minum bagi penduduk dan tempat buang kotoran, juga dapat dipergunakan sebagai sarana perhubungan. Tidak mengherankan apabila musim pasang (air naik) terjadi, tempat-tempat yang rendah digenangi oleh air terpaksa dibangun rumah-rumah penduduk berbentuk rumah panggung yang bertiang.

Dahsyatnya tantangan alam di daerah rawa-rawa/dataran rendah, perjuangan menguasai dan dikuasai alam bagi penduduk yang tinggal di dalam kota, merupakan alternatif yang tidak dapat dihindari oleh sebagian besar masyarakat pedagang-kecil dalam memenuhi kebutuhan hidup dari zaman ke zaman. Dengan kata lain, berjuang melawan lingkungan alam yang terdiri dari rawa-rawa, hidup sebagai pedagang atau buruh kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga merupakan perwujudan tanggapan aktif terhadap lingkungannya. Demikian pula mengenai anak-anak sungai dan lebak-lebung di musim kemarau, telah menghasilkan ikan sungai yang beraneka ragam sebagai hasil tambahan mereka di samping kegiatan berdagang atau pekerja/buruh.

Untuk memperoleh jumlah penduduk pada zaman Hindia Belanda secara terperinci, penulis mengalami kesulitan mengenai sumber tersedia dan terpercaya. Walaupun demikian ada juga sumber dari pemerintah Kolonial yang menyebutkan, bahwa jumlah penduduk Kerisidenan Palembang dalam tahun 1915 diperkirakan 754.700 jiwa yang terdiri dari: 742.000 jiwa bumiputera, 4000 jiwa orang Arah/Keling, 7.500 jiwa orang Cina dan 1.200 orang Eropah.³⁾ Sedangkan dalam tahun 1930 penduduk kota Palembang tercatat $\pm$ 109.400 jiwa yang terdiri dari 88.000 bumiputera, 1900

3) D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 264.

orang Eropa, 16.000 orang Cina dan 3500 orang Arab/Keling.⁴⁾ Penduduk bumiputera pada umumnya beragama Islam, kecuali di beberapa daerah Ulu (daerah Pasemah dan Muara Dua) masih menganut faham animisme dan dinamisme. Palembang sebagai Ibu kota keresidenan terbagi atas dua distrik, yaitu Palembang Ulu terletak di tepi kanan Sungai Musi dan Palembang Ilir terletak di tepi kirinya.

Masing-masing distrik terbagi lagi dalam beberapa onder-distrik, dan onder-distrik membawahi beberapa buah kampung atau *wijk*. Masing-masing kampung mempunyai nama sendiri-sendiri dan biasanya mengambil nama anak-anak sungai terdekat seperti: Kampung Serengam, Kampung Sungai Tawar, Kampung Sungai Tengkuruk dan sebagainya.

Mengenai penduduk asing yang berdiam di dalam kota ini, biasanya hidup berkelompok sesuai dengan identitas bangsanya masing-masing. Seperti orang-orang Cina bertempat tinggal di rakit-rakit yang terbuat dari bambu dan kayu yang dijalin di tepi Sungai Musi, sedangkan penduduk asli dan orang-orang Arab bertempat tinggal di daratan mendiami rumah-rumah yang dibangun di atas tiang dengan dikelilingi pagar kayu atau bambu.⁵⁾ Tetapi setelah Pemerintah Kolonial Belanda mulai menjalankan politik pasifikasi ke daerah-daerah pedalaman, maka orang-orang Cina mulai diizinkan bermukim di lokasi yang tidak jauh dari kegiatan pasar, bahkan sampai sekarang ini rumah-rumah batu di sekitar pasar didiami oleh pedagang-pedagang Cina pada umumnya.

2. Sistem Mata Pencarian

Palembang dengan daerah sekitarnya secara topografis terdiri dari dataran rendah yang berawa-rawa, tanah datar dan tanah tinggi yang bergelombang. Berdasarkan letak kota dengan suhu udara 32°C pada waktu musim panas dan 25°C di

4) Op. cit. halaman 1189.

5) Op. Cit halaman 270

waktu musim hujan, maka diperkirakan rata-rata suhu udara dalam setahun 27°C.⁶⁾ Oleh karena itu tidak mengherankan apabila di daerah sekitarnya cukup subur, terutama di lokasi tanah datar dan tinggi bergelombang banyak ditanami penduduk dengan tanaman lada, kopi, tembakau, cengkeh dan buah-buahan. Daerah yang agak jauh sedikit ke pedalaman, banyak menghasilkan buah-buahan. Daerah yang agak jauh sedikit ke pedalaman, banyak menghasilkan buah-buahan dan sayur-mayur yang jauh lebih sempurna dari pada di Jawa.⁷⁾

Di kota Palembang yang sebagian besar terdiri atas rawa-rawa, penduduk kota lebih berorientasi pada kegiatan perdagangan dari pada pertanian. Walaupun kondisi tanah tidak memungkinkan mereka untuk bercocok tanam bagi penduduk kota, nampaknya ada juga tempat-tempat tertentu yang sekarang disebut "*talang*"⁸⁾, di zaman dulu sebelum terjadi pemekaran kota ditanami padi dan kemudian dijadikan kebun tahunan (kebun buah-buahan). Mengingat tata lingkungan kota yang sedemikian itu, maka mata pencaharian penduduk di samping sebagai pedagang kecil, juga sebagai pekerja kasar atau pengrajin. Khusus bagi kaum wanita pada umumnya mengerjakan kerajinan tangan seperti: menenun songket, menyulam, menjahit dan sebagainya.

Kota Palembang yang letaknya di daerah dataran rendah yang berpaya-paya, berbeda betul dengan keadaan tanah yang letaknya di sebelah Barat yang merupakan hulu dari beberapa sungai yang dapat dilayari. Sungai Musi yang memiliki beberapa anak sungai yang memiliki mata air di daerah pegunungan sebelah barat, pada dasarnya dapat dilayari sampai jauh ke

6) Op cit, halaman 1190

7) J.L. Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, (terjemahan Soegarda Purbakawatja), Bhratara, Jakarta 1971, halaman 54.

8) Istilah "*talang*" menunjukkan suatu tempat yang agak tinggi dari tempat-tempat yang lain dan biasanya sebagai tempat menanam padi (ume). Setelah berakhir musim panen, lahan tersebut ditanami dengan pohon karet atau kebun buah-buahan.

hulu oleh kapal-kapal dan perahu motor yang berukuran sedang dan kecil. Kapal dan perahu motor tersebut merupakan pasar terapung yang membawa barang dagangan untuk ditukarkan dengan hasil bumi yang berasal dari daerah pedalaman kota Palembang yang merupakan pusat dari segala kegiatan sehari-hari dan memiliki lalu-lintas air yang sangat ramai, maka peranan sungai di daerah ini memegang peranan penting sebagai jalur penghubung antara daerah pedalaman dengan pusat kota sebagai bandar transito pada awal abad ke-20.

Di samping hasil pertanian dan perkebunan asing yang dijual belikan di kota bandar ini, daerah *hinterland* banyak menghasilkan hasil hutan seperti damar, getah perca, getah jelutung dan rotan. Mengenai bahasa Palembang yang mirip dengan bahasa Jawa "kromo inggil," nampaknya akhir-akhir ini sudah jarang dipakai antara golongan yang berdasarkan status, karena pemakaiannya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja dan bukan bahasa sehari-hari. Barangkali lenyapnya bahasa tersebut di kalangan penduduk asli, disebabkan semakin longgarnya strata sosial di kalangan mereka sendiri, dan munculnya kelas sosial yang baru berdasarkan tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian atau atas dasar pendidikan sekolah.

Sebagai suatu gambaran yang kita peroleh dalam tahun 1916 dan 1917 sebagai berikut :

Tahun 1916	Hasil-hasil hutan	Tahun 1917
413.244 Kg	Damar	305.661 Kg
10.031 Kg	Getah Perca	11.749 Kg
3.413.444 Kg	Getah Jelutung	1.318.341 Kg
4.704.626 Kg	Rotan	549.145 Kg

Sumber : Koloniaal-Verslag 1928.

Menurut catatan harga pada waktu itu: Damar per pikul harganya antara f 7.00,-, sampai dengan f. 20.00,-, Getah perca per pikul f. 6.00,- sampai dengan f. 100.00,-, Getah jelutung per pikul f. 4.00,- sampai dengan f 12.00,- dan harga rotan per pikul f 3.00,- sampai dengan f. 7.00,- Di samping daerah sekitarnya menghasilkan lada, kopi dan tembakau, hasil hutan yang tersebut di atas telah menambah penghasilan penduduk setempat sebagai petani.

Palembang sebagai kota bandar dan pusat perdagangan, tidak akan jauh berbeda dengankota-kota bandar lainnya, yang dari tahun ke tahun telah terjadi pemekaran sebagai akibat bertambahnya penduduk. Tempat-tempat yang dulunya seagai tempat bercocok tanam, sekarang dijadikan tempat pemukiman penduduk dan sekaligus merupakan kampung yang baru. Sementara tempat-tempat tersebut didiami oleh orang-orang asing yang memperoleh tempat tersendiri, maka dilain pihak mulailah penduduk bergeser ke pinggir kota yang jauh dari kegiatan pasar. Sektor kota tradisional yang ditandai dengan pembagian spesial yang jelas berdasarkan status sosial, nampaknya tidak dapat lagi dipertahankan seperti semula karena timbulnya kelas-kelas baru yang memiliki kemampuan ekonomi. Pemukiman orang-orang asing secara etnis makin lama makin terpisah dari penduduk asli, terutama orang-orang Cina dan orang-orang asing lainnya yang hidupnya berkelompok dan menempati bagian-bagian kota yang strategis. Dengan kata lain tempat-tempat yang dulu ditempati oleh kaum bangsawan, mulai diambil alih oleh penghuni baru yang berdasarkan kelas sosial. Dengan adanya pergeseran tempat pemukiman, bangunan fisik kota pun mengalami peubahan sesuai dengan pergeseran kelas yang timbul.

Hal ini sudah dimulai pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda, yaitu masa menjelang kedatangan tentara pendudukan Jepang di daerah ini. Ketika timbul Revolusi Fisik, strata sosial yang berdasarkan status mulai goyah, yaitu ketika golongan bangsawan sedang mengalami kemunduran

baik karena menurunnya pendapatan secara riil maupun karena reformasi yang terjadi dalam dunia pendidikan, proses pemiskinan bagi golongan tersebut tidak dapat dielakkan. Itulah sebabnya tanah-tanah kosong di pinggir kota menjadi tempat tinggal penduduk asli, yang kehidupannya penuh kesedihan.

3. Latar Belakang Sosial Budaya

Berdasarkan letak dan keadaan lingkungan geografis kota yang terlukis di atas, yaitu banyaknya anak-anak sungai yang melintasi pusat perkampungan di dalam kota yang oleh penduduk dipakai sebagai jalur lalu-lintas antar kampung, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi perilaku penduduk kota yang menampilkan budaya majemuk bertumbuh dan berkembang dengan segala macam pemilikan tradisi masa lampau dan pemelukan/penerimaan hal-hal baru yang berasal dari luar, menunjukkan penduduk kota jauh lebih dinamis dari pada masyarakat pedusunan.

Sebagai bekas masyarakat agraris-tradisional yang mendukung adat istiadat Palembang, nampaknya belum mau melepaskan sama sekali tradisinya. Meskipun proses interaksi antara manusia dengan manusia atau dengan alam sekitarnya berlangsung terus, pada dasarnya penduduk asli belum begitu banyak mempergunakan ilmu pengetahuan dalam memecahkan suatu permasalahan hidup ini.

Mereka masih mengikuti cara-cara lama, di mana unsur agama dan kepercayaan setempat telah mencampuri segala aspek kehidupan di kampung-kampung dan telah memberikan warna yang jelas dalam kehidupan sosial-kultural. Agama yang dianut oleh penduduk kota adalah agama Islam, yang telah berkembang dengan pesat semenjak agama itu diakui oleh Kesultanan Palembang sebagai agama resmi. Di samping itu kita dapat golongan minoritas Asing yang memiliki kepercayaan lain dari golongan mayoritas penduduk.

Oleh karena itu Palembang dan daerah sekitarnya menjadi tempat yang subur bagi perkembangan Serikat Islam, ketika organisasi tersebut didirikan di Palembang dalam tahun 1914.⁹⁾ Kedatangan Serikat Islam di Palembang pada saat historis, saat mana munculnya kelas baru golongan berpendidikan, yang sebagian dari mereka itu menjadi pegawai negeri sebagai sebuah kelas yang sedang mencari tempat dalam masyarakat. Pertemuan antara golongan kelas menengah lama bumiputera, golongan terpelajar dan golongan pekerja di kota menjadi tumpuan bagi timbulnya gerakan nasional. Dengan kata lain, bahwa pergerakan nasional adalah hasil budaya kota sebagai reaksi historis, yaitu kelas-kelas baru memerlukan ideologi baru yang membenarkan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat tradisional dan pemerintah kolonial.

Walaupun penduduk asli Palembang telah memeluk agama Islam sejak lama, namun masih nampak adanya sisa-sisa sistem religi (kepercayaan) yang asli¹⁰⁾ dari zaman sebelum mereka memeluk agama Islam. Sisa-sisa religi itu dapat kita lihat pada tindak-tanduk dalam proses penyembuhan penyakit yang menimpa keluarganya. Mereka lebih banyak berorientasi pada dukun melakukan sesajen di atas kuburan tertentu, memegang teguh larangan-larangan (pemali) dalam lingkaran hidup dan lain-lain.

Upacara-upacara yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia, masih tetap dilakukan dengan cermat seperti : upacara krisis-rite, adat perkawinan, upacara hamil tujuh bulan, tahlilan dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan fenomena budaya bagi masyarakat yang sedang berkembang dengan segala pemilikan tradisi masa silamnya dalam menghadapi proses modernisasi di segala bidang.

9) D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 264.

10) J.L. Sevenhoven, *Op cit*, halaman 37

Di beberapa daerah tertentu tidak terdapat perbedaan yang jauh antara masyarakat pedusunan dengan masyarakat kota. Perbedaan yang tidak menyolok ini karena diikat oleh rasa persaudaraan yang erat dan sistem administrasi yang berlaku pada zaman Hindia Belanda, yaitu segala aturan yang resmi dan syariat berdasarkan ajaran Islam. Demikian pula mengenal rumah tempat tinggal penduduk, yang dibangun di atas tiang beratap genteng bercorak arsitektur tradisional, merupakan panorama yang cukup menarik sebagai sumber penelitian mengenai rumah-rumah tradisional pada masa lampau. Sebelum kota ini mengalami pemekaran, rumah-rumah tersebut dibangun di sebelah menyebelah jalan yang tersebar secara natural dan dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu atau kayu. Selain dari pada itu terdapat pula rumah-rumah yang dibangun di atas balok-balok besar dijalin dengan bambu, dan ditambahkan pada tiang-tiang bulat yang ditanamkan dalam tanah pada kedua tepian sungai Musi di atas air, yang lazim disebut "rumah rakit".¹¹⁾ Rumah rakit seperti ini banyak kita dapati di daerah Kalimantan Selatan dan Jambi, yang dihubungkan dengan daratan oleh jembatan-jembatan terapung.

Sebuah rumah didiami oleh keluarga "batih majemuk," yaitu terdiri dari anak-anak yang belum/sudah berkeluarga serta cucu-cucunya. Khusus untuk masyarakat Palembang, anak-anak perempuan yang telah berkeluarga diberi banyak kelonggaran untuk tinggal bersama dengan orang tuanya dalam satu rumah. Sebaliknya anak lelaki harus ke luar dari rumah orang tuanya apabila mereka sudah berkeluarga dan bertempat tinggal di rumah isterinya. Tinggal bersama dengan orang tuanya tidak berarti semua warisan akan jatuh ke tangan anak-anak perempuan, karena dalam masalah *faraid* berlaku hukum Islam, di mana anak lelaki akan memperoleh bagian yang lebih banyak dari pada anak perempuan.

11) Op Cit, halaman 14-15.

Tradisi yang telah membudaya ini tidak berlaku dalam masyarakat yang tinggal di daerah pedusunan, karena keluarga-batih hanya terdiri dari anak-anaknya yang belum berke-luarga dan ada kalanya ditambah dengan seorang menantu perempuan beserta cucu-cucunya. Seperti halnya dengan suku-suku bangsa lain di Indonesia, saat peralihan yang penting dalam lingkaran hidup suku Palembang adalah perkawinan. Perkawinan yang ideal pada masa perkawinan antara dua orang bersaudara sepupu, yang bapak dan ibunya saudara sekandung. Meskipun perkawinan yang diharapkan bersifat ideal, bukanlah suatu hal yang diwajibkan, sehingga banyak pemuda dapat saja kawin dengan gadis-gadis yang bukan saudara sepupunya. Tetapi sebaliknya perkawinan yang dianggap terlarang (sumbang) adalah perkawinan antara anak dengan ayah/ibu, antara saudara sekandung, antara menantu dan mertua, antara paman/bibi dengan keponakan dan antara nenek dengan cucu.

Sebagai akibat perkawinan itu terbentuklah keluarga-batih, dan keluarga-batih itu sendiri tergantung pula dari macam perkawinan. Mengingat sistem poligami diizinkan menurut ajaran Islam, maka ada juga keluarga-keluarga batih yang sifatnya poligami yang terbatas dalam lingkungan tertentu dan jumlahnya tidak banyak. Perkawinan yang dilangsungkan secara adat melalui deretan kegiatan-kegiatan, sebagai konsekwensi logis dari apa yang disebut "rasan tuo". Di samping itu ada pula perkawinan yang tidak dilakukan menurut adat terurai, yang menurut istilah disebut "melarai" (kawin lari).

Dalam hal ini bisa terjadi, karena pinangan dari pihak laki-laki ditolak atau disebabkan ongkos perkawinan yang ditentukan oleh keluarga si gadis terlampau tinggi (uang jujur). Apabila kesepakatan telah tercapai di antara kedua belah pihak, maka *walimah al aurs* diadakan di rumah pihak mempelai perempuan sampai selesai. Dalam hal ini pihak keluarga mempelai lelaki, sifatnya memberikan bantuan yang diperlu-

kan dalam pelaksanaan persedekahan tersebut. Sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Palembang asli, tidak hanya berdasarkan genealogi tapi juga kebiasaan yang berlaku pada zaman kesultanan Palembang, yaitu tradisi menyusukan anak-anak mereka pada wanita-wanita lain yang tidak ada hubungan keluarga. Dengan demikian keluarga yang menyusui anak tersebut, termasuk lingkungan keluarga anak yang disusui. Secara tidak langsung anak yang disusui itu mempunyai saudara banyak yang akan memberikan perlindungan kepadanya di kemudian hari. Adat kebiasaan yang didukung oleh syari'at Islam ini telah berkembang sedemikian rupa di kalangan masyarakat biasa sehingga menemukan bentuk tersendiri dalam masyarakat pedusunan yang lazim disebut "bela-jar".¹²⁾

Bahasa yang ada di daerah ini seperti bahasa-bahasa daerah di Indonesia lainnya termasuk bahasa Austronesia. Di satu pihak bahasa yang dipakai oleh masyarakat Palembang mirip dengan bahasa Jawa "kromo inggil," sedangkan bahasa sehari-harinya digunakan bahasa Melayu yang mempunyai logat tertentu. Pada umumnya bahasa-bahasa di daerah ini dapat dimengerti, kecuali bahasa daerah Kayuagung dan Komeri yang sama sekali tidak dapat dimengerti daerah lain. Mungkin hal tersebut disebabkan bahasa daerah itu berkembang melalui proses pemecahan dan isolasi alam yang cukup lama antara kelompok-kelompok etnis atau sub-etnis yang mengucapkan bahasa-bahasa tersebut. Bahasa Palembang sehari-hari merupakan bahasa Melayu yang pada akhir katanya berbunyi (o) seperti : kemana (*kemano*), apa (*apo*), tiga (*tigo*) dan sebagainya. Oleh karena pola dasarnya mengambil dari struktur bahasa Melayu, maka penduduk daerah sekitar-

12) Tradisi "berfajar" adalah suatu cara tersendiri yang sering dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat agraris tradisional, dalam kerangka menciptakan sistem kekerabatan atas dasar teritorial untuk memperoleh dukungan moriel dan materiel. Peristiwa itu biasanya diadakan secara resmi di muka umum dengan mengundang orang banyak sebagai saksi dan diakhiri dengan makan bersama.

nya menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa penghubung dengan daerah-daerah lain yang memiliki dialek tersendiri.

BAB III

KOTA PALEMBANG DALAM LINTASAN SEJARAH LOKAL

1. Palembang di Bawah Kekuasaan Hindia Belanda

Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada, sejak kota Palembang mulai dikenal sebagai pusat kesultanan di daerah ini dan diakui oleh daerah sekitarnya, mulailah adanya hubungan-dagang antara kota tersebut dengan daerah kerajaan lainnya, seperti dengan kerajaan lingga yang terletak di Kepulauan Riau, kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Semenanjung Malaya dan kemudian dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, Hubungan yang terjalin antara keraton-dagang dengan daerah-daerah yang disebutkan tadi, terutama sekali menyangkut masalah perdagangan dan pelayaran kedua belah pihak.

Apa yang telah kita ketahui mengenai Palembang sebagai kota-badar, yang kemudian dalam perkembangan sejarahnya menjelma menjadi pusat kegiatan pelayaran-perdagangan pantai/sungai yang berarti, tidak hanya karena letaknya yang sentral dan strategis antara kota Batavia dan Singapura, tetapi lebih dari itu, Palembang menjadi terkenal karena ekspor ladanya memasuki ruang lingkup perdagangan internasional. Itulah sebabnya jalur pelayaran-laut yang menghubungkan-

kan mata-rantai Batavia-Palembang atau Palembang-Singapura semakin dikenal oleh pedagang-pedagang Asing.¹⁾ Akibat ramainya lalu-lintas pelayaran tersebut, maka kehadiran pedagang-pedagang asing seperti: Arab, India, Gujarat, Cina dan sebagainya menjadikan kota Palembang sebagai tempat pertemuan mereka untuk mengadu nasib. Mereka sangat tertarik dan senang mendatangi kota dagang itu, karena sarana dan prasarana yang diberikan oleh pengusaha kota, memungkinkan mereka dapat bergerak dalam pelaksanaan kegiatan jual-beli barang dengan pedagang-pedagang setempat.

Sementara Palembang sebagai kota-bandar maju dengan pesatnya dan muncul sebagai suatu kerajaan dagang yang berarti pada akhir abad ke-18, di daratan Eropah sendiri pada waktu itu terjadi pergolakan-pergolakan dalam bentuk Revolusi Prancis dan perang-perang yang dilancarkan oleh Napoleon Bonaparte, yang mempunyai akibat perubahan-perubahan politik yang terjadi di Eropah. Secara langsung atau tidak langsung perubahan tersebut telah menyeret Kesultanan Palembang ke dalam kancah pergolakan, yaitu perjuangan menentang segala macam bentuk prinsip monopoli yang akan dipaksakan oleh bangsa-bangsa Barat di daerah ini. Keraton dagang seperti Kesultanan Palembang yang menjalankan prinsip perdagangan-bebas yang sedang dalam puncak-puncak perkembangan kekuasaannya, taklah bisa menerima paksaan sistem monopoli begitu saja tanpa memberikan pukulan-pukulan berarti terhadap usaha anasir Asing apa pun yang akan mengurangi kemerdekaannya.²⁾ Kesultanan Palembang yang meliputi bekas wilayah Keresidenan Palembang dan Bangka Belitung, yang pada masa-masa pergolakan di Eropah merupakan salah satu diantara keraton-dagang di Nusantara yang merdeka, yang tidak mau begitu saja menerima apa yang telah

1) J.F. P. Richter, "*Economische Goographie van Zuid Sumatra*" dalam TEG, 1911, halaman 282.

2) Tim peneliti, *Sejarah Perlawanan terhadap kolonialisme dan Imperialisme di Sumsel*, (Laporan penelitian), Proyek IDS N 1982/1983, halaman 27-57.

terjadi sebagai akibat perubahan politik di benua itu. Oleh karena itu usaha untuk memasukkan Palembang sebagai pusat konsentrasi pemerintahan tradisional ke dalam kekuasaan Belanda di Batavia sebagai wilayah jajahannya, mendapat perlawanan yang keras sekalipun pada akhirnya Belanda muncul sebagai pemenang.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa hubungan Kesultanan Palembang dengan Belanda (VOC) di Batavia telah dirintis pada tahun 1617, ³⁾ yaitu pada masa pemerintahan Made Angsuka (1594–1629). Ketika Gubernur Jenderal Jan Pietersoen Coen memegang kekuasaan di Batavia, dikirimlah suatu utusan ke Palembang dibawah pimpinan Cryn van Raenburg untuk mengadakan hubungan dagang dengan kota tersebut. Pada mulanya misi tersebut diterima dengan baik, karena pada dasarnya Palembang sebagai kota-dagang terbuka bagi semua pedagang asing termasuk pedagang Belanda. Palembang sebagai kota bandar pada waktu itu terkenal sekali di luar negeri karena ekspor ladanya yang bermutu. Dengan kata lain Palembang menjadi besar karena perdagangan ladanya, karena lada memasuki perdagangan internasional. Tetapi kemudian dalam perkembangan sejarahnya, lada itu pulalah yang menjadi sebab kehancurannya pada awal abad ke-19. Rupa-rupanya suatu gejala umum di Nusantara pada waktu itu, yaitu tanaman dagang untuk pasaran Eropahlah yang membesarkan keraton-keraton dagang di Nusantara tetapi akhirnya tanaman itu pulalah sebab utama yang meruntuhkannya.

Terbukanya hubungan-dagang dengan VOC, diperkirakan akan menambah ramainya perdagangan-pelayaran di daerah ini, dan yang lebih penting lagi akan memberi keuntungan materiel bagi penguasa setempat. Semula hubungan kedua belah pihak itu berjalan dengan keterbukaan dan prinsip

3) P. De Roo De La Faille, *Dari zaman Kesultanan Palembang*, Bhadrata, Jakarta, 1971, halaman 20

perdagangan-bebas yang dianut oleh sistem kesultanan, memberikan fasilitas bagi pedagang Belanda untuk mendirikan perwakilan dagangnya di Palembang. Kantor perwakilan tersebut merupakan satu-satunya pos penghubung dengan penguasa kota untuk memperoleh produksi lada di daerah ini. Tetapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya pos-penghubung yang letaknya di pinggir Sungai Aur berhadapan dengan keraton, berubah menjadi suatu "loji" yang diperlengkapi dengan senjata meriam dan diizinkan untuk memasang bendera di sana⁴).

Dengan adanya loji sebagai tempat konsentrasi kekuatan, maka mulailah pedagang-pedagang Belanda memperlihatkan keinginan yang sebenarnya kepada penguasa setempat, yaitu di samping menguasai perdagangan lada yang banyak membawa keuntungan, juga berhasrat untuk menguasai daerah itu secara politis. Secara tersurat hubungan kedua belah pihak ditandatangani dalam tahun 1662 pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman. Nampaknya hubungan dagang itu sampai pada akhir abad ke-18, tidak selalu berjalan lancar dan tersendat-sendat, apabila dikaitkan dengan perubahan politik yang sedang melanda Eropah pada waktu itu. Bahkan dalam waktu lebih kurang sepuluh tahun, pulau Jawa mengalami pergantian pengusaha sampai tiga kali: dari tangan Belanda ke tangan Prancis; dari tangan Prancis ke tangan Inggris dan akhirnya dari tangan Inggris ke tangan Belanda.

Meskipun pengaruh Belanda (VOC) telah dimulai awal abad ke 17, tetapi secara riil baru diintensifkan pada awal abad ke-19, yaitu dalam rangka politik Daendels mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga kota Palembang diduduki oleh pasukan Daendels yang berkekuatan 100 orang serdadu.⁵) Betapa cepatnya Daendels mem-

4) Anon, Schetsen van Palembang, dalam *TNI* II. 1846, halaman 281, M.O. Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*, 1975, halaman 77.

5) H.J. de Graaf, *Geshiedenis van Indonesia*, 's-Gravenhagen: W van Hoeve-Bandung, 1949, halaman 305

bangun sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan di Jawa, namun tidak lama setelah kepergiannya pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Baik Belanda maupun Inggris kedua-duanya berhasrat untuk menguasai Palembang dan daerah sekitarnya, justru Pulau Bangka-Belitung yang menjadi bagian kekuasaannya banyak menghasilkan biji timah.

Dengan adanya perubahan politik di Negeri Belanda, yaitu negeri Belanda menjadi asal Perancis, maka pada tahun 1810 Lord Minto sebagai gubernur jenderal Inggris di Calcutta menunjuk dan mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil Pemerintah Inggris di daerah kerajaan-kerajaan Melayu yang berkedudukan di Penang. Sebelum Inggris menyerang pulau Jawa pada tahun 1811, semua kekuatan militernya telah dipusatkan di Penang. Raffles mendapat tugas penting untuk mematahkan kekuatan Prancis di Nusantara, dan disamping itu ia sangat terkenal sebagai orang yang sangat membenci kegiatan-kegiatan orang Belanda di kawasan ini.⁶⁾ Sewaktu Raffles masih berkedudukan di Malaka yang menjadi pusat konsentrasi kekuatan di Asia Tenggara, Palembang masih berada dalam pengaruh Belanda. Pada waktu itu Raffles berulang kali mengirim surat kepada penguasa tradisional di Palembang, agar terjalin hubungan baik antara kedua-belah pihak. Bagaimanakah sikap sultan Palembang pada waktu itu?

Lebih dari pada hubungan baik yang diharapkan oleh Inggris, Raffles meminta supaya sultan mengurangi atau membatalkan sama sekali semua perjanjian dengan Belanda, dan jika perlu membinasakan semua orang Belanda yang ada disana.⁷⁾ Sikap Sultan Machmud Badaruddin II terhadap

6) H.J. de Graaf, *Historiografi Hindia Belanda* (terjemahan C.P.F. Luhu lima), Bhatara, Jakarta, 1971, halaman 11

7) Dr. F. W. Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch-Indie* (Jilid V), Joost van Vondel, Amsterdam, 1940, halaman 95

Belanda dan Inggris pada dasarnya sama, yaitu menempuh jalan politik konfrontasi sebagai salah satu alternatif untuk mengusir penjajah Asing di daerah ini. Dalam kerangka politik itu pulalah sultan membangun benteng-benteng pertahanan di Barong, pulau Anyar, Rawa-rawa sekampung, Palembang lama, Batu Ampar dan Gunung Meru yang di perlengkapi dengan meriam-meriam. Sedangkan di dalam kota Palembang sendiri diperkuat dengan mendatangkan rakyat Uluan (mata gawe) beserta pesirahnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.⁸⁾

Momentum yang sedang di nanti-nantikan sultan yaitu berita kekalahan Jansens di Tuntang (Jateng) dan jatuhnya kota Batavia ke tangan Inggris, diterima sultan dari seorang Arab bernama Said Zain Bafakih. Dengan jatuhnya kota Batavia ke tangan Inggris, berarti kedudukan orang-orang Belanda di Sungai Aur (Palembang) tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusatnya di Batavia. Kesempatan yang baik ini telah digunakan oleh sultan sebagai kepala penguasa tradisional di daerah ini untuk mengakhiri pengaruh Belanda yang berloka di Sungai Aur. Dengan siasat yang cerdas, sultan mengundang J. Groenhof van Woortman (residen) ke istana untuk beramah-tamah. Sementara berlangsung pertemuan itu, pasukan-pasukan Palembang menyerbu dan menduduki loji di Sungai Aur. Sebanyak 24 orang Belanda yang terdiri dari pria-wanita dan anak-anak dan 63 orang serdadu Jawa-Belanda dilucuti senjatanya dan ditawan⁹⁾, kecuali seorang Indo-Belanda bernama Willem van De Wateringbuys berhasil melarikan diri bersama saudara perempuannya dengan menyamar sebagai penduduk setempat. Tetapi kemudian mereka tertangkap di seberang ilir, dan oleh sultan dipaksa menjadi muslim dan dibuang ke dusun Burai.¹⁰⁾

8) M.O. Woelders, *Op Cit*, halaman 87

9) H.T. Coltenbrander, *Koloniale Geschiedenis*, 's-Gravenhagen: Martinus-Nijheff, 1925, halaman 286

10) M.O. Weelders, *Op Cit*, halaman 89

Selanjutnya para tawanan tersebut diangkut ke Jawa dengan mempergunakan dua buah kapal, dan ketika sampai di muara Sungsang kapal-kapal itu di serang oleh angin topan dan tenggelam dengan segala isinya. Peristiwa yang tragis ini diberitakan kepada sultan, dan oleh sultan disampaikan kepada J. Groenhof van Woortman yang berada di dalam istana sebagai sandera. Sejak peristiwa di sungai Aur itu, maka mulailah disusun sistem pertahanan rakyat semesta yang dikenal dengan "sistem Sikap"¹¹⁾. Yang terdapat di sepanjang anak sungai Batanghari Sembilan, dan merupakan prototip pertahanan rakyat di zaman dulu. Tempat-tempat tertentu ditempatkan satuan-satuan meriam, perahu-perahu atau rakit yang berisi bahan-bahan yang mudah terbakar untuk menghalangi/menghambat kapal-kapal musuh yang akan menerobos masuk mendekati istana. Dengan kata lain Sultan Machmud Badaruddin II yang di dukung sepenuhnya oleh masyarakat Uluhan telah siap dalam menghadapi segala kemungkinan, apabila Inggris dapat mengalahkan pemerintah Prancis di Batavia.

Berbicara mengenai sistem pertahanan yang telah melibatkan sistem-sikap dalam wilayah Kesultanan Palembang, adalah suatu lembaga tradisional yang mengandung unsur gotong-royong dalam masyarakat pedusunan, dan secara potensial dapat dikerahkan sewaktu-waktu oleh sultan. Biasanya anggota-anggota yang tergabung dalam suatu "sikap" terdiri dari berbagai campuran sub-etnis yaitu orang-orang Palembang, Jawa, Melayu dan lain-lain. Mereka dibebaskan dari dan wajib berbakti kepada sultan dengan suatu tujuan tertentu demi untuk kepentingan pemerintah pusat di Palembang, Dusun Sungsang diwajibkan memelihara pelayaran-sungai antara muara Sungai Musi sampai ke kota; Dusun Madang dan

11) Sikap adalah suatu kelompok dusun dengan segala mata-gawe diluar tanggung jawab Marga, yang langsung dibawah kekuasaan Sultan dan dibebaskan dari pajak; lihat van Royen J.W. De, *Palembangsche Marga en haar Grond en Waterrechten* G.L. van den Berg Adrianis Beekhandel, Leiden, 1927, halaman 37-38.

Muara Lakitan menyediakan perahu-perahu pencalang dan beberapa dusun lainnya (Teluk Kijang, Muara Danau/Danau-cala, Terusan, Muara Enim, Lakitan dan Pedamaran) berfungsi sebagai pos pertahanan. Hampir seluruh Belida dijadikan daerah sikap, sehingga lembaga tersebut merupakan fenomena budaya dalam segi pertahanan wilayah yang alamiah dan ampuh, yang pernah diciptakan pada masa Kesultanan Palembang.

Tanpa membedakan siapa yang menjadi penguasa di Batavia, sultan selalu berusaha untuk membina hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam rangka meneruskan hubungan baik selama ini dengan Inggris, Sultan mengirimkan suatu misi dibawah pimpinan Tumenggung Suradiraja ke Batavia. Kedatangan utusan itu di Batavia tidak mendapatkan sambutan yang baik, karena Raffles sendiri menunjukkan muka yang bersahabat. Tidak adanya berita mengenai orang-orang Belanda di Palembang, telah mempercepat penguasa Batavia untuk mengambil keputusan, yaitu mengirimkan suatu komisi ke Palembang dibawah pimpinan Richard Philips, Alexander Hare dan Willem Wandenaar. Tugas komisi ini pada dasarnya untuk mengambil alih kekuasaan Belanda di daerah ini, dan yang lebih penting lagi adalah membicarakan status Pulau Bangka-Belitung.¹²⁾

Kapitulasi Tuntang menurut penilaian sultan, tidak berarti Inggris berhak mengambil alih kedudukan Belanda di Palembang dan daerah sekitarnya, karena pada waktu itu secara riil Belanda sudah kehilangan haknya di Sungai Aur. Jawaban yang tegas ini menunjukkan pendirian Sultan sebagai penguasa di daerah ini, dan akhirnya utusan tersebut kembali ke Batavia tanpa membawa hasil yang memuaskan. Setibanya mereka di Batavia, telah hadir dua orang Arab (Syarif Muhammad dan Said Bakar Roem) sebagai utusan pribadi Pangeran Dipati di sana. Mengenai Pangeran Dipati adalah sau-

12) Dr. F.W. Stapel, *Op Cit*, halaman 94

dara tiri Machmud Badaruddin II, yang merupakan tangan kanan sultan dalam sistem pertahanan. Nama aslinya adalah Pangeran Adipati Achmad Najamuddin yang sangat berambisi untuk menjadi Sultan Palembang. Perbedaan watak kedua orang saudara ini, telah digunakan sedemikian rupa oleh Inggris (Raffles) untuk menanamkan pengaruhnya di daerah ini dengan bekerja sama melalui Pangeran Adipati. Ketika armada Inggris dibawah pimpinan Mayor Jenderal Robert Rollo Gillespie tiba di muara Sunsang (20 April 1812).¹³⁾ Sultan yang sah dengan segala pendukungnya terpaksa menungsi ke daerah pedalaman dengan membawa benda-benda regalia keraton, termasuk stempel kerajaan yang merupakan lambang utama bagi penguasa tradisional di daerah ini.¹⁴⁾

Perbedaan orientasi yang berakar pada kepentingan pribadi antara kedua orang bersaudara ini, telah memberikan peluang bagi Inggris untuk memperoleh kedaulatan atas Pulau Bangka. Sebagai hasil perundingan antara Gillespie dengan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin, maka kedudukan "Pak Britanica" di daerah ini lebih mapan. Sementara Achmad Najamuddin diangkat menjadi sultan Palembang yang baru, di dalam kota timbul keonaran, perampokan dan penculikan terhadap orang-orang Asing sebagai pedagang perantara yang berdomisili di dalam kota. Sebagai wakil tetap pemerintah Inggris di Palembang diangkatlah Kapten Mears, yang akan melanjutkan pengejaran melawan sultan Ulu dengan pendukung-pendukungnya. Ketika terjadi kontak senjata di benteng Buayalangu (Bailangu), Kapten Mears mendapat luka parah dan terpaksa pasukannya mundur ke Palembang. Kemenangan pasukan sultan Ulu di Buayalangu itu,

13) H.T. Collenbranders, *Op Cit*, halaman 298; Bandingkan Dr. W.F. Stapel *Op Cit*, halaman 96.

14) H.M. Court, *An exposition of the relation of the British Governmen with the Sultan and state of Palembang and the Design of the Nederlands Government upon that Country with accounts and Maps of Palembang and the Island of Bangka*, London, 1826, Halaman 21.

secara psikologis telah mengundang orang-orang Melayu di Jambi, orang Aceh, orang Riau dan Minangkabau untuk bersama-sama menentang orang kafir di daerah ini. ¹⁵⁾

Dukungan rakyat yang berdasarkan karisma kepemimpinan tradisional, sumbernya harus dicari dalam tradisi yang turun-temurun sejak adanya poyang-poyang dan kepala-kepala marga. Kemudian karisma kepemimpinan itu dikaitkan dengan agama Islam, ketika agama Islam menjadi agama resmi dalam sistem kesultanan, yaitu sejak pemerintahan Sultan Abdulrachman. Tradisi seperti ini banyak contoh dari kaum ulama, seperti yang pernah dilakukan oleh para wali di Jawa dalam menegakkan kerajaan Islam. Salah seorang tokoh historis-karismatis yang telah banyak menyematkan wewenang berdasarkan ajaran Islam pada pertengahan abad ke-18, adalah Syeh Abdul Al-Syamad al-Palimbani. ¹⁶⁾

Kedudukan Kapten Mears digantikan oleh Mayor William Robinson, yang telah memilih kebijaksanaan baru, yaitu meninggalkan politik konfrontasi dan berusaha melalui jalan damai dalam menghadapi sultan Ulu, yang semakin lama semakin banyak pengikutnya. Akhirnya tercapailah kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu Inggris mengakui sultan Ulu sebagai sultan Palembang, kecuali Pulau Bangka-Belitung masih tetap dikuasai oleh Inggris. Setelah penandatanganan perjanjian itu selesai (29 Juni 1813), Robinson memberitahukan kepada sultan muda (Achmad Najamuddin) mengenai kebijaksanaannya. Begitulah nasib seseorang yang berjiwa kerdil dan ambisi kekuasaan yang tidak percaya kepada kekuatan sendiri, menduduki takhta yang harus dibayar

15) Tim perumus, *Risalah sejarah perjuangan Sultan Machmud Badaruddin II*, Kotamadya Palembang, 1980, Halan 28

16) G.W.J. Drewes, "Further Data concerning ABD al-Samad al-Palimbani . dalam *BKI*, jilid 123, no. 283, 1976, halaman 267-288; lihat Muhammad Uthman el-Muhammady, "The Islamic Concept of Education according to Syaykh Abdul's Samad of Palembang and its Significance in relation to the Issue of personality Integratiion, dalam *Majalah AKADEMIKA*, Kualalumpur, 1972.

dengan harga diri yang tercela dalam sejarah lokal. Ia terpaksa mengundurkan diri dan pindah kekeraton lamo dengan mene-
rima uang tahunan, sedangkan sultan Ulu (Machmud Bada-
ruddin II) diakui oleh Inggris dan menempati Kraton Besak
atau Koto Besak.¹⁷⁾

Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Robinson itu tidak lama usianya, karena prinsip kebijaksanaan itu tidak disetujui oleh Raffles di Batavia, sehingga kedudukan Robin-
son di Palembang dignatikan oleh Mayor W. Colebrooke un-
tuk membatalkan perjanjian yang pernah dibuat oleh Robin-
son dengan Machmud Badaruddin II sampai menjelang sir-
nanya Kesultanan Palembang pada awal abad ke-19, yaitu ja-
tuhnya daerah ini ke dalam kekuasaan kolonial Belanda, nam-
paknya kedua sultan bersaudara itu saling berebut pengaruh.
Di satu pihak didukung oleh penguasa Asing dan dilain pihak
(Machmud Badaruddin II) didukung oleh sebagian besar pen-
duduk kota termasuk rakyat di daerah pedalaman. Dengan
demikian pada waktu itu adanya dualisme dalam pemerintah-
an tradisional yang tidak menentu, dan secara psykhologis
teah melahirkan bibit-bibit yang kurang sehat dalam masya-
rakat, dan hal itu sangat dirasakan sekali pada masa Revolusi
Fisik di daerah ini.

Setelah berakhir perang Napoleon di daratan Eropa
yang memakan waktu selama kurang lebih seperempat abad,
maka antara Inggris dan Belanda menyetujui suatu perjanjian
yang dikenal dengan nama Konvensi London (12 Agustus
1814). Di pihak Belanda perjanjian itu ditandatangani oleh
Mr. Hendrik Fagal, sedangkan di pihak Inggris ditanda tangani
oleh Lord Caster Cagh. Dalam kaitan ini, Nusantara yang di-
duduki oleh Inggris harus dikembalikan ke tangan Belanda,
termasuk Kesultanan Palembang yang harus diserahkan terima-
kan. Sebagai tindak lanjut perjanjian itu, serah terima daerah
ini dilakukan di Mentok (10 Desember 1816) antara MH

17) M.O. Woelders, *Op Cit* halaman 9

Court sebagai wakil pemerintah Inggris dan K. Heynis sebagai wakil Pemerintah Belanda. Sementara serah terima itu berlangsung, Raffles dengan diam-diam memperkuat kedudukannya di Bengkulu dan mengadakan hubungan rahasia dengan Sultan Mudo (Achmad Najamuddin) di Palembang.¹⁸⁾ Dengan alasan itu maka Sultan Mudo ditangkap oleh Muntinghe, dan kemudian dibawa ke Batavia untuk diasingkan ke Cianjur.

Dengan kembalinya kekuasaan Belanda di daerah ini, maka mulailah meletus "Perang Palembang" yang menjadi sumber ilham para sastrawan, yang telah ditulis dalam bentuk "Hikayat Perang Palembang" berbentuk syair. Sesungguhnya pertempuran di Palembang pada zaman kesultanan, tidaklah sehebat apa yang digambarkan di dalam syair tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam pertempuran itu, yaitu ikut sertanya penduduk dari segala lapisan dengan mengorbankan "Perang Jihad" melawan orang kafir, kiranya perlu dikaji kembali dalam menentukan skala prioritas pembangunan di daerah ini. Akhirnya untuk mempercepat penyelesaian kontak senjata antara Belanda dengan Sultan Machmud Badaruddin II, Gubernur Jenderal van der Capellen menunjuk Jenderal Hendrik Marcus Baron de Kook untuk memimpin ekspedisi ke Palembang.

Pada tanggal 22 Agustus 1819 diberangkatkanlah suatu ekspedisi ke Palembang dengan perlengkapan: dua buah kapal perang, dua kapal meriam, empat kapal pengangkut logistik yang dipersenjatai, 900 orang serdadu dan sejumlah kapal-kapal kecil. Setelah sampai di Muntok, ditambah lagi empat kapal perang, sebuah Fregat, 500 orang serdadu dan beberapa kapal lainnya. Ikut serta dalam ekspedisi Achmad Najamuddin bersama keluarganya dan beberapa orang bangsawan, untuk dijadikan alat pemecahbelah antara keluarga istana.

18) E.B. Kkielstra & N.J. Krom, *Nederlandsch-Indie*, Deel II, Den Haag; Elvesier, 1912, halaman 335

Ditinjau dari segi persenjataan yang tidak seimbang dan adanya golongan istana yang sudah siap memberikan bantuan moril kepada pasukan Belanda, maka sudah dapat diramalkan peperangan melawan pasukan Palembang akan berakhir dengan kemenangan Belanda. Rupa-rupanya telah mengerahkan segala kekuatan yang ada untuk menaklukkan daerah ini melalui kekerasan, karena kewibawaan atau moril-prestise Pemerintah Belanda di daerah-daerah lain, sangat tergantung kepada berhasil atau tidaknya Belanda menduduki Kesultanan Palembang.

Kekalahan pasukan Palembang dalam menghadapi serangan Belanda kali ini, ¹⁹⁾ tidak hanya terletak pada keunggulan persenjataan, politik adu-domba atautkah tipu muslihat yang pernah dilukiskan oleh penulis-penulis Barat, akan tetapi yang lebih penting dan menentukan penyebab kekalahan itu, ialah menurunnya semangat juang pasukan-pasukan Palembang yang sedang "mabuk kemenangan" yang dirasakan selama ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan, apabila suatu pasukan yang tidak memiliki moral yang tinggi sekalipun diperlengkapi dengan persenjataan, maka peperangan itu akan dimenangkan oleh pihak lain yang mempunyai mental yang cukup tinggi.

Setelah benteng-benteng pertahanan yang diandalkan dapat dipatahkan sama sekali, kecuali daerah sekitar kraton saja yang dapat bertahan, maka terpaksa pada tanggal 3 Juli 1821 Sultan Machmud Badaruddin II bersama kawan-kawannya yang setia menghentikan perlawanan dan menyerah. Ia bersama keluarganya dibawa ke Batavia dan terakhir dibuang ke Ternate. Dengan demikian mulailah kekuasaan kolonial Belanda di daerah ini dan dipusatkan di Palembang.

Apabila kita mengenang kembali perlawanan yang

19) Hampir semua tulisan/laporan yang dibuat oleh penulis-penulis Belanda; H.T. Collendbaranders, C.B. Hooyer, W.F. Stapel, M.O. Woelders dll. Mengatakan Sultan tertipu oleh Mayor Jenderal De Kock.

pernah terjadi di Palembang dan daerah sekitarnya terhadap usurpator Barat (Belanda-Perancis-Ingggris), dalam rangka pergeseran kekuasaan lokal yang merupakan bagian dari sejarah nasional. Ia pernah muncul dalam menghadapi kolonialisme dan Imperialisme, memiliki penuh kepribadian menjalankan tugas sejarahnya bukan sebagai obyek, tapi tetap sebagai subjek yang ikut menentukan nasib sendiri percaya akan kekuatan rakyatnya (masyarakat Uluan) dan berhasil untuk masa itu memancangkan "silang kehidupan yang gemilang", sesuai dengan gaya potensi Batang hari Sembilan.

2. Posisi dan arti Palembang pada awal abad ke-20

Palembang yang terletak pada kedua tepi Sungai Musi, di mana Sungai Komering dan Sungai Ogan bermuara di dekat Pulau Kembara, tentunya dulu dibangun berdasarkan pertimbangan yang seksama, sehingga semua lalu-lintas yang melalui sungai dapat diawasi. Sepanjang masa jalur melalui sungai-sungai digunakan oleh penduduk Uluan, untuk membawa hasil bumi dan hasil-hutan lainnya ke ibukota pelabuhan sungai. Barang-barang itu dijualbelikan oleh pedagang asing sebagai pedagang perantara, atau ditukarkan dengan barang-barang dari luar. Semenjak Pemerintah Kolonial Belanda menguasai daerah ini sampai masa pendudukan tentara Jepang, Palembang sebagai kota-bandar memiliki fungsi ganda, yaitu selain sebagai pusat administrasi pemerintah, juga sebagai kota pelabuhan yang sibuk mengatur masuk keluarnya barang dan sekaligus berperan sebagai bandar transito. Oleh karena itu sejak semula dan tumbuh berkembang sebagai pusat-kuasa maritim, justru letaknya yang sentral dekat perairan Selat Sunda dan sebagai pintu gerbang memasuki perairan Nusantara.

Pada masa Kesultanan Palembang, kota bandar ini banyak dikenal oleh pedagang-pedagang asing karena ekspor

ladanya,²⁰⁾ sebab lada terlibat dalam perdagangan internasional dan akhirnya lada itu pulalah yang menjadi sebab keruntuhannya. Rupa-rupanya dianggap sebagai suatu gejala umum di Kepulauan Nusantara pada waktu itu, yaitu tanaman dagang untuk pasaran Eropalah yang membesarkan kraton-kraton dagang, tetapi tanaman itu pulalah sebab utama yang menghancurkan. Betapa penting peranan jalan dagang yang melalui kedua selat itu, dan oleh karena lokasi letaknya menyebabkan Palembang banyak dipengaruhi oleh pulau-pulau sekitarnya, baik dalam soal kebudayaan maupun dalam percampuran suku bangsa. Di samping faktor-faktor tersebut, letak kota-bandar ini sangat menguntungkan karena Sungai Musi yang bermuara ke Selat Bangka memiliki jalur pelayaran-perdagangan yang mudah dijangkau dari Batavia atau Singapura. Transportasi melalui Sungai Musi ini telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi pedagang-pedagang asing,²¹⁾ terutama sekali setelah Pemerintah Kolonial Belanda menemukan sumber-sumber mineral di daerah ini pada permulaan abad ke-20.

Apabila diperhatikan letak Kota Palembang di kaki Bukit Siguntang pada kira-kira 2°.59'.27" Lintang Selatan dan 104°.45'.25" Bujur Timur dari Greenwich, maka secara fisik kota ini terbagi dua bagian yang dipisahkan oleh aliran Sungai Musi, yaitu Daerah Seberang Ilir dan Daerah Seberang Ulu Sungai Musi yang panjangnya kira-kira 553 kilometer bermuara ke Selat Bangka, adalah induk dari sembilan anak-sungai dan secara tradisional daerah ini lazim disebut daerah Batanghari Sembilan. Di dalam kota terdapat banyak anak-sungai yang berpola sejajar apabila datang musim air-pasang, sehingga daerah sekitarnya digenangi air. Saluran-saluran air yang mengairi anak sungai itu tidak terpelihara, sehingga dari tahun ke tahun proses pendangkalan secara alamiah terus saja berlangsung. Anak-anak sungai itu adalah: Sungai Lais, Su-

20) H.T. Collenbrander, *Op Cit* halaman 286

21) J.F. O. Rochter, *Op Cit*, halaman 282-283.

ngai Lewang Kidul, Sungai Sekanak, Sungai Tawar, Sungai Serengam, Sungai Kebon Gde, Sungai Kedukan Bukit, Sungai Talang, Sungai Jeruju, Sungai Bagus Sekuning, Sungai Manggis, Sungai Sawah, Sungai Sriguna, Sungai Kedemangan, Sungai Kedukan Anyar, Sungai Keramasan dan Sungai Tengkuruk.

Pada zaman Kesultanan Palembang sungai-sungai tersebut ada yang dijadikan benteng pertahanan untuk melawan serdadu Belanda. Sejak dulu sampai sekarang ini sungai-sungai itu digunakan di samping untuk sumber air minum bagi penduduk sekitarnya, tempat membuang kotoran juga digunakan sebagai sarana perhubungan dari kampung ke kampung. Bahkan sampai sekarang nama-nama kampung di dalam kota mengambil dari anak sungai setempat seperti: Kampung Serengam, Kampung Sungai Lais, Kampung Sungai Tawar dan sebagainya.

Jalur komunikasi yang menghubungkan daerah pedalaman dengan Palembang sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial, atau yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain, sungai satu-satunya jalur-lalu-lintas yang paling lancar pada waktu itu dan waktu sebelumnya. Terutama Sungai Musi yang dapat dilayari oleh kapal roda lambung dan perahu-perahu motor sampai ke daerah uluan mencapai jarak 200 sampai km².²²) Dengan kata lain kapal dan perahu motor yang berukuran sedang dan kecil merupakan alat transportasi yang dominan, karena tata lingkungan daerahnya sangat memungkinkan dan kota Palembang sendiri memiliki lalu-lintas air yang sangat ramai. Perahu-perahu kecil dan sedang hilir-mudik masuk keluarnya sungai sebagai alat penghubung antara kampung yang satu dengan kampung yang lain, bahkan perahu-perahu kecil yang diberi atap kain-cita berfungsi sebagai pasar-terapung, yang berisi barang da-

22) D.G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Derde Deel, 's-Gravenhage Martinus Nijhoff, Leiden, 1917, halaman 260

gangan atau makanan ringan untuk dijual pada penduduk setempat. Bagi mereka yang tinggal di dekat sungai tidak perlu lagi pergi ke warung-perahu-perahu untuk hilir mudik mencari pembeli. Semua gambaran yang terlukis ini masih segar sekali pada zaman Revolusi Fisik, walaupun di sana-sini telah banyak anak-anak sungai yang tidak dapat digunakan karena dangkal.

Proses pertumbuhan ekonomi swasta asing (bangsa Barat) di daerah ini, tidak hanya terbatas pada perluasan areal perkebunan tanaman keras saja, tetapi juga meliputi politik eksploitasi sumber minyak di beberapa daerah dengan pusat penyulingan di Sungai Gerong dan Plaju. Oleh sebab itu Kota Palembang tidak hanya sebagai kota-dagang saja, tapi juga sebagai kota industri yang mempunyai arti tersendiri bagi pemerintah kolonial. Sejalan dengan perkembangan politik ekonomi keuangan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya di samping itu untuk memperlancar pengangkutan pos pengiriman petugas-petugas pemerintah, maka mulailah dibuka jalan-jalan mobil di daerah ini. Pada tahun 1913 jaringan jalan-darat telah dibikin sepanjang 1074 kilometer. Demikian pula sejak tahun 1912 telah dimulai pembuatan jalan kereta-api yang menghubungkan Kota Palembang — Teluk Betung, dengan jalur simpang dari Prabumulih ke Muara Enim sepanjang 152 kilometer, di mana terminal pusatnya berada di Kampung Kertapati.^{2 3)}

Perhatian Pemerintah Kolonial Belanda mengenai daerah ini dari tahun ke tahun tidak semakin kendor, bahkan sejak dikeluarkan Undang-undang Agraria 1870 telah merangsang kaum kapitalis Belanda untuk melebarkan sayapnya ke luar Pulau Jawa.

Dalam kaitan ini Keresidenan Palembang dan daerah sekitarnya, merupakan daerah yang cukup luas untuk dijadi-

23) Op Cit, halaman 261

kan lahan perkebunan tanaman keras terutama perkebunan karet setelah terjadi krisis tembakau dalam tahun 1891. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, daerah ini memiliki prospek yang baik untuk masa-masa mendatang, karena sejak permulaan abad ke-18 (1710) di Pulau Bangka-Belitung telah diketemukan biji timah. Sejak tahun 1860 biji timah di Pulau Belitung diusahakan oleh *Billiton Maatschapij*. Pada tahun 1891 di daerah Tanjung Enim yaitu di Bukit Asem telah diketemukan tambang batubara dan di beberapa tempat lainnya terdapat sumber minyak seperti : di Muara Enim (1899), Suban Jeriji (1906), Limau (1915), Karang Ringin (1902), Babat I (1904), Banjarsari (1903), Selaro (1903), Arahan (1907), Ramok (1915), Tanjung Luntar (1915), Ladang Pait (1905) dan Sumpal (1912) yang kesemuanya ini diusahakan oleh *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (B.P.M).²⁴⁾ Sumber-sumber minyak mentah itu dialirkan ke Plaju atau Sungai Gerong untuk di olah, dan kemudian dikirimkan ke luar negeri yang dibawa oleh kapal-kapal tanki melalui pelabuhan kota yang terletak di 2 Ilir Palembang. Apa yang telah dilukiskan di atas, ini merupakan suatu gambaran umum mengenai sampai sejauh mana peranan dan posisi kota. Palembang sebagai kota dagang dan industri pada zaman kolonial Belanda. Nampak dengan jelas mengenai Palembang sebagai kota-bandar dan pusat konsentrasi pemerintahan kolonial di daerah ini, tidak saja berdasarkan letaknya yang sentral sebagai mata rantai perdagangan laut antara Kota Batavia dan Singapura, tetapi juga mengandung banyak kemungkinan sebagai produsen sumber alam dan komoditi ekspor non-minyak lainnya yang diperlukan di pasaran Eropah.

Tidaklah berlebih-lebihan apabila daerah ini untuk masa-masa mendatang memiliki prospek yang cukup baik, dan kota Palembang sendiri dapat dikembangkan sebagai kota dagang dan industri. Itulah sebabnya penduduk di dalam kota dan

24) Op Cit, halaman 263

masyarakat pedusunan di daerah ini, pada permulaan dua dasawarsa abad ke-20 dihadapkan pada berbagai tantangan yang datang dari luar, baik dalam segi politik dan ekonomi maupun kebudayaan.

3. Sistem dan Administrasi Pemerintahan

Setelah sistem kesultanan dihapuskan oleh Belanda, kota Palembang langsung sepenuhnya di bawah Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun pada waktu itu Pemerintah Kolonial Belanda berada di Palembang dan menguasai Bangka-Belitung, tetapi secara riil daerah Uluu yang letaknya jauh dari pusat kota, kekuasaan pemerintah kolonial belum atau kurang dirasakan. Bahkan sampai pada pertengahan tahun 1860-an Belanda masih belum dapat berkuasa sepenuhnya atas daerah pedalaman.²⁵⁾ Oleh sebab itu pada masa transisi ini Pemerintah Kolonial Belanda masih membutuhkan bantuan pengaruh dan tenaga dari golongan tertentu, karena merasa takut dan belum banyak memiliki kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi daerah ini. Seperti dilukiskan oleh P. De Roo De Faille²⁶⁾; sesudah Kota Palembang jatuh ke tangan Belanda 1825, timbulnya perlawanan rakyat di mana-mana, keadaan alam yang berhutan rimba dan berbukit-bukit sangat menguntungkan perang gerilya, menyebabkan pemerintah kolonial belum berani untuk turun tangan secara langsung memerintah daerah ini secara keseluruhan. Pangeran yang satu diangkat kemudian diturunkan dan diganti oleh pangeran lain dan seterusnya..

Tindakan pemerintah yang menunjuk dan mengangkat, kemudian memecat para pangeran yang silih berganti itu, menggambarkan betapa sulitnya Belanda untuk memaksakan kekuasaannya di daerah ini terutama di daerah Uluu. Pernah terjadi dalam tahun 1838 pemerintah kolonial mengangkat

25) J.L. Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, (terjemahan Sugarda Purbakawatja) Bhratara, Jakarta 1971, halaman 9.

26) P De Roo De Faille, *Op Cit* halaman 50-53

salah seorang di antara menantu sultan, yaitu Pangeran Kramajaya Abdul'aziz menjadi semacam perdana menteri (*Rijksbestuurder*) yang ditempatkan di bawah kekuasaan residen. Pengangkatannya cukup kuat, karena dikukuhkan oleh surat keputusan Koning Willem tertanggal 2 Januari 1838 dan diperkuat pula oleh Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia No. 11 tanggal 8 September 1840. Di samping itu pula ia diberi gelar setinggi langit yaitu: "Pangeran Bupati Perdana Menteri Kramajaya Pangeran Mangkunegara Sultan Agung Alam Khabir Sri Maharaja Mutar Alam Senopati Martapura Ratu Mas Panembahan Raja Palembang.²⁷⁾ Tetapi bagaimana akhirnya? Ia kemudian pada tahun 1851 terlibat dalam usaha menentang Pemerintah Belanda, sehingga dipecat dari jabatannya dan diasingkan ke Purbalingga (Banyumas) sampai ia wafat di sana dalam tahun 1862. Sejak peristiwa itu Pemerintah Belanda tidak percaya lagi pada bangsawan/priyayi yang ada hubungan keluarga dengan sultan-sultan Palembang, dan hal itu terlihat dari tindakannya di masa-masa mendatang.

Ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengoper pemerintahan daerah ini, yaitu sejak dihapuskannya sistem kesultanan, maka bekas wilayah kesultanan dijadikan dua keresidenan: Keresidenan Palembang dan Keresidenan Bangka-Belitung. Pada waktu itu Sumatera bagian selatan oleh pemerintah pusat di Batavia dibagi-bagi dalam beberapa daerah: Keresidenan Jambi, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Palembang, Keresidenan Bangka-Belitung dan Keresidenan Lampung. Sistem administrasi dalam bentuk residensi ini, merupakan warisan pemerintahan Inggris (Raffles) yang pernah diterapkan di Pulau Jawa suatu sistem yang dibawa dari India, dan setelah Indonesia dikembalikan pada Belanda sistem itu tetap dipertahankan. Menurut konstitusi 1814/1815 Raja Belanda mempunyai hak kekuasaan penuh untuk mengatur

27) R. M. Husin bin R.M. Hazir, *Penegak dan perjuangan Rakyat Palembang Darusslam*, (dikumen yang tidak diterbitkan) Palembang, halaman 24.

tanah jajahan, sedangkan *Staten General* (DPR Belanda) tidak mempunyai hak kontrol. Pemerintah tertinggi di daerah jajahan, gubernur jenderal sebagai wakil raja Belanda, yang dibantu oleh empat orang Penasehat, seorang sekretaris umum dan di bawahnya terdapat seorang sekretaris kepala.

Tetapi setelah kemenangan kaum liberal dalam pemerintahan Belanda — yang kemudian menelurkan undang-undang dasar baru, maka mulailah diatur Hindia Belanda berdasarkan undang-undang tersebut yang selesai disusun dalam tahun 1854. Berdasarkan undang-undang baru itu Pemerintah Hindia Belanda diletakkan di bawah pengawasan *Staten General* yang baru terlaksana dalam tahun 1968, di mana anggaran belanja untuk Hindia Belanda harus mendapat persetujuan *Staten General* lebih dulu. Dalam hubungan ini materi jajahan harus bertanggungjawab kepada *Staten General* dan memberikan bimbingan pengarah yang terperinci kepada gubernur jenderal di Batavia. Itulah sebabnya kebijaksanaan yang diambil oleh gubernur jenderal dalam teknis pelaksanaan di Hindia Belanda selalu memusatkan administrasi pemerintahan di tangannya sendiri.^{2 8})

Mengingat hubungan antara kedua pejabat itu, maka sudah sewajarnya calon gubernur jenderal yang dipilih oleh menteri jajahan adalah orang yang paling dekat dengan menteri jajahan karena ia yang harus mempertahankan politik kebijaksanaannya di hadapan *Staten General*. Di samping itu ia juga bertanggungjawab kepada raja Belanda melalui menteri jajahan. Dalam hal mengambil inisiatif yang penting, ia harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Dewan Hindia, sekalipun ia tidak terikat oleh advis dari, anggota dewan.

Untuk memperoleh gambaran yang agak jelas mengenai struktur pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1900—

28) Sartono Kartodirdjo et al. *Sejarah Nasional Indonesia V*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, halaman 18; bandingkan Drs. Bayu Suryaningrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia*, babak Hindia Belanda dan Jepang, Dewaruci Press, Jakarta, 1981, halaman 36—38.

1940 adalah sebagai berikut: Daerah-daerah jajahan Belanda seperti Hindia Belanda, Suriname dan Guracao dan diawasi oleh seorang menteri jajahan dan oleh karena itu gubernur jenderal (wali negara) di Hindia Belanda bertanggungjawab kepada ratu Belanda melalui menteri jajahan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang lingkup kekuasaannya. Pemerintah Belanda di Indonesia dipimpin oleh seorang wali negara yang berpangkat gubernur jenderal, yang dalam pelaksanaan tugas pemerintah sehari-hari dibantu oleh delapan kepala departemen (direktur) beserta stafnya dan pembantu-pembantu. Kedelapan departemen itu meliputi: (1) Departemen Kehakiman, (2) Departemen Keuangan, (3) Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, (4) Departemen Pendidikan/Agama dan Kerajinan, (5) Departemen Urusan Ekonomi, (6) Departemen Perhubungan, (7) Departemen, dan (8) Departemen Marine (Angkatan Laut).²⁹

Gubernur jenderal diangkat dengan keputusan raja berdasarkan usul menteri jajahan, untuk waktu yang tidak ditentukan. Meskipun demikian biasanya setelah 5 tahun ia meletakkan jabatannya. Gubernur jenderal harus seorang Belanda dan berumur sedikitnya 30 tahun. Pelantikannya dilakukan dalam rapat terbuka *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan berkedudukan di Bogor yang pada waktu itu disebut *Buitenzorg*. Dalam pelaksanaan tugas operasional ia dibantu oleh suatu lembaga yaitu, sekretaris umum dengan beberapa orang sekretaris negara, yang merupakan pembantu teknis untuk melancarkan administrasi pemerintahan. Sebagai penasihat gubernur jenderal adalah suatu dewan yang dikenal dengan nama *Raad van Nederlands-Indie*, yang berkedudukan di Jakarta dengan anggota sedikitnya 4 dan sebanyak-banyaknya 6 orang.

29) BP. 3K, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977, halaman VI, lihat Drs, Bayu Suryaningrat, *Op Cit*, halaman 39.

Di lain pihak terdapat Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang merupakan badan legislatif, sebagai pemberian kesempatan kepada warga Hindia Belanda untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kepentingan rakyat. Pemerintah dan Dewan Rakyat merupakan lembaga pusat untuk seluruh Hindia Belanda. Secara mayoritas anggota-anggotanya semula terdiri atas orang-orang Belanda. Tetapi kemudian berangsur-angsur diduduki oleh orang-orang pribumi. Sebagian besar anggotanya dipilih dan sebagian diangkat atau ditunjuk dalam masa jabatan 4 tahun. Sebagai badan legislatif, ia mempunyai hak seperti: hak mengeluarkan pendapat, hak mengatur anggaran belanja, hak membuat undang-undang, hak inisiatif, hak amandemen, hak advis, hak mengajukan petisi dan hak inter-pelasi. Di dalam prakteknya hak-hak tersebut sangat terbatas, sehingga tugas utama *Volksraad* ialah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Hindia beserta perundang-undangan. Dengan kata lain bobot keseimbangan pemerintahan berada pada kekuasaan eksekutif atau "*uitvoerend gezag*".

Pejabat di bawah gubernur jenderal adalah gubernur, residen, asisten residen, kontroler, bupati³⁰) dan seterusnya. Mulai tingkat bupati ke bawah di wilayah Keresidenan Palembang hanya mengenal pangkat "Demang" yang dijabat oleh pemuka-pemuka pribumi. Biasanya masing-masing Bupati didampingi oleh seorang asisten residen, sedangkan di daerah ini masing-masing demang di dampingi oleh seorang kontroler.³¹) Di Pulau Jawa sendiri terdapat penguasa pribumi yang berstatus kepala daerah swapraja besar dan kecil, yaitu yang setingkat dengan residen (Jogyakarta dan Surakarta) dan ada pula setingkat kabupaten atau rendah

30) Pangkat "Bupati" di daerah ini tidak dikenal pada masa pemerintah Kolonial Belanda, dan yang ada setingkat dengan itu dijabat oleh "Demang". Kemudian pada zaman Revolusi Fisik pangkat itu dignati engan nama "Wedana" dan kemudian barulah timbul sistem Daerah Tingkat II yang dikepalai oleh "Bupati" /Walikota.

31) BP. 3K, *Op Cit* , halaman VII.

dari itu bahkan setingkat dengan desa. Jabatan bupati, wedana atau demang dan sebagainya diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda, sedangkan kepala swapraja dijabat secara turun temurun.

Daerah-daerah keresidenan seperti: Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung termasuk wilayah Propinsi Sumatera yang diperintah oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Medan, Keresidenan Palembang sendiri terbagi dalam beberapa afdeeling, kecuali ibukota Palembang, yang masing-masing dikepalai oleh seorang asisten residen. Secara keseluruhan wilayah ini dibagi sebagai berikut:

1. Daerah Ibukota Palembang.
2. Afdeeling Palembang Ilir (*Palembangsche Benedenlanden*) dengan ibukotanya Sekayu yang dibagi dalam beberapa Onderafdeeling;
 - 2.1. Onderafdeeling Musi Ilir
 - 2.2. Onderafdeeling Banyuasin dan Tanah Kubu
 - 2.3. Onderafdeeling Rawas.
 - 2.4. Onderafdeeling Ogan-Ilir.
3. Afdeeling Palembang Ulu (*Palembangsche Bovenlanden*) dengan ibukotanya Lahat yang terbagi atas:
 - 3.1. Onderafdeeling Lematang Ilir
 - 3.2. Onderafdeeling Lematang Ulu
 - 3.3. Onderafdeeling Tanah Pasemah
 - 3.4. Onderafdeeling Tebing Tinggi
 - 3.5. Onderafdeeling Musi
4. Afdeeling Ogan Ulu dan Komering dengan ibukota Baturaja yang terbagi atas:
 - 4.1. Onderafdeeling Komering Ulu
 - 4.2. Onderafdeeling Ogan Ulu
 - 4.3. Onderafdeeling Muara Dua
 - 4.4. Onderafdeeling Komering Ilir

Masing-masing Onderafdeeling dikepalai oleh seorang kontroler, sedangkan ibukota Palembang dibagi atas dua distrik, yaitu Distrik Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu. Dengan

demikian seluruh wilayah Keresidenan Palembang terdapat 15 distrik dan 40 onderdistrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang asisten demang.³²⁾

Onderafdeeling yang merupakan distrik dan membawahi onderdistrik dibantu oleh beberapa personil mantri polisi dan mantri pajak (*belasting*), adalah aparat pemerintahan formal yang diangkat dan digaji oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang secara vertikal melaksanakan perintah atasan, sehingga arus pemerintahan hanya satu arah yaitu dari atas ke bawah. Segala sesuatu berasal dan diatur dari pusat dan diselenggarakan oleh aparat pemerintah pusat pada tingkat daerah, betapapun kecil dan tidak berarti urusan tersebut. Pembagian wilayah semacam ini tidak hanya menyesuaikan kehendak pemerintah kolonial, tetapi secara psikologis telah mempertajam rasa kesukuan yang tinggal di daerahnya masing-masing, yang diakui sebagai persekutuan Hukum adat yang bersifat otonom.³³⁾

Pejabat-pejabat seperti residen, asisten residen dan kontroler pada umumnya dipegang oleh orang-orang berkebangsaan Belanda, yang merupakan suatu korps tersendiri yang lazim disebut *Nederlandsche Corp van het Binnenland Bestuur*". Orang-orang bumiputera hanyalah menjabat sebagai pegawai biasa (*ambtenaar*) seperti demang, asisten demang, mantri polisi dan mantri pajak. Residen sebagai penguasa administratif, legislatif, yudikatif dan fiskal adalah sebagai kepala pelaksana teknis di tingkat keresidenan, sedangkan asisten residen yang mengepalai afdeeling sejajar dengan daerah kabupaten di Jawa, menjalankan tugas-tugas residen kecuali yang menyangkut bidang peradilan. Tugas seorang kontroler pada dasarnya hanyalah mengumpulkan data informasi dan melaksanakan semua perintah dari atasannya. Dalam melaksanakan tugas kewajiban pemerintahan,

32) DG. Stibbe, *Op cit*, halaman 267 – 268

33) Drs. G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun-Mas NV, Makassar, 1955, hal. 227.

Kontrolleur didampingi oleh demang, asisten demang dan beberapa orang mantri polisi dan mantri pajak yang terdiri dari orang-orang bumiputera. Dengan kata lain bahwa Pemerintah Belanda dalam berhubungan dengan rakyat, selalu memperlakukan orang-orang bumiputera dan menunjukkan sikapnya yang berhati-hati dalam menghadapi masyarakat di daerah ini.

Di daerah Uluang sistem pemerintahan warga yang merupakan sistem pemerintahan formal tradisional masih tetap berlangsung bahkan diberi hak untuk hidup berdasarkan *Gemeente Ordonnantie Stbl. 1919 No. 814* sejak itu status warga merupakan daerah otonom yang mengatur masyarakat agraris tradisional di dalam ruang lingkup "*Inlandsche Gemeente*", yang diatur dalam *Inlandsche Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB) tahun 1938 No. 490.³⁴) Masing-masing warga yang membawahi beberapa buah dusun dikepalai oleh seorang pesirah dengan gelar depati atau ngabehi. Setiap dusun dikepalai oleh seorang kerio, sedangkan dusun di ibukota marga dikepalai oleh pembarap. Semua pejabat formal tradisional ini dipilih oleh penduduk yang mempunyai hak memilih untuk waktu yang tidak ditentukan. Para pesirah (depati/ngabehi) yang telah menjalankan tugasnya selama 15 tahun, biasanya diberhentikan dengan hormat oleh residen dengan diberi gelar "pangeran".

Pemilihan kepala marga dan kepala dusun harus diperkuat oleh residen berdasarkan *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 128, dan bagi mereka yang terpilih dengan memperoleh suara, terbanyak, kemudian ditetapkan dan diberhentikan oleh residen.³⁵) Sebagai pejabat terkemuka di dalam marga/dusun bertugas untuk mengawasi kepolisian, meningkatkan pertanian dan peternakan, mengelola kekayaan marga/dusun, menarik pajak dari penduduk setempat dan lain-lain. Dalam

34) Residen Ngs, H. Abdurrachman, "Pemerintah Negeri Dalam Propinsi Sumatera Selatan menurut Sejarah", dalam *Suluh Marga*, no. 4 tahun ke I, April 1950

35) D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 268

melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh seperangkat perabot marga/dusun terdiri dari penggawa, penghulu/khotib dan jurutulis. Kepala marga/dusun dengan segala pembantunya bukanlah pegawai negeri, mereka memperoleh penghasilan dari penduduk setempat dalam bentuk tenaga penduduk atau hasil lelang lebak-lebung/sungai dan dari berbagai macam pajak yang dikenakan pada penduduk.

Seberapa jauh yang telah berlaku mengenai cara pemilihan penguasa-penguasa formal tradisional di daerah ini oleh Pemerintah Kolonial Belanda telah diatur menurut *Staatsblad 1940 No. 70*,³⁶) sehingga calon-calon pesirah, pembarap dan kerio sudah dapat dipastikan menang dalam pemilihan tersebut, yaitu mereka yang berasal dari golongan keluarga pangeran yang setia pada Pemerintah Kolonial Belanda. Secara faktual sistem pemerintahan kolonial Belanda. Secara faktual sistem pemerintahan di daerah Uluan dalam bentuk "sistem marga" bukanlah pola baru, melainkan suatu pola lama yang telah berlaku sjauh sebelum zaman kesultanan, dan oleh Pemerintah Belanda tradisi itu diteruskan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.

Kota Palembang yang merupakan tempat kedudukan seorang residen, tidak terdapat sistem marga yang berlaku di daerah Uluan. Sebagai kepala pemerintahan kota dipimpin oleh seorang *Hoofd van Plaatslijk Bestuur* (UPB) yang dibantu oleh beberapa orang demang atau asisten demang. Seluruh wilayah kota dibagi atas dua distrik, dan masing-masing distrik memiliki beberapa kamp. Tiap-tiap kamp dikepalai oleh seorang "*Kamp Master*" dan dari nama itu menjelma menjadi sebutan kampung menurut nama anak-sungai setempat seperti: Kampung Serengam, Kampung Sungai Tawar, Kampung Sungai Kedukan dan sebagainya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku pada waktu itu (pasal 71 RR), bahwa Pemerintah Hindia Belanda harus diselenggarakan se-

36) Toean Mochtar Prabumangkunegara, *Verzameling Groepsgemeenschap's Ordonnanties*, Percetakan Meroe, Palembang, 1941 halaman 116 - 136.

cara sentralistis. Sebagai aparat pemerintah harus bertugas melaksanakan perintah dari atasan, yaitu arus pemerintah hanya satu arah dari atas ke bawah. Tidak dibenarkan adanya lembaga-lembaga yang mengurus kepentingan sendiri, kecuali yang ada di daerah-daerah Uluu. Dengan kata lain pemerintah Hindia Belanda pada mulanya berlaku *Regeringsreglement* (RR), yang bersifat ekstrim sentralistis, walaupun di negeri Belanda sendiri berlaku sistem desentralisasi.

Dengan diberlakukannya sistem sentralisasi, berarti tidak adanya partisipasi perangkat lokal dalam menyelenggarakan pemerintah setempat. Segala sesuatunya berasal dan diatur dari pusat. Cara yang seperti itu adalah sistem yang terbaik, karena Belanda khawatir akan kehilangan wilayahnya justru sedang ada pada puncaknya sebagai sumber keuntungan. Tujuan pemerintah kolonial bukan untuk memajukan penduduk bumiputera, melainkan sebaliknya memeras tanah jajahan sehingga kering. Betapa tidak hebat semboyan Belanda pada waktu itu : "*Indie verloren ramspeod geboren*" (hilangnya Indonesia berarti lahirnya malapetaka). Setelah empat puluh delapan tahun kemudian diadakan perubahan dalam soal pengaturan tanah jajahan yang menuju ke arah sistem desentralisasi. Dalam kaitan ini mulailah dibentuk perangkat-lokal yang berdiri sendiri dan dibebani tugas mengurus rumah tangga serta wewenang mengatur keuangan sendiri. Berdasarkan *Ordonnantie* No. 126 tanggal 24 Februari 1906, Kota Palembang dijadikan *gemmente* dan baru pada tahun 1920 mendapatkan seorang *burgemeester*.³⁷⁾

Yang dimaksud engan sistem desentralisasi di sini adalah desentralisasi keuangan, yaitu bahwa sejumlah uang akan disisihkan dari kas Hindia Belanda untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan lokal. Sehubungan dengan pengertian itu perlu dibentuk perangkat pelaksanaannya dalam bentuk

37) Humas Pemerintah Derah Komadya Palembang, *Buku Penemuan Hari Jadi Kota Palembang*, Humas Komadya, Palembang 1973 halaman 109.

Dewan Lokal (*Locale Raad*), yang bersamaan waktu berlakunya desentralisasi keuangan. Bertitik tolak dari pengertian ini, maka dewan lokal tersebut bukan merupakan pemerintah daerah, lebih-lebih dalam pengertian sekarang ini. Pelaksanaan asas desentralisasi diatur dalam peraturan umum pemerintahan (*Algemeen maatregel van Bestuur*) tahun 1904 (S. 1905 No. 137) yang disebut *decentralisatiebesluit* dan S. 1905 No. 181 atau sering juga disebut Ordonansi Dewan Lokal (*Locale Raden – Ordonantie*)³⁸⁾

Struktur pemerintahan kota sampai pada masa pendudukan tentara Jepang, yaitu masing-masing kampung dikepalai oleh seorang sirih kampung yang statusnya sama dengan segala perangkatnya tidak mendapat gaji dari pemerintah, tetapi memperoleh hasil dari pungutan pajak penduduk sekitarnya.

Berbicara mengenai *stadsgemeente* yang berlaku pada waktu itu secara organisatoris terdiri dari: *Burgemeester* (walikota), *Stadsgemeenteraad* (dewan kota) dan *College van Burgemeester en Wethouders* (dewan harian). *Burgemeester* diangkat oleh gubernur jenderal untuk masa jabatan yang tidak ditentukan, harus laki-laki dan sekurang-kurangnya berumur 30 tahun. Ia merangkap sebagai ketua dan anggota *College van Burgemeester en Wethouders*. Walaupun kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah dan alat pemerintah pusat, ia tidak memiliki wewenang atas kepolisian karena sudah terdapat pada *Europees Binnenlands-bestuur* dan *Inlands Binnenlands-bestuur* yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. *Stadsgemeenteraad* merupakan badan legislatif kota, yang dipilih untuk waktu 4 tahun dan terdiri dari anggota-anggota bangsa Belanda, bumiputera dan orang-orang asing. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dewan ini dibantu oleh *College van Burgemeester en Wethouders* beranggotakan 2 sampai 4 orang.

38) Drs. Bayu Srianingrat, *Op cit*, halaman 15

Di zaman Pendudukan Militer Jepang, pada dasarnya tidak mengubah struktur organisasi pemerintahan pusat dan lokal Hindia Belanda. Secara garis besar Pemerintah Jepang di Indonesia terbagi dalam 3 wilayah pendudukan:

1. Pulau Jawa dan Madura dikuasai oleh *Riku Gun* ke 16 (Angkatan Darat) berpusat di Batavia.
2. Pulau Sumatera dikuasai oleh *Riku Gun* ke-25 (Angkatan Darat) yang berpusat di Bukit Tinggi.
3. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dikuasai oleh *Kai Gun* (Angkatan Laut) berpusat di Makassar.³⁹⁾

Pembagian wilayah kekuasaan ini disesuaikan dengan kepentingan strategis Angkatan Perang Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itu pembentukan struktur pemerintahan yang termudah, adalah melanjutkan pemerintahan yang telah ada.

Sebagaimana diketahui pada masa Hindia Belanda terdapat dua jalur pemerintahan di daerah-daerah, yaitu jalur pertama disebut *Nederlanse Binnenlands Bestuur* (NBB) dan jalur kedua adalah *Inlandse-Binnenlands Bestuur* (IBB). Dengan tidak adanya lagi perangkat NBB, maka IBB dapat diteruskan dengan baik karena seluruh pelaksanaannya adalah bangsa pribumi. Seperti apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa ada beberapa hal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksudkan yaitu dihapuskannya jalur dekonsentrasi Belanda (NBB) dan tidak diganti. Yang masih dilanjutkan adalah jalur IBB yang ditambah satu tingkat, yaitu tingkat syuu (keresidenan) yang hanya dijabat oleh orang Jepang saja. Dengan demikian hanyalah diakui satu jalur dekonsentrasi saja, yang terbagi atas dua tahap atas yaitu tahap syuu (tahap Jepang) dan tahap bawah adalah IBB (tahap pribumi). Dihiluskannya tingkat propinsi bukan saja karena tak dipakai jalur NBB, tetapi juga

39) Sartono Kartodirdjo et. al (jilid ke VI), *Op cit*, hal 5; bandingkan dengan Drs. Bayu Surianingrat, *Op cit* hal 69.

sebagai akibat logis dibaginya wilayah Indonesia dalam tiga wilayah kekuasaan. Oleh karena itu tingkat tertinggi pemerintahan di daerah adalah *syuu* (keresidenan) yang hanya dijabat oleh orang Jepang.

Berdasarkan arti kata dalam bahasa Jepang, gelar *Cokan* pada *syuu cokan* berarti "pembesar" yang menunjukkan lebih tinggi dan lebih terhormatnya orang Jepang sebagai saudara tua, jika dibandingkan dengan orang bumiputera. Orang bumiputera tidak digolongkan sebagai pembesar, melainkan cukup dengan sebutan *co* yang berarti "kepala" seperti *gun co*, *fuku gun co*, *son co*, *ku co*, *kumi co* dan sebagainya. Di dalam kota Palembang sendiri terdapat *syi* yang dapat disamakan dengan kotamadya yang langsung bertanggung jawab pada *syuu cokan*. Pada zaman pendudukan Jepang Propinsi Sumatera Selatan sekarang ini dibagi atas dua keresidenan/*syuu*, yaitu Palembang *syuu* dan Bangka-Belitung *syuu*.

Masing-masing *syuu* dikepalai oleh seorang *syuu cokan* yang membawahi *bun syuu*. Bun Syuu terbagi dalam beberapa *gun* (kewedanaan), sedangkan *gun* terdiri dari *fuku gun* dan *fuku gun* terbagi dalam beberapa *son* (marga) yang membawahi *ku* (dusun). *Bun Syuu* yang dapat disamakan dengan *afdeeling/onderafdeeling* dikepalai oleh *bunsyuu co*, *gun* yang dapat disamakan dengan pangkat demang disebut *gun co*, *fuku gun co*, *son* yang setaraf dengan marga dikepalai oleh *son co* (pesirah) dan *ku* (dusun) dikepalai oleh *ku co* yang dibantu oleh beberapa Penggawa yang disebut *kumi co*. Palembang sebagai tempat kedudukan *syuu co kan*, terdapat *syii* yang dikepalai oleh *syii co* (burgemmaster/walikota) dengan segala perangkatnya. Masing-masing kampung yang dikepalai oleh sirah kampung (*ku co*) dengan dibantu oleh kepala-kepala rukun tetangga (rt) disebut *kumi co*.

Satu hal yang baru diciptakan oleh Jepang di dalam kota, yaitu rukun tetangga atau *tonari kumi* yang merupakan suatu unit terbawah dalam struktur pemerintahan. Seperti

telah disebutkan di atas bahwa sistem *marga* tidak dikenal di dalam Kota Palembang, dan hanya dikenal adalah haminte (Gemeente). Status kampung di dalam kota tidak lagi disamakan dengan marga di daerah Uluan, tetapi kedudukannya sama dengan dusun-dusun di daerah pedalaman. Oleh karena itu jabatan surah kampung (*ku co*) sama dengan kerio dan kepala rukun tetangga sama pula dengan penggawa (*kumi co*) dalam sistem marga.

Berdasarkan sumber data yang dapat diinformasikan, Plaju dan Sungai Gerong sebagai pusat instalasi minyak di daerah ini tidak termasuk ruang lingkup kekuasaan *syuu co-kan* dan tidak pula dibawah pengawasan *syii co* Palembang. Khusus daerah ini dikuasai oleh suatu badan tersendiri yang dinamakan *asano butai*, yang secara administratif tunduk secara langsung pada penguasa *si syonanto* (Singapura). Lembaga pendidikan apa saja yang ada di dalam wilayah ini, tidak ada hubungan sama sekali dengan penguasa di dalam kota Palembang.

Pada zaman Hindia Belanda sistem *gemeente* hanyalah berlaku dalam wilayah kota Palembang saja. Tetapi setelah zaman Pendudukan Tentara Jepang wilayah Palembang — *syii* diperluas sedemikian rupa sehingga mencakup beberapa daerah sekitarnya seperti: Marga Pemulutan (28 km²), Marga Parit dan Tanjungraja *gun*, Marga Rambutan dan Kayuagung *Gun* (16 km²), Marga sungai Rengas dan Palembang *Gun* (26 km²), Marga Gasing dan Palembang *Gun* (13,5 km²). Selanjutnya dusun Maryana, dusun Sukarami dan Talang Betutu dijadikan kampung-kampung (*ku*) dalam wilayah kekuasaan Palembang *Syii*. Batas wilayah kekuasaan tersebut dituangkan dalam *Palembang Syuu Rei* No. 1 tertanggal 13 Maret 2604 (1944) dan mulai berlaku sejak 1 April 2604 (1944).⁴⁰) Daerah-daerah tersebut di atas secara langsung di-

40) Dokumen asli yang disalin oleh Ngs, Abdurachman, yang pada waktu itu menjabat Cyoseikatyo Daeri Palembang *Syii*.

awasi dan harus membayar pajak kepada *geemente* (Palembang Syii) dan tidak lagi kepada kepala marga setempat.

Ketika menginjak zaman Revolusi Fisik sistem Marga di daerah Ulu dan sistem *gemeente* dalam kota Palembang, tetap berjalan seperti biasa tanpa ada perubahan. Tetapi kemudian dalam rangka pembaharuan struktur organisasi pemerintahan di daerah ini berdasarkan hasil persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan setelah mendengar laporan dari Panitia Pembentukan Daerah Otonom, dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. Gb/3/29/10/22 yang menetapkan mulai berlakunya sistem kabupaten di daerah ini. Dengan demikian bekas wilayah Keresidenan Palembang dan Keresidenan Bangka-Belitung, secara administratif terbagi atas 6 daerah kabupaten yaitu : Kabupaten Palembang Selatan dengan ibukotanya di Baturaja; Kabupaten Palembang Ilir dengan ibukotanya Sekayu/Betung; Kabupaten Bangka ibukotanya Pangkal-Pinang; Kabupaten Belitung ibukotanya di Tanjung Pandan dan Kota Besar Palembang dengan ibukotanya Palembang.⁴¹⁾

Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, maka lenyaplah sudah kekuasaan dan sistem Keresidenan yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda, dan mulailah dikenal istilah "kabupaten" atau Daerah Tingkat II di daerah ini. Palembang sebagai kota besar dan tempat kedudukan gubernur, secara administratif terbagi dalam beberapa daerah Kewedanaan/Kecamatan seperti : Kewedanaan/Kecamatan Ilir-Barat, Kewedanaan/Kecamatan Ilir Timur dan Kewedanaan/Kecamatan Seberang Ulu yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang wedana/camat.⁴²⁾ Demikian pula mengenai sistem haminte dan marga dikukuhkan kembali sebagai suatu lembaga yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.

41) Kementerian Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Siliwangi, Palembang, 1954, halaman 83 -133.

42) Ibid.

Gb/53/1951, sehingga dapat diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Apa yang telah diuraikan di atas ini merupakan sistem pemerintahan di daerah ini sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan peristiwa pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia. Lembaga pemerintahan tersebut telah ikut serta dalam proses pelaksanaan administrasi negara, yang membedakannya dari lembaga-lembaga lain bahwa lembaga Pemerintahan itu merupakan suatu organisasi yang disusun berdasarkan pranata hukum, sehingga ia memiliki kewibawaan dan wewenang yang dilimpahkan oleh negara kepadanya. Seperti yang kita temukan dalam masyarakat pedusunan yang terga-bung dalam wilayah administratif kabupaten/kota besar, terdapat pertemuan antara unsur administratif pusat yang relatif baru dengan unsur administratif yang berdasarkan hukum adat (tradisional). Unsur administrasi pusat yang dimaksudkan itu berasal dari Departemen Dalam Negeri, yaitu melalui sebuah instansi yang disebut kantor kabupaten/kota besar dengan memiliki beberapa kantor dinas. Unsur administrasi ini dipimpin oleh Bupati/Walikota, yang dalam hubungan ini disebut "pemimpin formal".

Pemimpin formal pada tingkat kawedanaan/kecamatan adalah pegawai negeri yang diangkat dari atas sebagai pejabat administrasi.⁴³⁾ Mereka mendapat gaji sesuai dengan kepangkatannya atau menurut golongan dan ruang-gaji pegawai negeri. Pada unsur administrasi yang menganut sistem marga atau didalam Kota Palembang setingkat dengan sirah kampung, pengangkatannya berdasarkan pemilihan. Pejabat-pejabat tersebut memiliki perbedaan proses legitimasi, di mana pesirah beserta perabot dusun dan sirah kampung dengan rukun tetangganya, yang tidak memperoleh gaji dari pemerintah disebut "pemimpin formal tradisional".

43) Ordway Tead, *The Art of Leadership*, New York-Me Graw Hill Book Company-Inc, 1963 halaman 25.

4. Modernisasi dan dampak sosial

Menjelang pergantian abad ke - 19 ke abad 20, telah timbul kesadaran pada bangsa Belanda akan pentingnya arti Indonesia, terutama daerah-daerah seberang yang memiliki sumber bahan mentah dan mineral yang cukup potensial. Selain daripada itu adanya semacam perlombaan diantara Imperialisme Barat untuk mencari tanah jajahan di Afrika dan Asia, telah memaksa Pemerintah Kolonial Belanda untuk sistem pemerintahan yang sentralistis, nampaknya tidak lagi memberikan kepuasan kepada penduduk bumiputera yang sedang mengalami proses perkembangannya. Hal ini dapat dilihat pada penduduk asing (Arab, Cina, India dan lain-lain), maupun dari kalangan elit Indonesia yang mulai tampil ke depan, yaitu timbulnya suara-suara yang menuntut modernisasi dan sistem desentralisasi pemerintahan yang berlaku. Kritik dan kecaman yang berasal dari golongan agama dan nasionalis via media massa dan majalah pada waktu itu, terutama ditujukan kepada sistem politik kolonial yang berpangkal pada suatu pola, yaitu daerah jajahan diperuntukkan bagi negara-induk atau yang lazim disebut "*drainage politiek*", Kesadaran akan politik kolonial dengan segala macam akibat sosio-kultural, telah menimbulkan persoalan tentang fungsi tanah jajahan dalam hubungan kolonial, yaitu memperhatikan nasib rakyat yang hidupnya tertindas.

Di kalangan kaum liberal di negeri Belanda sendiri, telah timbul pula pengertian terhadap perkembangan di daerah-daerah jajahan munculnya Jerman-Amerika dan Jepang sebagai negara imperialis di kawasan Pasifik, untuk mengubah politik kolonial dari politik eksploitasi ke arah politik bertanggungjawab, supaya rakyat dapat diikutsertakan dalam pemerintahan. Gagasan ke arah itu barangkali tidak semua partai dalam *Staten Generaal* tetapi sebagian besar dari mereka itu, telah memberikan tekanan pada politik kolonial yang didasarkan kepada perbaikan nasib penduduk pribumi. Seperti kaum sosialis demokrat dalam programnya dengan tegas menekan-

kan tugas Pemerintah Hindia Belanda untuk mendidik rakyat ke arah pemerintahan sendiri, pembinaan moral, kesejahteraan penduduk dan perkembangan ekonominya perlu dimajukan. Demikian pula program kaum liberal berusaha memperjuangkan pelaksanaan desentralisasi, pembentukan dewan kolonial di mana juga duduk golongan swasta, mengembangkan budi-daya penduduk dan mempertinggi tingkat kesejahteraan. Sementara itu golongan agama menganjurkan supaya politik kolonial dibarengi dengan kewajiban moral, yang menjurus ke arah "kristianisasi" daerah jajahan, sebagai suatu panggilan suci bagi umat Kristen (*mission sacre*).

Kesadaran akan tugas kolonial dan diperkuat dengan beberapa masalah yang timbul pada dasawarsa terakhir abad ke-19 di daerah jajahan, maka mulailah Pemerintah Kolonial Belanda meninjau kembali politiknya terhadap daerah-daerah jajahan, setelah kaum liberal memperoleh kemenangan di negeri Belanda dalam tahun 1870. Sebagai tindak lanjut pemerintah Hindia Belanda, mulailah politik kolonial yang baru dengan sebutan "Politik Etika" atau "politik kesusilaan" atau sering juga disebut "Politik Balas Budi", yang didukung sepenuhnya oleh golongan liberal di Negeri Belanda. Mengenai politik tersebut secara konseptual pernah diuraikan oleh Mr. G. Th. Van Deventer dalam satu artikel yang termuat dalam majalah "De Gids" tahun 1899, dengan topik "Een Eerschuld" artinya hutang kehormatan. Ia menjelaskan dengan tuntas, bahwa negeri Belanda banyak sekali mengeruk keuntungan dari Indonesia, dan karenanya negeri-induk sudah sepatutnya membalas budi kepada Indonesia dengan mengembalikan sebagian saldo yang diterima dari hasil Tanaman Paksa. Sikap paternal dalam politik kolonial Belanda mulai nampak, setelah pidato ratu Belanda dalam tahun 1901, yang menyatakan bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Indonesia.

Dalam lapangan pemerintahan, Pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-undang 23 Juli 1903 (*Ind. Staatsblad 1903 No. 329*) yang dikenal dengan nama *Decentralisatiewet*. Dalam undang-undang itu akan memberikan kemungkinan untuk mewujudkan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Lokal, serta memberikan hak kepadanya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga lokal. Sebagai realisasi Undang-undang itu, maka sejak 1 April 1906 kota Palembang dijadikan *geemente* yang tercantum dalam *staatsblad* tahun 1906 No. 126.⁴⁴) Dengan demikian Kota Palembang sebagai ibukota keresidenan berstatus *Stadsgegemeente*, yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Lokal (*Locale Raad*) yang diberi otonomi yang sangat terbatas. Rasionalisasi dalam pelembaan yang akan mengatur administrasi pemerintahan, telah memberikan kesempatan kepada penduduk kota untuk ikut serta dalam pemerintahan menurut sistem Barat.

Sementara sistem pendidikan tradisional yang telah lama berlangsung di daerah ini kegiatan pengajian atau sistem Pesantren, Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 mulai mendirikan sekolah-sekolah desa yang sangat terbatas, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pegawai pemerintah/juru tulis dan tenaga buruh pada perkebunan-perkebunan asing. Sekolah-sekolah formal yang dimaksudkan itu adalah sekolah *government*, yang didirikan pada daerah-daerah yang setingkat dengan distrik atau di ibukota marga. Di dalam Kota Palembang pembukaan sekolah-sekolah tersebut sudah mulai tahun 1903,⁴⁵) yang dikenal dengan nama "Sekolah Angka Tiga" dengan rencana pelajarannya sangat sederhana dan lama pendidikannya 3 tahun. Tetapi beberapa tahun kemudian sekolah desa itu ditambah dua tahun lagi yang dikenal dengan nama *Vervolgschool* (Sekolah Sambungan).

44) Humas Komdaya Palembang, *Op cit* halaman 13.

45) Drs. Ma'moen Abdullah et, al, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Selatan*, Proyek IKKD 1978/1979, halaman 63

Berdirinya sekolah-sekolah desa (sekolah kelas dua) merupakan realisasi dari pasal 1 Surat Keputusan Raja tertanggal 28 September 1892 No. 44 (Lembaran Negara 1893 No. 125), yang membagi sekolah negeri bumiputera dalam dua katagori, yaitu Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua.⁴⁶) Sekolah kelas satu hanyalah diperuntukkan bagi anak-anak pegawai atau anak-anak agen kolonial sebagai penguasa di daerah ini dan anak-anak yang dilahirkan dari orang-orang Belanda Sekolah Kelas Satu yang lebih dikenal dengan nama *Europesche Laagere School* (ELS), hanyalah terdapat di ibukota Keresidenan saja. Mengingat jumlah murid yang berasal dari keturunan orang Eropah sangat sedikit, maka sekolah tersebut boleh dimasuki oleh anak-anak agen kolonial yang memiliki loyalitas besar terhadap Pemerintah Hindia Belanda atau anak-anak Indo-Belanda yang dipersamakan.

Bagi rakyat jelata yang tinggal di dalam kota ataukah di pedesaan di samping mereka tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki sekolah desa dalam jumlah yang relatif kurang dan kefanatikan masyarakat itu sendiri terhadap apa-apa yang berbau kafir, nampaknya mereka kurang tertarik untuk masuk sekolah-sekolah *government*. Mereka lebih baik mengikuti sekolah-sekolah yang dikelola oleh golongan agama, yang jauh sebelum adanya sekolah *government* telah ada di daerah ini. Pendidikan non-formal yang merupakan prototip dari sistem pesantren dan dalam proses perkembangan selanjutnya menjadi sistem madrasah, merupakan jawaban terhadap sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial atau Zending. Perluasan pendidikan formal bagi penduduk bumiputera di daerah ini sangat lamban dan terlambat, apabila dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di tempat-tempat lain, karena di samping faktor kefanatikan yang ada pada masyarakat agraris-tradisional juga faktor demografis (tipisnya penduduk) di daerah yang amat luas,

46) BP.3K, *Op cit* halaman 5 – 6.

sehingga dikhawatirkan sekolah yang akan dibuka oleh pemerintah akan kekurangan murid atau tidak akan dikunjungi oleh anak-anak setempat. Selain dari itu pemerintah kolonial sendiri, selalu mempertimbangkan masalah biaya dalam peningkatan/perbaikan pendidikan bumiputera di daerah jajahan, karena biaya yang tersedia sangat terbatas dan disesuaikan pula akan kebutuhan pemerintah dalam pengelolaan sistem kepegawaian.

Sejalan dengan *etische koers* yang menjadi dasar landasan kebijaksanaan pemerintah kolonial, maka Pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan atas dasar pemikiran sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputra, dan untuk itu diharapkan bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
2. Pengadaan sekolah bagi golongan bumiputra harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial.

Atas dasar pemikiran itu pulalah corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di daerah ini pada awal abad ke-20 dapat ditempuh melalui dua jalur; di satu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas dan tenaga pendidik yang bermutu, dan di lain pihak terpenuhnya kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan. ⁴⁷⁾ Setelah beberapa tahun kemudian didirikan pula HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), yang lama pendidikannya 7 tahun dan berbahasa pengantar bahasa Belanda.

Walaupun sekolah tersebut dalam arti yang sebenarnya bukan sekolah ningrat, tetapi dalam kenyataannya yang berlaku di daerah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari golongan terkemuka dalam masyarakat agraris-tradisional,

47) BP. 3K, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979, Halaman 63 - 64.

sebagai batu loncatan untuk melanjutkan pelajaran di tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya sekolah-sekolah kelas dua cenderung ke arah tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam usaha untuk membenahi sekolah-sekolah kelas dua, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan semacam sekolah peralihan yang dikenal dengan nama *Schakel School*, untuk dapat memberikan kesempatan pada murid-murid terbaik dalam melanjutkan pelajarannya pada tingkat Sekolah Menengah (MULO = *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Maka dalam tahun 1921 dibukalah sekolah semacam itu yang pertama di Bandung dan Padang Panjang.⁴⁸) sedangkan di Keresidenan Palembang baru didirikan sekitar tahun 1930-an dan hanya didapatkan sebuah saja dalam kota Palembang.

Pembaharuan-pembaharuan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di daerah ini, baik yang berhubungan dengan sistem pemerintahan maupun yang menyangkut aspek sosial-budaya, nampaknya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Demikian drastisnya perubahan itu berlangsung, seakan-akan pranata dan sistem lembaga tradisional yang telah berlangsung selama ini belum banyak mempunyai arti. Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintah kolonial yang diberlakukan pada dua dasawarsa abad ke-20 di daerah ini, telah menimbulkan kelas baru golongan berpendidikan yang menunjukkan semangat baru, sebagai suatu kelas yang sedang mencari tempat dalam masyarakat. Persentuhan antara kelas menengah lama bumiputera, golongan terpelajar dan golongan pekerja/buruh di dalam kota menjadi tumpuan timbulnya gerakan nasional. Dengan kata lain timbulnya pergerakan Nasional adalah konsekwensi logis hasil budaya kota, yaitu ketika kelas-kelas baru memerlukan ideologi baru, yang mebenarkan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat agraris-tradisional dan kolonial.

48) BP.3K, *Op cit*, halaman 60 – 61

Timbulnya kelas baru golongan berpendidikan yang sebagian masuk dalam birokrasi pemerintahan kolonial, merupakan golongan tersendiri yang ikut serta melopori pergerakan nasional dalam bentuk protes sosial di daerah ini. Dengan kata lain timbulnya protes sosial berkaitan dengan adanya dominasi Barat dan intensifikasi pengaruh Barat, yang dengan cara perlahan-lahan akan merobah cara-cara lama dengan sistem pranata yang baru. Barangkali tidak dapat disangsikan lagi, bahwa dominasi Barat di daerah ini beserta perubahan sosial yang mengikutinya, telah mendorong terciptanya kondisi-kondisi yang penuh kecenderungan bagi masyarakat pedusunan/kota untuk mengadakan pergerakan sosial. Sementara masuknya ekonomi keuangan adanya perkebunan-perkebunan asing, maka faktor produksi dalam bentuk tanah, tenaga buruh dan hasil bumi diperdagangkan, dan sistem perpajakan cara Barat telah menyeret rakyat secara keseluruhan dan menambah beban bagi mereka. Dengan adanya perkembangan baru dalam sektor perdagangan dan industri pertanian, maka terciptalah diferensiasi struktural dalam masyarakat agraris tradisional, yaitu di satu pihak masih mengandalkan peranan tradisi dan di lain pihak timbulnya peranan sosial baru.

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai bidang politik yang mengalami perubahan mendasar, mengakibatkan timbulnya ketegangan dan ketidakstabilan kondisi, karena politik pasifikasi yang semakin meluas dari administrasi yang bersifat legal-rasional, mulai diintensifkan, sedangkan lembaga-lembaga politik-tradisional semakin terdesak. Proses birokratisasi menurut standar Barat, nampaknya dari tahun ke tahun telah menjadikan penguasa tradisional menjadi abdi briokratis yang ditempatkan sepenuhnya dibawah pengawasan kekuasaan kolonial. Dengan adanya dimensi Barat dalam lapangan politik, maka tidak dapat tidak ikatan struktur tradisional semakin longgar oleh faham baru dalam kehidupan sosial. Perubahan-perubahan itu telah menempatkan masyarakat

tradisional di luar kerangka sosial yang baru, sehingga mereka cenderung ke arah reorientasi masa lampau, yaitu dengan menghidupkan kembali nilai-nilai dengan pranata sosial lainnya, seperti yang pernah dikobarkan oleh Sultan Makhmud Badaruddin II pada masa dulu. Itulah sebabnya, karena tidak adanya wadah untuk menyalurkan rasa tidak puas, satu-satu jalan yang dapat dan mudah ditempuh oleh mereka dalam bentuk protes sosial yang diperkuat oleh perasaan keagamaan menjadi gerakan sosio-politik. Di mana-mana timbul semacam protes sosial yang digerakkan oleh pemuka-pemuka masyarakat (agama), yang berakar dalam tradisi rakyat melawan orang kafir.

Berbicara mengenai latar belakang gerakan sosial di daerah ini yang berakar dalam tradisi rakyat (fanatisme Islam), perlu diungkapkan kembali sampai sejauh mana peranan seorang ulama yang bernama yang bernama Abd. Al-Samad Al Palimbani di Kota Palembang.⁴⁹⁾ Kehadiran beliau pada akhir abad ke-18 di daerah ini, merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting bagi penguasa tradisional pada khususnya dan rakyat jelata pada umumnya. Betapa besar pengaruh ajarannya, sehingga masyarakat agraris tradisional dengan penduduk yang tinggal di dalam Kota Palembang, diikat oleh rasa persaudaraan yang erat dan sistem kesultanan yang kokoh berdasarkan aturan dan hukum yang bersumber pada ajaran Islam.⁵⁰⁾ Seperti yang telah diketahui bahwa peranan agama Islam di daerah ini cenderung ke arah fanatisme, terutama sekali setelah agama itu menjadi agama resmi dari Kesultanan Palembang pada zaman Sultan Abdurachman atau Sunan Cindeh Balang (1649–1694). Di antara pengajaran yang sangat menarik, yaitu diperkenalkannya ajaran Tassawuf oleh Abd. Al-Samad di kalangan penduduk.

49) Panitia Penyelenggara MTQ Pertamina se-Indonesia ke-II, *Masuk & Perkembangan agama Islam di Bumi Sriwijaya*, Humas Pertamina Unit II, Plaju, 1974, halaman 27.

50) Ano., "Aantekinisgen en Schetsen over Palembang" dalam *TNI II* (1844), halaman 198–206

Sebelum ia mengajarkan agama Islam di daerah ini, pernah berdomisili di Mekah memperdalam ajaran Islam sebagai anak didik Sheikh Muhammad ibn Abdulkarim As-Samani al-Madhani, dan kemudian menjadi murid dari seorang Ulama terkenal bernama Achmad ibn Al-Mun'im ad-Damhuri (1181 H). Sambil belajar ia mengarang buku yang berisi Ilmu at-Tauhid dengan judul *Suhrat Al-Murid fi Bayan Kalimat at-Tauhid*. Di samping itu ia menterjemahkan buku Imam Al-Ghazali dengan nama *Hidyat as-Salikin fi Suluk Maslah al-Muttaqin, Hidayat al-Hidayah* (1192 H) dan *Sijar as-Salikin ila 'Ibadah Rabb al-Abidin* (1203 H). Tokoh ulama ini pernah diungkapkan oleh G W J Drewes,⁵¹⁾ yang sebagian besar hidupnya berada di kota suci Mekah dan sempat pula beliau mengadakan hubungan korespondensi dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta, Mangkunegara dan Susuhunan Prabu Jaka di Surakarta. Bukan hal yang tidak mungkin beberapa karya tulisnya tersebar di kalangan penguasa tradisional di Jawa Tengah, bahkan sampai ke daerah Semenanjung Malaya dan Aceh.

Apabila kita perhatikan, ajaran agama yang diajarkan tersebut mengandung motivasi tertentu, yaitu suatu doktrin yang diilhami oleh kitab suci Al-Qur'an dan Hadith Nabi, bahwa kerjasama dengan orang-orang kafir hukumnya terlarang. Dengan kata lain bahwa pengakuan terhadap penguasa asing (Belanda) bagi penguasa tradisional muslim, dianggap sebagai hal yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan mutlak sifatnya. Dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan setiap waktu, dianjurkan kepada mereka untuk mengucapkan "ratip Samad" yang berulang-ulang dengan mempergunakan suatu lagu yang sangat menarik. Ratip Sa-

51) G.W.J. Drewes, "Further Data Concerning Abd. Al-Samad Al-Palimabani", dalam *BKI* jilid 123 No. 283, 1976, halaman 267-288; bandingkan dengan Muhammad Uthman el-Muhammady, "The Islamic Concept of Education according to Shaykh Abdul's Samad of Palembang and its Significance in relation to The issue of Personality integration" dalam *AKADEMIKA*, 1972.

mad ini mengandung pujian kepada Tuhan Yang Mahakuasa, dan hukumnya sunnah apabila dibaca berulang-ulang setelah sembahyang lima waktu.

Suatu anjuran lain yang cukup unik, perang untuk kepentingan agama dan melawan penjajahan terhadap orang kafir (Barat) dianggap sebagai perang jihad. Oleh karena itu melawan Pemerintah Kolonial Belanda, baik secara tidak langsung (memboikot) maupun langsung dengan mengobarkan protes sosial secara terbuka, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk menentang kafir. Dasar pemikiran yang bersumberkan pada ajaran Islam itu telah ditanamkan sedemikian rupa, baik di kalangan keluarga istana kesultanan maupun pendudukan sekitarnya, yang pada awal abad ke-19 telah dimanfaatkan oleh Sultan Makhmud Badaruddin II mengusir orang Barat (Inggris, Belanda dan Perancis) dalam wilayah Keresidenan Palembang.

Pada akhir abad ke-19 dan menjelang permulaan abad ke-20 ide yang melatarbelakangi perlawanan itu memperoleh tempat berpaut, setelah Serikat Islam melebarkan sayapnya di daerah ini. Oleh Serikat Islam cabang Keresidenan Palembang, nampaknya memberikan angin baik kepada golongan nasional, untuk menyalurkan rasa tidak puas yang sering diperkuat oleh perasaan keagamaan menjadi gerakan sosial-politik. Dengan demikian unjuk perasaan yang sering menempuh jalan kekerasan, yaitu dengan melancarkan pemberontakan aktif atau dengan menculik agen-agen kolonial setempat, dapat dibenarkan oleh tradisi rakyat berdasarkan ajaran Islam yang fanatik.

Pergerakan rakyat dalam bentuk protes sosial sifatnya arkhais, karena organisasinya, programnya, strategi dan taktiknya masih terlalu prematur, jika dibandingkan dengan pergerakan sosialisme modern. Oleh sebab itu kapan dan di mana saja timbul pemberontakan-pemberontakan, dengan mudah ditindas oleh kekuatan militer kolonial yang mempergunakan orang-orang Indonesia sendiri. Perlu juga dijelaskan sebab-

sebab lain gagalnya pergerakan itu, yaitu anggota-anggotanya sendiri tidak memiliki tujuan yang pasti tentang gambaran bagaimana tata masyarakat dan tata pemerintahan yang akan dibentuk, andaikata perjuangannya mencapai kemenangan. Orientasi tujuan yang kabur inilah yang telah melumpuhkan setiap aksi yang timbul, sehingga sukar untuk memperoleh kesempatan bergerak. Memang ada benarnya apa yang telah dikatakan oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo,⁵²⁾ bahwa lingkungan sosio-kultural pada masa itu loyalitas dan sentimen pokok tidak lain daripada sentimen religius, sehingga reaksi terhadap tantangan orang Barat pada hakekatnya bersifat religius.

Untuk menunjang analisa diskriptif yang telah diuraikan di atas, dalam uraian selanjutnya akan dikemukakan beberapa ragam protes sosial yang pernah terjadi setelah sistem Kesultanan Palembang dihapuskan. Dengan dihapuskannya sistem kesultanan, mulailah Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan perombakan total terhadap struktur pemerintahan di atas tingkat marga. Jabatan kepala daerah yang dulunya dipegang oleh kaum bangsawan yang berasal dari anak raja ditiadakan, sehingga konsep tradisional mengenai *sate* dan *kongship* yang selama berabad-abad dipegang oleh penduduk bumi-putera menjadi sirna. Perubahan secara drastis ini telah menimbulkan pergolakan sosial sedemikian rupa, sehingga terbunuhnya J L Sevenhoven oleh orang-orang yang tidak dikenal.⁵³⁾ Ia adalah kepala pemerintah kolonial di daerah ini sebagai *Regerings Commisaris*, yang untuk pertama kali meletakkan dasar politik ekonomi dan sistem perpajakan yang asing sama sekali bagi masyarakat di daerah ini. Peristiwa yang ironis ini menyebabkan pemerintah mengambil tindakan keras terhadap para bangsawan, yang dianggap sebagai

52) Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Suatu Alternatif*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982, hal 209.

53) J.L. Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Bhadrata, Jakarta, 1971, halaman 9.

biang keladi kerusuhan, sehingga banyak diantara mereka diasingkan ke luar daerah keresidenan. Peristiwa ini telah memaksa pemerintah kolonial untuk bertindak berhati-hati dalam menjalankan politik pasifikasi di daerah Uluu. Dan terpaksa untuk sementara waktu menunjuk dan mengangkat saah seorang diantara menantu Sultan Makhmud Badaruddin II (Pangeran Krama Jaya) sebagai pepatih (*rijkbesturder*) yang ditempatkan sepenuhnya di bawah awasan residen.⁵⁴⁾

Ketika Pangeran Krama Jaya memegang jabatan sebagai pepatih, penguasa-penguasa tradisional di daerah pedalaman semakin tidak puas terhadap pengaruh pemerintah kolonial di ibukota keresidenan, dan pengaruh tersebut mulai dirasakan oleh mereka yang tinggal di daerah Uluu. Keresahan yang dialami oleh mereka itu telah ditiup-tiup oleh pepatih sedemikian rupa, sehingga aturan-aturan yang datang dari ibukota praktis tidak dapat berjalan semestinya. Setelah pemerintah kolonial mengetahui hal tersebut, yaitu sebelum pemberontakan meletus Pangeran Krama Jaya ditangkap dan akhirnya diasingkan. Tidak terlalu mengherankan bahwa sampai pada akhir abad ke-19 Pemerintah Kolonial Belanda masih belum dapat berkuasa sepenuhnya atas daerah uluu. Walaupun protes sosial ini belum dapat dilaksanakan secara serentak, tetapi disana-sini telah terjadi pembangkangan untuk tidak mematuhi peraturan yang berlaku seperti : membayar bermacam-macam pajak, kerja rodi dan sebagainya. Barangkali protes-sosial semacam ini dapat ditempatkan dalam kerangka konflik situasi, dimana masyarakat pedusunan masih tetap mengakui peranan kultural dari elite tradisional sebagai suatu latar belakang sosial. Oleh sebab itu pemimpinnya masih ada hubungan dengan bekas sultan berkuasa, maka rasa tidak puas penduduk di pedalaman cenderung ke arah re orientasi dengan menghidupkan kembali nilai-nilai lama.

54) P De Roo de La Faille, *Op cit* halaman 52; bandingkan dengan D.G. Stibbe, *Op Cit* halaman 267

Seperti yang telah kita ketahui bahwa daerah *Onderafdeeling Rawas* dan sekitarnya, merupakan bekas basis-pertahanan sultan melawan Inggris/Belanda pada awal abad ke-19. Sebagai akibat intensifikasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda dalam rangka perwujudan Paks Nirlandika di daerah ini, maka pada awal abad ke-20 sangat dirasakan ikut campurnya pemerintah dalam urusan pemerintahan tradisional. Rasa benci terhadap Belanda yang sudah agak reda, mulai bangkit kembali setelah timbul perlawanan rakyat Jambi melawan pemerintah kolonial. Perang Jambi (1858 – 1907) yang dipimpin oleh Sultan Taha Syaifudin,⁵⁵⁾ barangkali pengaruhnya telah merembes ke daerah pedalaman Keresidenan Palembang. Dalam hal ini masyarakat Rawas yang sebagian besar hidup bertani/bercocok tanam di daerah yang terpencil menganut agama Islam ortodoks, mudah terpancing untuk membenci menganut agama Islam ortodoks, mudah terpancing untuk membenci orang kafir. Orang karena itu pada tahun 1906 timbullah protes-sosial yang dikoordinasi secara baik, karena masing-masing dusun bergerak sendiri-sendiri.⁵⁶⁾ Bagaimanakah akibatnya gerakan itu tidak diketahui dengan jelas, tetapi akhirnya dapat ditindas oleh kekuatan militer kolonial Belanda. Meskipun gerakan itu mengalami kegagalan, tetapi harus diingat partisipasi-partisipasinya adalah petani yang hidup dalam kemiskinan, dan sepanjang tahun mengharapkan juru selamat untuk menolong mereka dalam keadaan seperti itu. Revolusinisme agraris yang merupakan suatu kekuatan sosial yang laten, pada dasarnya terdapat di pedusunan yang secara temporer dapat melakukan agresivitas yang dahsyat.

Ketika Serikat Islam masuk ke kota Palembang dan kemudian berkembang ke seluruh wilayah keresidenan, maka

55) Jang A. Mutalib, "Suatu tinjauan mengenai beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada perempatan pertama abad ke-20", dalam *PRISMA* No. 8 tahun 1980, halaman 26 – 37.

56) D.G. Stibbe, *op cit*, halaman 267

pengaruhnya dianggap sebagai epidemi dikalangan masyarakat agraris-tradisional. Sampai sejauh mana pengaruh organisasi itu terhadap masyarakat di daerah ini, nampaknya ada perbedaan temperamen antara pengaruhnya di daerah pedalaman dengan di ibukota Palembang. Pengaruhnya di daerah Uluhan telah menciptakan kondisi anggota yang berjuang secara radikal, sedangkan di kota pelabuhan sungai lebih bersifat moderat, karena dititik beratkan perjuangan untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi penduduk bumiputra. Dapat difahami mengapa pengaruh SI di daerah pedalaman lebih agresif dan radikal, karena ajaran Islam yang pernah disebar-kan oleh Abd. Al-Samad Al-Palimbani betul-betul dihayati oleh penduduk. Ajaran Tassawuf yang banyak mengandung dan menjurus ke arah sistem Tarikat dalam mencapai tujuan akhir, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia. Harapan-harapan yang terkandung di dalamnya (ajaran Nessianistis) dan ditambah dengan eskhatologi revolusioner, membuat anggota-anggota SI di pedalaman mejadi sangat militan dan radikal sikapnya.

Sebagai akibat perubahan sosial dan politik sejak tahun 1900, telah menempatkan SI sebagai wadah kekuatan sosial dan sekaligus berperan sebagai alat memperkuat solidaritas grup dan mempertajam konflik grup. Oleh sebab itu ketika SI muncul di ibukota keresidenan dan berkembang ke daerah Komering Ilir pada tahun 1915, barulah SI menjadi organisasi radikal dan anti pemerintah kolonial. Segala aturan yang datang dari pemerintah kolonial yang memberatkan penduduk, dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan harus ditentan. Protes sosial yang diawali oleh rakyat di Marga Tulung Selapan, telah menimbulkan kerusuhan yang cenderung anti kepada Pemerintah Kolonial Belanda dengan segala agen-agennya. Kerusuhan itu dengan cepat menjalar ke dusun-dusun, sehingga semua mata-gawe tidak mau membayar pajak

57) Soeloeh Marga Oentoek Keresidenan Palembang, No. 18 tahun ke II, Margakassan, Palembang, 1932, halaman 269-270.

atau melakukan gawe-raja. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, seorang mata-gawe telah mengamuk dan berhasil menikam seorang asisten demang di sana sampai mati.⁵⁷⁾ Peristiwa yang mengerikan ini telah menimbulkan suasana takut, dan untuk mengakhiri kerusuhan tersebut pemerintah kolonial mengerahkan 40 orang serdadu ke daerah ini. Dengan dibantu oleh Pesirah Kayuagung yang bernama Haji Bakeri Gelar Pangeran Kesuma Yudha, akhirnya perlawanan rakyat tersebut dapat dipadamkan.

Sementara itu pula terjadi kerusuhan di daerah Rawas dalam tahun 1916,⁵⁸⁾ yang lazim dikenal dengan nama "Perang Kelambit". Yang dimaksud dengan "kelambit" adalah binatang kelelawar (*pteropus edulis*), yang mencari mangsanya di waktu malam hari. Sebagai pemimpin gerakan ini ialah Mohammad Amin, yang telah membagi anggota-anggotanya dalam kelompok-kelompok dipimpin oleh seorang hulubalang. Jumlah kelompok adalah 40 kelompok, sehingga nama lain dari Kelambit adalah "Hulubalang 40". Di samping latihan fisik yang diberikan kepada pengikut-pengikutnya juga diberikan "ilmu abang", yang mengandung ajaran sufi dari berbagai aliran dan ilmu kebal. Seperti juga ilmu-ilmu lain, ilmu yang diberikan itu tidak terlepas dari berbagai upacara yang menjurus kepada usaha, yaitu menambah kekuatan dalam dirinya sendiri yang dapat menyebabkan ia kebal. Dalam hubungan ini anggota-anggota diwajibkan belajar pencak silat sebagai latihan fisik yang dilakukan pada waktu malam. Setelah latihan fisik dianggap selesai, mereka diharuskan bersumpah setia kepada hulubalang untuk memerangi orang-orang kafir.

Sebagai basis kekuatan Kelambit pada waktu itu, telah mengambil lokasi di Dusun Bingin Teluk yang terpencil dari tempat-tempat lain dan sulit dicapai dari luar. Sebagaimana besar anggotanya terdiri dari petani-petani dalam jumlah yang

58) Dinas Sosial Tk. I. Sumsel, *Perintis Kemerdekaan Indonesia, Riwayat Perjuangan Perintis Kemerdekaan Sumatera Selatan* Palembang, 1978, halaman 6.

tidak sedikit, karena gerakan itu dipimpin oleh seorang penguasa tradisional bernama Depati Abdulhamid bin Senipal. Ia tidak hanya sebagai pemuka masyarakat di daerahnya, tapi juga merangkap sebagai presiden lokal Serikat Islam di daerah Sorolangun Rawas. Sebelum gerakan itu dimulai, Abdulhamid bin Senipal telah mengirimkan utusan ke Jambi (Haji Lasyim dan Haji Zakariah) untuk mendapat bantuan lasykar, bila penyerbuan ke benteng Belanda dilakukan. Rupa-rupanya rencana ini telah tercium oleh penguasa kolonial setempat melalui agen-agennya yang setia, sehingga salah seorang kurir tertangkap ketika pulang kembali dari Jambi. Haji Lasyim dipenjarakan di benteng Sorolangun dan tertembak mati, ketika akan melarikan diri dari penjara. Kematian-nya itu telah membuat suasana semakin panas, sehingga rencana untuk menyerbu benteng Belanda di Sorolangun dianggap sebagai tujuan utama.

Mula-mula mereka berkumpul di Muara Rupit untuk mendengarkan hasil utusan yang telah datang dari Jambi (Haji Zakariah), dimana Jambi akan bersedia untuk memberikan bantuan kepada Kelambit. Pada tanggal 30 Oktober 1916 semua anggota Kelambit mulai bergerak menuju benteng Belanda. Ketika mereka sampai disana, benteng dikepung dari segala jurusan dan tindak kekerasan mulai berkecamuk. Mereka berhasil memasuki benteng yang dipersenjatai itu dan dapat membunuh beberapa orang serdadu yang menjaga pintu-masuk. Mengingat kekuatan yang dimiliki serdadu Belanda, yang sebagian besar terdiri dari penduduk pribumi (marsose) tidak seimbang dengan persenjataan yang dimiliki oleh anggota Kelambit, maka akhirnya perlawanan itu dapat ditindas. Diperkirakan sebanyak 120 orang yang mati dan beratus-ratus orang yang ditawan oleh Belanda, sedangkan Abdulhamid bin Senipal dengan kawan-kawannya dapat ditangkap dan dibawa ke Sorolangun dengan kapal Seng Hong Bie. Akhirnya mereka dipindahkan ke Penjara Palembang (depan Kantor Pos) dan divonis hukum gantung.

Sebelum Abdulhamid dan Mohammad Amin menjalankan hukum tembak, si terhukum diberi kesempatan untuk meninggalkan pesan-pesan kepada keluarganya. Kesempatan yang terakhir ini dipergunakan oleh Depati Abdulhamid untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anaknya Abdulharun sebagai berikut : semua pekerjaan harus dilakukan dengan jujur, teruskan mengaji Al Qur'an, tanamlah pohon karet sebanyak-banyaknya dan perjuangan kami. Hukum tembak dilakukan dimuka umum pada hari Sabtu tanggal 21 April 1917 pagi hari, pukul 07.00. Jenasahnya diserahkan kepada keluarganya dan dikuburkan di Pemakaman Tanah Miskin (Pekuburan Kamboja sekarang) Palembang.

Organisasi Kelambit (Hulubalang 40) yang lazim disebut "Serikat Abang", bukanlah suatu organisasi yang mendapat pengaruh dari Serikat Islam Merah (PKI), tetapi suatu gerakan yang diilhami oleh semangat Turki Muda. Hampir semua anggotanya memakai benda *fetisy* dalam bentuk Al Qur'an Setambul, sebagai alat untuk menumbuhkan kekebalan pada setiap individu yang memakainya. Di samping itu kain merah yang dililit pada dahinya, merupakan identitas mereka sebagai anggota Kelambit. Memang pada waktu itu pengaruh kebudayaan Turki di wilayah Keresidenan Palembang sangat menonjol, terutama sekali dalam mempergunakan kopiah dalam berbagai bentuk berwarna merah dan berjambul tengahnya, yang lazim disebut "Kopiah Stambul".

Protes sosial yang menamakan dirinya Kelambit, nampaknya telah merembes ke daerah Onderafdeling Komering Ulu, yaitu di Dusun Kota Negara yang didalangi oleh Serikat Islam. Beberapa orang yang ikut aktif dalam gerakan itu antara lain : Haji Abdulhamid Ronik, Singo Putero, Naga Beriang dan lain-lain.⁵⁹⁾ Perlawanan ini pun dapat ditindas oleh kekuatan militer kolonial dan penggeraknya dapat ditangkap. Sementara itu timbul lagi gerakan sosial di daerah *Onder-*

59) Ibid.

afdeeling Ogan Ilir, yaitu di Dusun Karta Mulya pada awal bulan Pebruari 1918.⁶⁰) Keresahan rakyat di daerah ini telah distimulir oleh seorang guru agama bernama Abdul Gaffar, yang pernah berperan sebagai guru memberikan ilmu abang kepada penduduk di daerah Rawas. Dari daerah Rawas ia berdomisili di Tanjung Balai, dan dalam kegiatan sehari-harinya sebagai guru agama dengan mengajarkan ilmu kebal dan menganjurkan kepada murid-muridnya untuk melakukan perang jihad. Kedua gerakan sosial inipun mengalami nasib yang sama, yaitu dapat ditindas oleh kekuatan militer kolonial sebelum menjalar ke tempat-tempat lain.

Meskipun perlawanan-perlawanan yang dilancarkan oleh masyarakat secara sporadis yang memakan waktu lebih dari setengah abad lamanya dan yang akhirnya dapat dilumpuhkan oleh pemerintah kolonial, nampaknya telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam di kalangan masyarakat di daerah ini secara keseluruhan, terutama rakyat yang tinggal di daerah Uluan dalam bentuk semangat anti kafir yang tinggal di daerah Uluan dalam bentuk semangat anti kafir yang tebal. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila semangat anti kolonialisme yang diselubungi oleh perasaan keagamaan, telah menjiwai semua lasykar yang muncul pada awal Revolusi Fisik seperti : Lasykar Hizbullah, Lasykar Mujahiddin, Lasykar Sabilillah dan sebagainya.

Jika diperhatikan semua aksi protes-sosial dalam bentuk perlawanan rakyat di daerah ini hingga tahun 1918, nampak gejala messianisme yang lebih dominan daripada gerakan yang cenderung untuk mengembalikan sistem tradisi masa lampau. Tetapi oleh karena gerakan messianistis yang tidak disertai oleh organisasi yang efisien, maka keberhasilannya sangat tergantung kepada kepribadian pemimpinnya. Besar kecilnya kharisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat diukur banyak sedikitnya pengikut dan tinggi rendah derajat loya-

60) D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 267

litas mereka yang mendukungnya. Itulah sebabnya apabila pemimpinnya ditangkap/tertawan oleh musuh, maka aksi-protes sosial itu akan hilang.

Setelah selesai Perang Dunia I, yaitu pada masa pemerintahan Van Limburg Stirum (1916–1921), hubungan antara pemuka masyarakat dengan Pemerintah Belanda cukup baik. Hal ini disebabkan sikap Van Limburg Stirum yang agak progresif yaitu memberikan kelonggaran kepada organisasi sosial-politik untuk hidup. Bagi pemuka masyarakat di wilayah Keresidenan Palembang yang selama ini telah merintis kearah usaha membangkitkan dan menghidupkan kembali semangat perjuangan menentang penjajahan, tentunya kesempatan yang baik ini tidak diabaikan begitu saja. Tidak hanya organisasi yang berbau agama, tetapi juga organisasi sosial-politik yang bersifat sosialis dan nasionalis mulai muncul di dalam kota Palembang dan daerah sekitarnya.

Mengingat pengalaman masa lampau yang pernah dialami oleh Serikat Islam dan Perang Kelambit (Serikat Abang) cukup banyak meminta korban, maka pada tahun-tahun berikutnya belumlah mungkin untuk mengadakan perlawanan secara fisik. Menyadari hal ini para pemuka masyarakat berusaha untuk mematangkan anggotanya, dengan mengisi semangat rakyat agar tujuan untuk merdeka jangan sampai kendor. Berbagai organisasi dan lembaga pendidikan timbul di daerah ini, dalam kerangka mempersiapkan diri guna menyambut kehadiran sebagai bangsa yang menginginkan kemerdekaan, Lembaga pendidikan Muhammadiyah, Taman Siswa, madrasah-madrasah yang dikelola oleh perorangan atau dalam bentuk yayasan memberikan peluang cukup banyak bagi perkembangan rasa kebangsaan. Di lain pihak pemerintah Kolonial Belanda tidak tinggal diam dalam menghadapi berbagai organisasi sosial-politik dan lembaga pendidikan Swasta, bahkan siapa saja yang dianggap memusuhi pemerintah, akan berhadapan dengan pemerintah kolonial setempat, yang sewaktu-waktu dapat ditangkap dan dipenjarakan. Hal ini membuk-

tikan betapa efektifnya pemerintah *Police State* Belanda di daerah ini, karena sebelum timbul protes sosial sudah diketahui lebih dulu pemerintah melalui mata-matanya.

5. Stratifikasi Sosial Dalam Kota Palembang;

Sebelum kita sampai kepada permasalahan pelapisan masyarakat di dalam kota, barangkali perlu diungkapkan lebih dulu keadaan Kota Palembang dari segi fisiknya, karena hal itu ada kaitannya sebagai suatu latar belakang sosial. Palembang yang terletak pada kedua sisi Sungai Musi dan 2 meter di atas permukaan laut. Dalam tahun 1915 diperkirakan jarak kota-bandar ini dengan pantai/laut ada 83 km. ⁶¹⁾ Kota tersebut tidak banyak berbeda dengan kota-kota pantai yang terletak di pantai utara Pulau Jawa pada masa lampau. Apabila projeksikan dengan kota-kota yang pernah diteliti oleh F A Sutjipto Tjiptoatmodjo. ⁶²⁾ maka Kota Palembang dalam beberapa hal memiliki dwimuka, yaitu di satu pihak menunjukkan ciri-ciri kota pantai dan di lain pihak menampakkan wajahnya sebagai kota pelabuhan.

Bahan-bahan sejarah mengenai kota ini tidak banyak kita ketahui, bahkan pada zaman kolonial Belanda lukisan mengenai Kota Palembang sangat singkat dan tidak lengkap. Oleh sebab itu penulis terpaksa mempergunakan "ilmu tafsir" yang akan memaksakan pendapat sendiri berdasarkan keadaan yang pernah dilihat oleh penulis pada zaman pendudukan tentara Jepang. Memang tidak mengherankan apabila kurangnya bahan-bahan sejarah kota di Indonesia, karena nampaknya belum banyak mendapat perhatian di kalangan sejarawan akademis. ⁶³⁾

61)Op cit halaman 270

62) F.A. Sutjipto Tjiptoatmodjo, *Kota-kota pantai disekitar Selat Madura* (abad XVII sampai medio abad XIX), Univ. Gajah Mada, Yogyakarta, 1983 (Desertasi), halaman 229-236.

63) Dr. Kuntowijoyo, *Kota sebagai bidang kajian sejarah* (M klah yang diajukan pada seeminar sejarah Lokal), Denpasar 1982.

Palembang sebagai kota-pantai yang relatif mudah dicapai dari luar terutama dari laut/pantai, karena sejak dulu ia banyak memiliki hubungan dagang dengan bangsa asing atau suku-suku bangsa lainnya. Pada lokasi tertentu diaiami oleh kelompok-kelompok etnis, sehingga penduduk kota lebih bersifat heterogen. Sifat keterbukaan yang dimilikinya nampaknya telah membawa perkembangan sosiokultural yang cukup dinamis. Berdasarkan sisa peninggalan masa lampau, kota ini dapat dikategorikan sebagai kota-pedalaman pada umumnya, karena tidak memiliki tembok keliling yang mengelilingi kota, dan yang ada hanyalah tembok keliling istana dengan sebuah bangunan mesjid di dekatnya. Barangkali kota seperti ini lebih mendekati "kota pelabuhan sungai"⁶⁴⁾ Jika dibandingkan dengan kota-kota pantai lainnya. Jalur sungai yang dimilikinya pada waktu itu, tidak hanya terbatas dari kota ke pantai tetapi juga dari kota sampai ke daerah Uluu.

Dengan gambaran kota seperti di atas ini, maka di kota-kota pantai di Indonesia pada umumnya, baik kekuasaan politik maupun ekonomi dipegang oleh kaum aristokrat yang mendominasi perdagangan sebagai pemberi modal atau kadang-kadang juga sebagai peserta.⁶⁵⁾ Palembang sebagai bekas ibukota kesultanan yang dibangun oleh sekelompok aristokrasi yang berasal dari Demak, pernah berkembang menjadi sebuah kerajaan yang cukup besar. Hal ini memungkinkan terjadi karena mempunyai angkatan laut yang mutlak diperlukan, untuk mengawasi pelayaran-perdagangan di wilayah kekuasaannya. Kerajaan seperti ini, tidak memiliki basis agraris, dimana pengawasan terhadap pelayaran dan perdagangan merupakan sendi-sendi kekuasaan, yang memungkinkan kerajaan ini memperoleh penghasilan yang cukup besar. Perda-

64) Brian Harrison, *South-East Asia-A Short History*, Macmillan & Co New York, 1957, halaman 22.

65) J.C. van Leur, *Indonesia Trade and Society*, W van Hoeve the Hague, Bandung, 1955, halaman 66

gangan yang menjadi basis kekuasaan politik dan hubungan yang tetap dengan orang-orang asing, telah meninggalkan pula jejak-jejaknya pada struktur sosial masyarakat di daerah ini. Oleh karena itu penduduk yang mendiami kota sebagai bekas pusat konsentrasi pemerintah kesultanan, menunjukkan adanya struktur yang bersifat vertikal dan horizontal, dimana komunitas politik sebagai titik-sentral terciptanya penggolongan-penggolongan masyarakat berdasarkan status.

Seperti lazimnya masyarakat tradisional di negeri kita ini, masyarakat di daerah ini terdiri dari kelompok-kelompok; kelompok masyarakat menurut suku, menurut kepercayaan, menurut pekerjaan, dan menurut struktur sosial-politik. Dalam hubungan ini dapat dibedakan antara masyarakat yang tinggal di pusat kerajaan dengan masyarakat yang tinggal di daerah Uluang yang belum begitu banyak mendapat pengaruh dari luar. Palembang sebagai bekas kerajaan tradisional, masyarakatnya lebih banyak seluk beluknya daripada masyarakat modern sekarang ini. Oleh sebab itu baik masyarakat pedusunan maupun di pusat kerajaan, dapat dibagi atas dua golongan besar yaitu : golongan penguasa dan golongan yang diperintah. Struktur teritorial kesultanan bertalian dengan kepercayaan yang bersifat kosmopolitan, yang merupakan prototip daripada sifat kedaerahan yang pernah dikuasai oleh sultan Palembang . Ibukota sebagai tempat kediaman sultan terletak jauh dari daerah sekitarnya seperti: daerah Musi, daerah Pasemah, daerah Komering dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut dipimpin oleh anggota keluarga raja atau orang-orang tertentu yang disayangi oleh raja.⁶⁶⁾

Penduduk ibukota sebagai pusat konsentrasi pemerintahan kesultanan berjumlah ± 53.788 jiwa yang terdiri dari 242 orang Eropah, 46.870 penduduk bumiputra, 4.726 orang Cina, 1.825 orang Arab dan 126 orang keturunan

66) J.L. Sevenhoven, *Op Cit*, halaman 25 – 26

India/Keling.⁶⁷⁾ Berdasarkan jumlahnya penduduk tersebut dapatlah dibagi dalam tiga golongan besar : golongan priyayi dan pangeran yang berasal dari keluarga sultan, golongan pedagang yang terdiri dari orang-orang Palembang, orang Arab, orang Cina dan India, dan rakyat biasa.

Adapun golongan priyayi ini berasal dari keturunan sultan atau dapat juga menjadi priyayi melalui kehendak pribadi sultan karena jasa-jasanya kepada kraton. Priyayi seperti ini biasanya memperoleh tanah sebagai sumber penghasilannya, sedangkan priyayi lainnya tidak kebagian tanah dan memperoleh penghasilan dari mengerjakan barang kerajinan, pengukir emas-perak, bedagang dan bercocok tanam. Sesuatu yang menjadi ciri khusus bagi golongan priyayi di daerah ini yang berperan sebagai penguasa tradisional di daerah pedalaman (kepala marga atau dusun), mempergunakan kekuasaannya untuk mengambil dan mengatur produksi dari marga/dusun yang dikuasainya. Hasil produksi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hasil-hasil saja, tetapi juga menyangkut konsumsi kraton seperti : kayu-bakar, kayu balok untuk perahu, bahan makanan dan lasykar-lasykar yang memiliki perlengkapan perang. Dalam hal ini nampak bentuk terlihat betapa penting peranan dan fungsi mereka sebagai pembantu sultan dalam keadaan yang sangat diperlukan. Dengan kata lain mereka merupakan agen-agen sultan di daerah.

Mengenai golongan priyayi yang berdasarkan status (priyayi berarti turunan raja-raja atau kaum ningrat) terdiri dari pangeran, raden dan mas agus,⁶⁸⁾ sedangkan golongan rakyat terdiri dari kiai mas, kiai agus dan rakyat jelata yang terdiri dari orang-orang Miji dan orang-orang Senan. Di-

67) Rijn van Alkemade, "De Hoofdplaats Palembang", dalam *TNAG*, VII (1833), halaman 55; Anon, "Schetsen van Palembang", dalam *TNI II*, (1846), halaman 281-282.

68) J.L. Sevenhoven, *Op cit* halaman 25

samping itu terdapat golongan budak, yaitu orang yang menggadaikan dirinya karena hutang atau budak-belian. Kelas sosial yang kita kenal di dalam masyarakat Palembang asli, dapat disamakan dengan kelas sosial yang secara tradisional di kenal di Surakarta yaitu: santana dalem, abdi dalem dan kawula dalem (rakyat biasa).⁶⁹⁾ Karena golongan itu berdasarkan status dan pokok pangkal posisi fungsional pada struktur sosial yang ada, maka posisi fungsional memiliki berbagai fungsi seperti : fungsi politik, fungsi militer, fungsi agama dan ekonomi. Dalam membicarakan sistem status pada masyarakat Palembang, secara mutlak tidak dapat diterapkan beberapa definisi yang berhubungan dengan pengertian status yang ada. Difrensiasi dan stratifikasi sosial yang ada di daerah ini, agaknya lebih sederhana daripada stratifikasi yang terdapat dalam masyarakat industri. Peranan sosial dan status yang tergambar dalam masyarakat di daerah ini adalah suatu fenomena kultural.

Mengenai posisi fungsional agama dalam lapangan pemerintahan pada zaman kesultanan, nampaknya lebih menonjol daripada golongan yang lain berdasarkan status. Ia menduduki tempat khusus dalam sistem pemerintahan tradisional, sehingga wewenang penguasa selalu dikaitkan dengan unsur agama (Islam) atau sekurang-kurangnya tokoh agama sebagai tangan kanan penguasa.⁷⁰⁾ Penomena budaya ini nampak jelas, setelah agama Islam diakui sebagai agama resmi dalam sistem Kesultanan Palembang. Pada golongan ulama (golongan agama Islam) kedudukannya sama dengan golongan pangeran, bahkan dalam trilogi pemerintahan kesultanan terdapat unsur pemerintahan, agama dan pengadilan raja (*Koning-srecht*). Sebagai kepala agama ia diberi pangkat "nata aga-

69) Soeyatno, "Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945-1950", dalam *PRISMA*, No. 7 tahun ke-VII, 1978, LP3ES, Jakarta, halaman 49.

70) J.L. Sevenhoven, *Op cit*, halaman 28; bandingkan dengan Tim penulis, *Sejarah perlawanan terhadap Kolonialisme dan Impersialisme di Sumatera Selatan*, Proyek IDSN 1982/1983, halaman 39) 40.

ma” atau penghulu, yang memiliki pengadilan khusus dengan dibantu oleh para khatib atau ulama-ulama tingkat rendah dalam menjalankan tugas pemerintah. Segala perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kematian, tempat ibadah, kelahiran dan kejahatan penduduk terhadap agama, ditangani oleh lembaga ini berdasarkan hukum Islam.

Penggolongan dalam masyarakat Palembang asli secara lahiriah mirip dengan sistem kasta yang berlaku dalam masyarakat Hindu Jona yaitu: pangeran, raden, mas agung, kiai mas dan cili.⁷¹⁾ Kelompok yang termasuk golongan cili dapat dipersamakan dengan *out cast*, yang kedudukannya sangat rendah dari rakyat biasa. Tugas mereka menjadi pelayan istana, yang sewaktu-waktu dapat melayani ratu atau sultan dalam arti yang sebenarnya. Dengan kata lain lapisan yang bernasib sial ini ⁷²⁾ meliputi orang-orang Miji, orang-orang Senan, orang yang menggadaikan diri atau budak belian. Tetapi tidak semua orang-orang Miji atau Senan dapat digolongkan golongan cili, karena di antara mereka itu sendiri ada yang bebas dan kedudukannya sama dengan perlakuan terhadap orang-orang asing.

Ditinjau dari segi lain, masyarakat yang mendiami kota Palembang terbagi atas dua golongan : golongan priyayi dan golongan rakyat yang berasal dari berbagai jalur keturunan sebagai kelompok terbesar. Kata priyayi berarti saudara raja-raja atau kedudukan ini dapat juga diperoleh dengan jalur lain yaitu atas kehendak raja. Biasanya orang-orang diangkat dan ditunjuk sebagai golongan priyayi tersebut, disertai tugas untuk menjadi penguasa tradisional di pedalaman, yang merupakan golongan elite desa (pemuka marga/dusun). Pada golongan priyayi itu sendiri terdapat tiga macam gelar yang diperoleh secara adat, yaitu pangeran, raden dan mas agus. Semakin dekat jalur keturunan mereka dengan raja semakin

71) D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 271

72) J.L. Sevenhoven, *Op cit*, halaman 28

tinggi tingkatnya dalam adat keraton. Pangeran pada dasarnya berarti "memerintah", yaitu suatu gelar yang diberikan kepada putra raja yang akan menggantikan kedudukan raja setelah wafat. Tetapi kemudian gelar ini diberikan kepada penguasa-penguasa tradisional di daerah uluan, yang sudah tidak lagi memegang jabatan kepala marga. Di samping itu gelar tersebut, hanyalah dimiliki oleh putra-putra raja yang lahir dari permaisuri (ratu). Gelar lain yang disebut raden agalah gelar yang dimiliki oleh anak laki-laki yang berasal dari anak pangeran (orang tuanya), sedangkan gelar mas agus yang berarti bernilai banyak berasal dari perkawinan seorang pangeran atau raden dengan seorang perempuan dari golongan rakyat.

Mengganti gelar yang dimiliki oleh kaum wanita dari golongan priyayi, yaitu isteri sultan lazim disebut ratu. Anak anak perempuan dari para pangeran dan raden disebut raden ayu (cantik) dan anak-anak perempuan dari golongan mas agus disebut (si cantik yang bernilai). Mengingat golongan feodal ini hidup dalam masyarakat kota, yang sebagian besar berkecimpung dalam dunia dagang dan peranan uang turut menentukan harga diri seseorang, dimana kesenjangan tidak begitu tajam antar kelompok, maka gelar-gelar yang merupakan hiasan teoritis itu secara demokratis dipanggil dengan istilah "cek" yang berasal dari kata "encik" (panggilan terhadap laki-laki berdasarkan kedudukannya yang sedang.⁷³⁾

Masyarakat feodal yang mengenal strata sosial berdasarkan status yang dimilikinya itu, ditandai oleh kebudayaan yang berbeda satu sama lain, yaitu kebudayaan istana dan kebudayaan rakyat. Dua jenis kebudayaan ini dapat dibedakan menurut perumahan. Dalam penggunaan bahasa di antara golongan ningrat tersebut, biasanya dalam pertemuan-perte-

73) W.J.S. Purwadarmintp, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, halaman 274.

muan resmi mempergunakan bahasa tertentu semacam bahasa Jawa "kromo inggil." Begitu pula dalam segi etika dan sopan santun, mereka lebih ramah dan akrab terhadap tamu dan sesamanya, dan kadang-kadang menunjukkan kesombongan yang menyolok untuk menutupi segala macam kekurangannya dengan gaya bahasa yang menggelikan. Mungkin sekali tipe perumahan pada zaman dulu dapat dibedakan antara golongan ningrat dengan rakyat biasa, yaitu rumah-rumah limas dalam bentuk besar yang lokasinya di dekat jalan besar adalah milik golongan ningrat, sedangkan rumah-rumah biasa dalam bentuk yang sedang adalah milik rakyat. Tetapi akhir-akhir ini kriteria tersebut tidak lagi berlaku, karena dalam proses perkembangan masyarakat Palembang asli sudah terjadi mobilitas antar lapisan yaitu gejala pembauran dalam proses asimilasi.

Mobilitas antar lapisan dikalangan penduduk bumiputera yang terjadi di dalam kota akhir-akhir ini, menunjukkan tidak adanya rintangan antar golongan penguasa dengan golongan yang dikuasai, antara golongan berpendidikan dengan golongan agamis, antara orang-orang cili dengan orang pedusunan, kecuali proses pembauran itu masih dianggap tabu dikalangan penduduk dengan orang-orang Cina. Pembauran dengan Cina di daerah ini sangat langka, mungkin salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor religius yang berakar pada tradisi rakyat yang kompelks.⁷⁴⁾

Golongan yang termasuk kelompok dagang terdiri atas penduduk pribumi dan orang asing seperti : orang Arab, orang India dan orang Cina. Orang-orang asing yang dimaksudkan itu mendapat perlakuan yang sama dengan penduduk lainnya, bahkan ada di antara orang-orang Cina yang memeluk agama Islam diberi gelar demang dan orang-orang Arab di-

74) Pada umumnya orang Cina sanga kuat memegang tradisi nenek moyangnya dan percaya kepada simbol-simbol magis dalam kehidupan sehari-hari, super-rass yang dibanggakan oleh mereka dan anggapan merendahkan kedudukan wanita pada umumnya di mata laki-laki.

beri gelar "Pangeran" oleh sultan.⁷⁵) Itulah sebabnya pemberian gelar itu tidak hanya terbatas pada kerabat raja saja, tetapi dapat pula diberikan kepada siapa saja yang menurut pertimbangan penguasa berjasa kepada kraton, seperti kebiasaan yang berlaku dalam Kerajaan Mataram.⁷⁶)

Hal yang seperti ini dilakukan pula oleh Pemerintah Kolonial Belanda, apabila seorang penguasa tradisional berjasa kepada pemerintah, dan setelah habis masa jabatannya diberi gelar "pangeran". Biasanya orang-orang asing membentuk daerah perkampungan tersendiri, kecuali orang-orang Cina yang bertempat tinggal di rakit-rakit di tepi sungai. Memang sejak semula orang-orang Cina walaupun mereka sudah memeluk agama Islam, tidak banyak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mempertahankan negara di daerah ini, karena kepatuhannya sangat diragukan. Lain halnya orang-orang Arab atau India yang oleh sultan sering diberi tempat tertentu diantara pemukiman penduduk pribumi, bahkan tidak sedikit orang-orang Arab yang ikut aktif mempertahankan daerah ini di masa Sultan Makhmud Badaruddin II berkuasa.

Kedudukan materi dari orang Cina pada masa pemerintahan kolonial, kedudukannya agak lebih baik daripada orang asing lainnya, karena mereka dijadikan golongan perantara antara penguasa dengan penduduk dalam dunia perdagangan, terutama perdagangan kopi, lada dan karet. Di antara mereka banyak yang memiliki kapal-kapal pengangkut dan mesin pengasapan karet (*remiling*). Meskipun mereka ini termasuk kriteria terbaik dari segi sosial-ekonomi, ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan pada kelompok etnis ini bahwa barangkali jarang ditemui di daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu secara lahiriah tidak adanya gejala memusuhi penduduk pribumi yang menjurus kepada konflik rasial. Di samping adanya kelompok orang Cina yang kaya, namun orang-orang Ci-

75) J.L. Sevenhoven, *Op cit*, halaman 33 - 34.

76) Sartono Kartodirdjo, *Op cit*, halaman 160

na yang hidupnya melarat, tinggal di tempat-tempat lembab dan pengab secara kuantitas jauh lebih besar.

Golongan yang termasuk rakyat biasa, yang jumlahnya jauh lebih besar dari golongan elit (ningrat), diharuskan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu pada alingan raja atau bangsawan. Orang-orang Miji yang tinggal di dalam kota dipersamakan kedudukannya dengan rakyat di daerah Uluan (mata-gawe) yang tidak dikenakan pajak. Dispensasi yang dimiliki oleh mereka ini, karena mereka itu sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh penguasa (sultan) memikul tanggung jawab sebagai lasykar untuk berperang atau dapat dipekerjakan dalam hal-hal yang sangat diperlukan.⁷⁷⁾ Sejauh mana hubungan mereka dengan alingannya (raja/bangsawan), menunjukkan hubungan yang tidak terlalu terikat dalam arti mereka bebas memilih tuannya sebagai pelindung. Sebaliknya orang-orang Senan yang dianggap lebih rendah daripada orang Mji, secara riil golongan ini dimonopoli oleh raja tanpa dikenakan pajak. Tugas mereka mengabdikan kepada raja seperti membuat perahu/sampan, tukang dayung, memperbaiki istana dan lain-lain. Sedangkan orang-orang yang menggadaikan diri karena hutang piutang atau melanggar adat dan golongan budak belian yang sebagian besar termasuk golongan cili, secara kultural merupakan strata sosial yang paling rendah dalam kelompok rakyat biasa. Mereka dilarang berhubungan dengan golongan ningrat dan hubungannya terbatas pada orang/tuannya atau orang yang membelinya.

Setelah sistem kesultanan runtuh dan Belanda berkuasa di daerah ini, susunan masyarakat yang sudah ada di pedusunan dan di ibukota tidak mengalami perubahan yang mendasar. Bahkan pelapisan sosial yang ada di pupuk sedemikian rupa, terutama kelompok penguasa tradisional yang setia kepada pemerintah Hindia Belanda, dalam kerangka usaha untuk mengokohkan kekuasaannya di daerah ini. Mereka

77) J.L. Sevenhoven, *Op cit* halaman 27

merupakan golongan tertentu yang berfungsi sebagai agen kolonial dengan memiliki legitimitas berdasarkan dominasi legal penjajah. Karena akibat tindakannya yang sewenang-wenang, maka golongan ini semakin jauh dari rakyat, bahkan kadang-kadang mereka dibenci rakyat sebagai sumber timbulnya protes sosial.

Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan sementara, bahwa inti golongan pemegang status adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan birokrasi pemerintahan kolonial, termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan atau ada kaitannya dengan pemegang-pemegang status. Sebaliknya golongan yang termasuk rakyat biasa di luar kelas penguasa apakah orang Miji dan orang Senan yang termasuk golongan cili, pada dasarnya sama dengan rakyat di pedusunan. Masa sebelum Revolusi Fisik, perbedaan antara orang pedusunan dengan penduduk kota yang dekat dengan lingkungan feodal ditandai oleh dua golongan ini telah melahirkan dua sub kultur, di mana rakyat di pedusunan lebih dekat pada kebudayaan rakyat jelata dengan tradisi kecilnya, sedangkan penduduk kota lebih dekat dengan kebudayaan kota dengan tradisi besarnya. Oleh sebab itu perbedaan cara hidup mereka masing-masing, adalah tanda status yang ditonjolkan antara penduduk kota pada umumnya dengan orang pedusunan yang memiliki tata cara yang sangat sederhana.

Perkembangan pendidikan di daerah ini yang menuju ke arah demokratisasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran telah dimulai pada zaman pendudukan Jepang. Nampaknya peranan pendidikan formal dan non formal, sangat membantu dalam proses pendemokrasian masyarakat dalam arti pencampur bauran anak-anak dari berbagai status kelahiran. Apakah mereka berasal dari pedalaman ataukah penduduk kota dengan latar belakang yang berbeda-beda, berlomba-lomba memasuki sekolah pendidikan umum yang sama sampai ke tingkat perguruan tinggi/akademi, terutama sekali

pada masa awal Revolusi Fisik. Masyarakat Palembang yang mengenal berbagai strata-sosial dalam lingkungan feodal (walaupun akhir-akhir ini masih juga dipakai) barangkali sudah tidak lagi mempunyai arti seperti dulu. Pelapisan masyarakat yang berdasarkan status, nampaknya sedang mengalami transformasi, sebagai akibat perkembangan yang pesat di bidang pendidikan dan pengajaran. Sementara itu pula stratifikasi sosial yang baru dan condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistim birokrasi kepegawaian, atau atas dasar pendidikan sekolah belum lagi mendapat wujud yang mantap.

6. Kegiatan Ekonomi dan Pendidikan

Kota Palembang yang menjadi pokok bahasan dalam membicarakan kegiatan budaya, menurut sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia sekarang, termasuk ke dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan dengan ibukotanya Palembang. Pada permulaan abad ke - 19 luas wilayah kesultanan tercatat 85.918 KM² dan mempunyai penduduk kira-kira 1.096.555 jiwa,⁷⁸⁾ sehingga daerah ini didiami lebih kurang 1 jiwa setiap kilometer. Dalam tahun 1915 di dalam kota sendiri yang luasnya 137 km², jumlah penduduk diperkirakan 650.000 jiwa yang terdiri atas 800 orang Eropa, 7.000 orang Cina, 2.200 orang Arab, dan 200 orang Keling.⁷⁹⁾ Pada waktu itu Kota Palembang tidak hanya sebagai pusat kegiatan birokrasi pemerintahan kolonial, tetapi juga sebagai pusat perhubungan antara penduduk dengan pedagang-pedagang asing terutama dalam dunia perdagangan. Tak dapat dipungkiri mengenai penduduk asli Palembang apakah ia berasal dari golongan bangsawan ataukah orang-orang Miji/Senan, di antara pedagang-pedagang asing telah terlibat dalam hubungan dagang. Memang pada umumnya mereka lebih me-

78) Quanjer, C.A.J. *Land en Volk van Nederlandsch-Indie* (Den Haag; Zutphon, H.J. Thieme, 1933), halaman 199.

79) D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 270

nyenangi dunia dagang daripada bercocok tanam. Hal itu tak dapat dihindari, karena tata lingkungan kota itu sendiri kurang banyak memberikan kemungkinan untuk mengembangkan sektor tersebut. Daerah yang terdiri dari rawa-rawa dan aliran sungai-sungai kecil, menyebabkan mudah terendam oleh air apabila musim air pasang. Tata lingkungan seperti ini, telah menempatkan peranan perahu-perahu kecil dalam segala macam bentuknya menjadi alat transportasi yang dominan.

Rawa-rawa, lebak-lebung dan sungai-sungai kecil yang menjadi tempat bertelurnya ikan-ikan sungai di waktu air pasang, merupakan sumber perikanan yang cukup potensial bagi penduduk sekitarnya. Mereka banyak mengenai cara-cara menangkap ikan secara tradisional, sehingga dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alat-alat penangkap ikan yang dimaksudkan itu seperti : jala, sanggi, tangku, bubu, jempirani, pancing, tajur dan sebagainya. Pekerjaan menangkap ikan pada lebak-lebung atau sungai-sungai tertentu di daerah uluan, dikontrakkan oleh marga kepada penduduk yang dikenal dengan nama "ngepak sungai".

Berbicara mengenai berbagai macam bentuk perahu/sampan yang digunakan oleh penduduk atau pedagang-pedagang, dilihat dari segi isi pemuatannya adalah perahu kecil, perahu sedang dan perahu/jukung besar. Perahu yang berukuran kecil dan ramping (perahu Sumbawa),⁸⁰⁾ digunakan oleh penduduk kota untuk berhubungan satu sama lain atau berfungsi sebagai "warung terapung", yang hilir mudik dan masuk keluarnya kampung memasarkan barang dagangannya. Sampan yang merupakan warung terapung itu penuh dengan berbagai macam barang dagangan seperti : kain-kain, kain cita, sutera, kain katun, makanan-makanan rebus/goreng, buah-buahan, sayur mayur, umbi-umbian, ikan dan daging. Kegiatan mereka itu nampaknya memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Demikian pula pedagang-pedagang asing,

80) J.L. Sevenhoven, *Op cit*, halaman 17

terutama orang Cina dan Arab sangat giat dalam pelayaran-perdagangan sebagai pedagang perantara. Bahkan kota bandar ini termasuk kota pemukiman orang Arab terbesar di Hindia Belanda setelah kota Surabaya.

Mengingat pentingnya fungsi perahu/sampan di daerah ini sebagai alat transportasi, maka dalam proses perbuatannya yang dilakukan oleh orang-orang Miji/Senan atau rakyat pedusunan, merupakan kelompok tukang yang berdasarkan turun temurun. Tidak semua orang dapat membuat perahu-perahu dalam bentuk kecil dan besar. Secara tradisional bahan kayu yang digunakan untuk perahu itu adalah kayu besar dan tahan air yang didatangkan dari daerah pedalaman. Besar kecilnya perahu yang akan dibuat tergantung pada panjang dan besarnya balok kayu. Batang-batang kayu itu dilobangi membujur dengan kapak-beliung, dan kemudian lobangnya disalai di atas api supaya melebar kiri-kanannya dengan mempergunakan kayu-kayu palang, terutama pada bagian tengahnya yang merupakan perut perahu. Setelah itu di luar dan dalam perahu disugu supaya halus dan kadang-kadang diberi cat supaya tahan lama.

Apabila bentuk perahu itu cukup besar muatannya yang lazim disebut "jukung", maka pembuatannya lebih rumit lagi yaitu mempergunakan papan kayu yang kering dan dibentuk semacam perahu biasa dalam bentuk yang lebih besar perut perahunya. Di bawahnya tidak terdapat lunas seperti perahu biasa, tetapi terdiri dari papan yang dihubungkan secara senyawa dilekatkan pada tulang-tulang yang sudah dibentuk di dalam perut perahu. Tulang-tulang perahu itu dalam jumlah yang tidak sedikit, untuk melekatkan papan-papan sebagai dinding kiri kanan dan luas perahu.

Pembuatan perahu/sampan dan jukung-jukung di daerah ini, pada akhir-akhir ini kurang berkembang, karena mendapat saingan dari daerah lain (Jambi) dan kegunaannya sendiri telah digantikan oleh jukung-jukung yang terbikin dari cam-

puran logam. Tetapi bagaimanapun juga industri pembuatan perahu di daerah ini pada masa silam pernah memegang peranan penting sebagai alat transportasi yang dominan.

Mengenai pengaliran barang dagangan dari kota ke daerah pedalaman atau sebaliknya, perahu dan kapal roda-lambung merupakan alat pengangkut yang menentukan. Di samping melalui jalur sungai, barang dagangan dapat juga dibeli pada tempat-tempat tertentu sebagai pusat jual beli barang yang disebut "kalangan" atau pasar. Pemerintah Hindia Belanda dalam menunjang kegiatan ekonomi keuangan, di dalam kota didirikan beberapa badan dagang Eropah dan agen-agenya yang beradal dari *Nederlandsche Handels Maatschappij* dan *De Javansche Bank*.⁸¹⁾ Kedua badan dagang ini pulalah yang melayani pedagang-pedagang asing dan pribumi dalam memajukan usahanya di bidang perekonomian dan industri.

Kapan timbulnya pasar-pasar di dalam Kota Palembang, penulis tidak dapat mengetahui dengan pasti karena terbatasnya sumber yang ada. Tetapi bagaimanapun juga, pasar-pasar tersebut biasanya timbul pada muara anak Sungai Musi yang merupakan titik pertemuan antara pelayaran laut dan sungai. Tempat tersebut menjadi tempat jual beli barang, yang dari zaman ke zaman menjadi bandar kecil yang dibangun oleh suku-suku Melayu dengan rumah bertiang atau diatas rakit di tepi sungai. Tempat-tempat tersebut cepat berkembang dan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan penyebaran agama Islam, karena merupakan titik pertemuan antara pantai dan pedalaman. Dari pantai ia menerima suku pendatang dengan segala jenis kebudayaannya, sedangkan dari pedalaman mengalir barang-barang hasil hutan, kebun, pertanian, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi lokasi pasar sebagai tempat jual beli barang, barangkali dibedakan dalam dua kategori pasar yang

81) D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 271

ada di daerah ini, yaitu pasar yang ada di daerah pedalaman dan pasar di daerah pantai/sungai. Pasar yang timbul di daerah pedalaman yang letaknya jauh dari anak Batanghari, pada umumnya berfungsi sebagai tempat penampungan produksi, pada umumnya berfungsi sebagai tempat penampungan produksi agraris untuk dijual atau ditukar dengan barang lain yang diperlukan. Barang-barang tersebut adalah hasil hutan/kebun, binatang ternak atau unggas, ikan sungai, beras, kapuk, gambir, buah-buahan, sayur mayur dan lain-lain. Pasar seperti ini hanya terdapat pada jalur jalan raya yang menghubungkan dusun yang satu dengan dusun yang lain disebut "kalangan".⁸²⁾ Pasar tradisional ini merupakan lokasi terbuka dengan memiliki bangunan sementara untuk tempat berteduh dari terik matahari dan hujan.

Pasar-pasar yang terdapat di dalam Kota Palembang, sebagian besar memiliki bangunan yang permanen dan beratap. Pada tahun 1932 di dalam kota terdapat dua buah pasar besar yaitu : pasar 16 ilir dan pasar Sekanak yang terletak di kampung 28 Hilir. Di samping itu terdapat pula pasar-pasar yang relatif kecil yaitu: Pasar 10 Ilir (Pasar Kuto), Pasar 10 Ulu dan Pasar Kertapati.⁸³⁾ Dengan adanya pasar-pasar yang terletak dipinggir sungai atau dimuara anak sungai, menyebabkan lalu lintas perahu-dagang di perairan Sungai Musi semakin ramai. Di antara pasar-pasar tersebut, Pasar 16 Ilir memiliki los-los dan bertingkat dua. Ia tidak hanya sebagai tempat kegiatan perdagangan jual beli barang sandang-pangan, tetapi juga sebagai tempat penampungan barang dagangan yang berasal dari daerah Ulu dan barang-barang impor dari luar. Dengan kata lain pasar-pasar itu merupakan tempat pertemu-

82) Mengenai istilah "kalangan" merupakan tempat pertemuan jual-beli barang, yang biasanya terdapat di daerah-daerah yang letaknya jauh dari anak sungai yang dapat dilayari oleh perahu, dimana hubungan satu-satunya melalui jalan setapak/ jalan raya yang dapat dilakukan oleh penduduk sekitarnya. Berdasarkan permufakatan, maka tempat kalangan ditentukan secara begilir dalam satu minggu.

83) D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 1190

an antara pedagang-pedagang yang melalui jalur-sungai, baik yang berasal dari daerah pedalaman maupun yang tinggal menetap di dalam kota. Orang-orang asing yang dianggap sebagai pedagang perantara diantara penduduk pribumi, membeli barang dagangan tersebut secara tidak langsung, dan kemudian barang-barang itu diangkut dengan perahu jakung ke daerah hilir Sungai Musi, ⁸⁴⁾ bahkan ada yang diangkut sampai ke Singapura.

Palembang sebagai kota bandar yang penuh hilir mudiknya perahu-dagang, memiliki kesibukan tersendiri seperti pasar, apabila ada perahu-perahu dagang yang masuk ke perairan Sungai Musi. Barang-barang dagangan dibongkar dari perahu-perahu tersebut, sebagian ada yang langsung diterima oleh pedagang pengecer dan ada pula yang dibawa ke daerah Uluhan untuk ditukarkan dengan barang hasil produksi atau hasil hutan lainnya. Keadaan yang penuh kesibukan ini sangat tergantung kepada hari-hari kedatangan perahu-perahu dagang dari luar, sehingga sifatnya sangat insidental dan berlakunya sangat singkat. Hal yang seperti ini merupakan hal yang lazim terdapat di kota-kota bandar pada umumnya.

Mengingat kota Palembang dari tahun ke tahun mengalami pemekaran, maka pertambahan pasar-pasar yang baru sangat tergantung dari besarnya kota sebagai akibat bertambahnya penduduk kota. Maka masa menjelang keruntuhan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, mulailah muncul beberapa pasar yang baru seperti: Pasar Lingkis yang kemudian dikenal dengan nama Pasar Cindeh terletak di Muara Lorong Kapten, Pasar Ladang Plaju yang terletak di depan masuk-keluar Plaju atau di jalan yang menuju ke Kayuagung, Pasar Lemabang di 2 Ilir dan Pasar Kilometer Lima di perbatasan kota dengan daerah Mudal. Pasar-pasar tersebut hanya dibuka pada siang hari saja dan ditutup pada sore harinya. Di pasar-pasar itu dijual berbagai macam barang kebutuhan pen-

84) J.L. Sevenhoven, *Op cit* halaman 17

duduk seperti: hasil kebun, barang sandang, ikan laut/sungai, beras, daging, buah-buahan, sayur-mayur, alat-alat kantor, barang-barang bangunan dan sebagainya.

Apa yang telah diuraikan di atas mengenai fungsi perahu-perahu kecil (Sumbawa) yang keluar masuk kampung melalui anak-anak sungai, tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan pokok tetapi juga sebagai "warung kopi yang terapung" yang menjual makanan khas Palembang yang disebut "empek-empek" dan makanan lainnya. Empek-empek yang dianggap makanan spesifik di daerah ini, merupakan hasil industri makanan rumah tangga. Hampir setiap penduduk di daerah ini terutama penduduk asli Palembang mengenal dan mengetahui cara pembuatannya, sehingga makanan itu tidak hanya disenangi oleh golongan tertentu saja, tapi juga disenangi oleh seluruh masyarakat seperti halnya makanan "gudeg" yang dikenal oleh masyarakat Yogyakarta.

Mengenai asal mula nama empek-empek, hingga sekarang ini belum dapat kesatuan pendapat. Apabila dilihat dari proses pembuatannya dan dibandingkan dengan makanan-makanan lainnya, secara asumsi nama tersebut diambil dari cara-cara membuatnya yang mempergunakan kedua belah tangan. Setelah bahan bakunya dicampur menjadi satu, maka mulailah kedua tangan kita memukul-mukul bahan yang telah mengental itu, menurut keinginan kita : bulat panjang, bulat seperti bola-bola kecil, bentuk kerupuk, kemplang (tipis), dalamnya diisi telur (kapal selam) dan sebagainya. Sementara itu ada juga yang mengatakan nama itu berasal dari orang-orang yang menjualnya, yaitu orang-orang Cina yang sudah lanjut usianya disebut "apek". Panggilan apek ini lama kelamaan menjelma menjadi nama makanan yang dijualnya.

Bahan baku yang digunakan untuk membuat makanan tersebut, berasal dari tepung sagu (kanji), daging ikan sungai/laut, garam dan air. Setelah bahan baku itu menjadi satu atau senyawa dan menjadi kental, maka dibentuklah dan kemudian direbus sampai masak. Dari makanan ini pulalah dapat

dibuat "model" dan "tekwan". Untuk makan empek-empek disertai dengan air cuka yang terbikin dari air masak, cuka, serbuk udang kering, garam, kecap, berambang merah/putih, lombok dan gula. Sebaliknya makanan model dan tekwan, mempergunakan semacam saos yang dibumbu. Makanan-makanan tersebut pada akhir-akhir ini banyak diproduksi oleh orang-orang Cina, yang diusahakan secara besar-besaran dan dijual kepada penduduk dengan harga yang dapat dijangkau. Industri rumah tangga ini sejak dulu sampai sekarang, telah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga pengrajin-pengrajin yang tergolong ekonomi kecil, perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat dalam rangka menggalakkan wiraswasta.

Industri rumah tangga lain yang tidak kurang pentingnya adalah kerajinan menenun, menyulam, menganyam tikar dan pengrajin rotan. Hampir setiap ibu rumah tangga dan wanita dan umumnya memiliki keterampilan menenun dan menyulam (bordir), yaitu dengan alat-alat tradisional mereka menenun kain songket dalam berbagai corak seperti : kain songket pulir, kain songket bungamas, kain songket bunga cina, kain songket lepus dan kain songket cukitan.⁸⁵) Kain songket yang dikerjakan secara tradisional ini apakah bahan bakunya berasal dari benang, emas dan perak, dikenal dengan nama songket Palembang. Disamping itu dikenal pula dengan nama "kain tajung" yang berasal dari benang sutera-katun. Mengingat proses pembuatannya dikerjakan dengan tangan dan memakan waktu yang cukup lama, maka tidak mengherankan apabila harganya cukup mahal dan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Begitu pula mengenai sulam-sulaman yang dikerjakan oleh gadis-gadis, merupakan hasil pekerjaan tangan yang sangat menarik. Ibu-

85) Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Palembang*, 1954, halaman 412, lihat J.L. van Sevenhoven, *Op cit*, halaman 36, Interviu dengan eks Kepala Sejarah Militer Kodam IV Sriwijaya (Overste A. Mukti), Palembang, Agustus, 1982.

ibu yang sudah lanjut usianya, untuk mengisi waktu kosong, menganyam tikar batang padi membuat bakul, membuat purun dan sebagainya.

Golongan pria/lelaki yang memiliki modal secukupnya dapat juga mendirikan semacam industri perahu-tambangan, yaitu suatu alat transportasi yang disewakan pada orang-orang Miji/Senan yang dikenal dengan nama "tukang tambangan". Tambangan-tambangan ini merupakan baca-air, yang sangat penting artinya bagi penduduk kota untuk bepergian mengunjungi keluarga di dalam kota karena biayanya relatif murah. Mengingat letak kota 2 meter dari permukaan laut dan sebagian besar terdiri dari rawa-rawa dengan anak-anak sungai yang cukup banyak, maka secara fisik kota ini memiliki lalu-lintas air yang sangat ramai.⁸⁶⁾ Lalu lintas air yang menggunakan perahu-perahu tambangan, masih terasa penting setelah berakhir Revolusi Fisik di daerah ini. Tetapi kemudian setelah dibangun jembatan "Ampera" yang menghubungkan daerah Ilir dan daerah Ulu, maka transportasi yang menggunakan perahu tambangan mulai berkurang.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini, tidak hanya terbatas pada hasil produksi hutan dan kebun saja, tetapi juga daerah ini secara potensial telah banyak menghasilkan bahan mineral yang memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial seperti : tambang timah di Bangka dan Belitung, tambang batu bara di Bukit Asam dan beberapa sumber minyak yang telah diketemukan . Ketika diketemukan sumber-sumber minyak maka berdirilah *Shell Oil Company* dalam tahun 1907 yang memiliki industri penyulingan minyak di Plaju dengan nama *Bataafsche Petroleum Mij* (BPM).⁸⁷⁾

86) H.C. Zentraaf & W.A. van Goudever *Sumatraantjes's* s—Gravenhage Uitgeverij W. van Hoeve, 1947, halaman 28.

87) Kementerian Penerangan, *Op cit*, halaman 395, Bandingkan dengan D.G. Stibbe, *Op cit*, halaman 1.189.

Setelah adanya BPM di Plaju yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Belanda, maka beberapa tahun kemudian Pemerintah Kolonial Belanda memberikan izin kepada maskapai minyak Amerika yang dikenal dengan nama *Secony Oil Company*, untuk mendirikan pabrik penyulingan minyak di Sungai Gerong dengan nama *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij* NKPM). Dengan demikian kita mengenal dua pengusaha asing yang memperoleh hak konsesi untuk mencari sumber minyak di daerah ini pada awal abad ke-20. *De Bataafsche Petroleum Mij* merupakan salah satu anak dari induk perusahaan minyak *Shell Company* yang memiliki modal patungan antara Belanda dan Inggris, sedangkan NKPM memiliki modal gabungan antara Amerika dengan BPM. Kemudian setelah saham-sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Amerika, maka NKPM diubah menjadi *Standaard Vacuum Oil Company* (STANVAC). Berapa banyak yang telah dihasilkan oleh kedua kilang minyak tersebut, hingga tahun 1929 tercatat lebih kurang 955.082.000 liter.⁸⁸⁾

Dengan adanya kilang minyak di Plaju dan Sungai Gerong, maka lokasi yang ada di sekitarnya menjadi sangat penting. Mengingat para pekerja (buruh) dari kedua kilang itu tidak memperoleh tempat tinggal (perumahan) yang disediakan oleh perusahaan, maka dari tahun ke tahun daerah Ladang Plaju dan Sungai Buah Menjadi suatu perkampungan buruh-minyak, yang pada awal Revolusi Fisik lokasi tersebut didiami oleh 22.000 jiwa dan di antaranya 80% terdiri dari buruh minyak.⁸⁹⁾ Penduduk yang bertempat tinggal di daerah itu juga umumnya berasal dari suku Komeri, yang sengaja tinggal menetap disana sebagai buruh atau pedagang. Bagaimanapun juga kedua kilang minyak tersebut memiliki dampak sosial, yaitu suatu industri yang dapat menyerap tenaga kerja dan menstimulasi timbulnya urbanisasi. Sebagai latar belakang urbanisasi dari suku tersebut ke daerah pinggiran

88) D.G. Stibbe, *Op cit* halaman 1189 – 1190

89) Kementerian Penernagan, *Op cit* halaman 396

Plaju dan Sungai Gerong, adalah kenyataan, bahwa daerah asalnya sendiri kurang memungkinkan untuk bertani atau bercocok tanam. Sebagian besar tanah mereka ditanami oleh buah tahunan sesuai dengan kondisi tanah di daerah tersebut. Itulah sebabnya diantara suku-suku lain di daerah ini, suku Komerling termasuk suku termaju dan secara merata memperoleh kesempatan untuk mengecap pendidikan formal, yang disediakan dan diselenggarakan oleh kedua perusahaan asing itu.

Pada masa pendudukan tentara Jepang, kedua kilang minyak ini tidak di bawah kekuasaan Pemerintah Jepang di Palembang, tetapi langsung dibawah Pemerintah Jepang di Syonanto (Singapura). Sebagai akibat kerusakan yang berat yang disengajakan oleh pemilik perusahaan ketika mereka meninggalkan daerah ini, maka produksi minyak sangat menurun. Banyak kilang-kilang yang tak dapat bekerja dengan baik, karena kerusakan berat yang tak dapat direhabilitasi. Mengingat pentingnya industri minyak dalam menunjang perang Asia Timur Raya, dibentuklah oleh Jepang suatu pengerahan tenaga buruh yang dikenal dengan nama "*Himpunan Tenaga Lasykar Minyak*" (HTLM). Organisasi ini semaca *Hokokai* yang mengerahkan semua tenaga sukarela, dalam rangka memperbesar produktivitas minyak. Walaupun tidak banyak yang dilakukan oleh organisasi ini, namun ia merupakan embrio lahirnya organisasi *PERMIRI* (Perusahaan Minyak Republik Indonesia), yang pernah berperan aktif dalam membiayai Revolusi Fisik di daerah ini.

Mengingat *Permiri* belum begitu mapan dan sedang dalam proses pembenahan diri, maka ketika tentara Sekutu yang diboncengi NICA mendarat di Palembang, kedua kilang minyak tersebut langsung diduduki dan dikuasai kembali oleh pemiliknya (NKPM dan BPM). Meskipun telah jatuh ke tangan pemiliknya semula, para buruh giat bersatu padu dalam suatu wadah *PERBUM* (Persatuan Buruh Minyak) untuk memperbaiki nasibnya, dan sesuai pula dengan alam revolusi yang

melanda daerah ini untuk mendapat kemerdekaan. Betapa sulitnya penguasa-penguasa industri minyak ini dalam menghadapi gerakan-gerakan buruh yang menuntut kenaikan upah; sehingga terpaksa kedua perusahaan minyak tersebut mengeluarkan biaya sebesar Rp. 98.200.000,- dalam tahun 1951 dan dalam tahun berikutnya mencapai Rp. 111.500.000,-⁹⁰⁾ Biaya yang dikeluarkan itu meliputi biaya upah buruh sebanyak 11.000 orang di antaranya 124 orang Asing, 306 orang Belanda, 81 orang Cina, 6993 orang Indonesia dan selebihnya terdapat di Plaju. Dengan adanya perbaikan mesin-mesin yang rusak dan nasib kaum buruh maka produksi minyak dari tahun ke tahun menjadi meningkat, bahkan pada 1 Pebruari 1949 jumlah produksi minyak mentah sehari sebesar 55.000 barrel (1 barrel = 42 x 3.785 liter).⁹¹⁾

Disamping produksi minyak bumi dan tambang mineral lainnya, di daerah ini terdapat beberapa perkebunan karet, kelapa sawit, kopi dan teh. Ketika terjadi krisis tembakau pada tahun 1891, maka mulailah pemerintah kolonial Belanda meningkatkan usahanya untuk menanam tanaman keras yang mempunyai prospek ekspor yang cukup baik di pasaran dunia. Dari hasil penelitian ternyata, tanaman karet mempunyai prospek yang baik dan oleh karena itu mulailah pengusaha-pengusaha asing (Barat) diberi kesempatan untuk menyewa tanah Marga di daerah ini. Kira-kira pada awal dasawarsa pertama abad ke-20, dibukalah onderneming-onderneming karet di daerah ini yaitu di Musi-Pait, Musi Landas (Melania), Tabenan (Betung) dan di Bangka Belitung. Sementara itu masyarakat pedusunan dianjurkan pula oleh penguasa setempat untuk menanam karet di ladang bekas tanaman padi, sehingga di daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesudah Perang Dunia II memiliki perkebunan karet-rakyat terluas di daerah ini.

Pada akhir Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, luas areal perkebunan karet di daerah Sumatera Selatan tercatat

90) Op cit, halaman 408

91) Op cit halaman 402

± 338.017,2 Hektar dengan 158.472.499 pohon karet. Di Keresidenan Palembang sendiri diperkirakan 321.914 hektar dengan jumlah batang karet ± 152.756.846.⁹²⁾ Petani yang memiliki kebun karet biasanya dikerjakan oleh penyadap karet (anak-kapal) dan berlaku sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian sebelumnya. Pada mulanya produksi karet rakyat diharuskan membuat *sheet*, yaitu getah karet yang cair latek dibekukan dan kemudian dijadikan lembaran tipis yang digiling oleh mesin (mesin para). Tetapi kemudian rakyat lebih senang membuat karet *slabs*, yaitu getah karet dalam bentuk cair dibekukan dalam suatu cetakan segi empat. Karet-karet tersebut dibeli oleh pedagang-pedagang keliling, dan kemudian dibawa ke kota dijual pada pengusaha-pengusaha tertentu. Di antara pengusaha-pengusaha asing terdapat juga pengusaha pribumi yang menampung hasil perkebunan karet-rakyat. Pada zaman dulu rumah-rumah rakit di tepi Sungai Musi, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai gudang tempat menyimpan karet sebelum dibawa ke luar negeri.

Oleh karena petani karet lebih senang membuat *slab*, maka timbullah inisiatif dari pengusaha-pengusaha karet di Palembang untuk mendirikan *remiling*, yaitu suatu mesin yang digerakkan oleh tenaga upah untuk membuat *slabs* menjadi lembaran-lembaran yang tipis disebut *sheet*. Sebelum perang dunia kedua di dalam kota terdapat 7 buah *remiling*, sedangkan pada awal revolusi Fisik tercatat : NV. Gandus, PT Madrasah, NV. Djasa Musi, PT. H. Abubakar, PT. Empat Tunggal, Saleh Coy Ltd, PT. Nirwana Indah, Fa. Familidin, PT. H. Moh. Ali, NV. Muara Kelingi, PT. Sungai Selincih, NV. Kian Gwan, NV. Hok Tong, NV. Hamifa, NV. Remco, NV. Metro, NV. Sumatera, PT. Suara Karya, PT. Naimeo, PT. Pegagan, PT. Tjik Ebek, PT. Air Saling, dan PT. Nilakandi.⁹³⁾

92) Op cit halaman 454

93) A. Moekti, *Dokumentika Historia VII*, Komando Daerah Militer IV Sriwijaya, Palembang, 1960, halaman 60.

Dengan adanya *remiling-remiling* tersebut, maka diperlukan tenaga kerja yang tidak sedikit untuk memproses karet menjadi *sheet*. Bagaimanapun juga industri perkaretan yang ada di dalam kota telah telah menyerap tenaga kerja yang ada di sekitarnya. Demikian pula dengan timbulnya perkebunan-perkebunan karet di sekitar Kota Palembang, maka terpaksa penguasa-penguasa perkebunan mendatangkan tenaga buruh (penyadap karet) dari Jawa dengan upah yang murah. Pandangan hidup dan cara hidup masyarakat Jawa yang tinggal disekitar perkebunan itu, telah menyentuh masyarakat pedusunan dalam segala aspek kehidupan bertani/bercocok tanam, yaitu mengenal berbagai cara menanam pelawija dan lain-lain. Dengan kata lain mereka saling kenal mengenal tentang aspek kehidupan dan sumber-sumber kekuatan yang ada di dalamnya, sehingga mengurangi rasa kesukuan yang melekat dalam tradisi rakyat setempat.

Sebagai tindak lanjut Politik Etis di daerah ini, maka sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial pada permulaan abad ke-20 telah ditempuh dua jalur. Jalur yang pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas dan tenaga terdidik yang bermutu bagi keperluan industri dan ekonomi. Di lain pihak dapat terpenuhi akan kebutuhan tenaga kerja (pegawai) yang rendah dan menengah yang berpendidikan. Oleh sebab itu di dalam Kota Palembang sendiri sampai tahun 1932 tercatat tiga buah *Europeesche Lagere Schoolen*, tiga buah *Hollandsch-Inlandsche Schoolen*, sebuah *Hollandsch-Chineesche School*, sebuah *Schakel-School*, tiga buah *Europeesche Frobelscholen*, 10 buah Sekolah Rakyat dan sebuah MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*). Kemajuan yang pesat bagi sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, merupakan tantangan bagi sekolah-sekolah swasta yang sudah berlangsung sebelumnya.

Ketika organisasi Muhammadiyah dan Serikat Islam mulai berpengaruh di daerah ini, maka timbullah kesadaran

berorganisasi yang diliputi oleh rasa kebangsaan yang murni. Kesadaran yang timbul itu secara paedagogis dan kultural melahirkan perkembangan baru dalam dunia pendidikan dan pengajaran, sehingga sistem pengajian dan sistem pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional mulai diperbaharui dan disesuaikan dengan keadaan setempat.

Usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Serikat Islam dan Nahdhatul Ulama dalam membina lembaga-lembaga pendidikan di dalam dan di luar Kota Palembang, nampaknya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Pada tahun 1932 organisasi Muhammadiyah telah mendirikan Sekolah Rakyat di empat Ulu, Sekolah Rakyat di jalan Mayor Ruslan dan HIS Muhammadiyah di 24 Ilir. Empat tahun kemudian dibuka lagi Sekolah Rakyat di Kertapati dan dalam tahun 1938 didirikan HIS, *Schakel School* di 4 Ulu dan Mulo Muhammadiyah.⁹⁴) Di antara sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah, terdapat juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Serikat Islam, seperti pendidikan Islam di Air Itam yang didirikan oleh Haji Abdulhamid pada tahun 1937. Demikian pula organisasi Nahdhatul Ulama ikut serta mengolah madrasah-madrasah yang telah diperbaharui setingkat dengan Sekolah Dasar. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sosial yang berbau agama ini, merupakan jawaban terhadap kegiatan "kristianisasi" yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial yang bergandengan bahu dengan para Missi dan Zending di daerah ini.

Tidak hanya lembaga pendidikan yang berbau agama saja yang muncul di dalam kota, tetapi juga lembaga pendidikan yang bersifat nasional telah muncul sebagai reaksi terhadap kegiatan sekolah-sekolah pemerintah yang berorientasi pada cara berfikir orang Barat. Dalam hal ini peranan perguruan Tamansiswa yang berdiri pada tahun 1932. dirintis oleh bebe-

94) Masykuri & Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek IDKD, 1980/1981, halaman 57

rapa orang terkemuka seperti: Ki Hanung, RA Najamuddin dan Raden Mad. Sebagai langkah pertama dibukalah sebuah Sekolah Rendah berbahasa pengantar bahasa Belanda, yang lebih dikenal dengan nama "Taman Muda" yang sederajat dengan HUS. Kemudian dalam tahun 1938 perguruan ini mendirikan "Taman Dewasa" yang sederajat dengan MULO.

Di samping adanya sekolah pemerintah, Missi dan Zending telah ikut serta mendirikan sekolah-sekolah di dalam Kota Palembang. Pada tahun 1925 Palembang dijadikan pos ke-2 dari kegiatan Missi untuk menyebarkan agama Katholik di kalangan penduduk kota. Oleh karena kegiatan mereka kurang membawa hasil yang memuaskan, maka pada tahun 1930 terbentuklah "*Yayasan Xaverius*" dengan susunan pengurusnya sebagai berikut: Pastor JJ Van Sangen (ketua) Pastor H. Hermelink (Sekretaris), Ny. Ida Maria Gerarda Wilhemina van Peer (Bendahara) dan FPH van Alfen/JHA. Wiedenhoff (anggota). Sebelum itu telah berdiri karya Melania oleh Pastor HJD van Oort, dan seterusnya berdiri Sekolah Theresia (HIS), ELS, Sekolah Taman Kanak-kanak dan *Vervolg-School*. Pada tahun 1935 dibuka HCS untuk menampung anak-anak Cina yang berbakat, dan kemudian sekolah ini digabungkan dengan Sekolah Theresia menjadi *Andreas School* pada tahun 1938.

Di samping kegiatan para Misi, Zending ikut aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, yaitu pada tahun 1908 didirikan *Mission School* oleh Solomon Pakianathan dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Setelah memperoleh gedung baru yang berlokasi di Jalan Tengkuruk, sekolah itu diberi nama *Perguruan Methodis* atau sering juga disebut *Methodist English School*, yang lama pendidikannya 12 tahun. Kemudian setelah itu atas usaha gereja-gereja Kristen di Palembang, lahirlah ELS pada tahun 1938 yang dibiayai oleh *Yayasan Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Palembang*, dan berlokasi di Jalan Merdeka sekarang dengan nama *Beatrix School*.

Rupa-rupanya kegiatan Missi di daerah ini, tidak hanya terbatas pada dunia pendidikan saja, tetapi juga telah ikut serta dalam kegiatan sosial lainnya yaitu mendirikan rumah sakit dan klinik-klinik. Pada tahun 1932 di Kota Palembang terdapat dua buah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Benteng yang dianggap sebagai rumah sakit umum yang diusahakan oleh pemerintah kolonial dan Rumah Sakit Charitas yang dikelola oleh Missi.⁹⁵⁾

95) D.G. Stibbe, *Op cit* halaman 1190

BAB IV

PALEMBANG SEBELUM DAN SESUDAH PROKLAMASI

1. Pendudukan Balatentara Jepang di Palembang

Kedudukan dan letak Indonesia yang strategis serta banyak memiliki sumber daya alam dan tenaga manusia, terutama sekali daerah Keresidenan Palembang, telah mengundang kaum penjajah untuk datang ke daerah ini termasuk bangsa Jepang yang terlibat dalam Perang Dunia II. Serangan Jepang atas Pearl Harbour pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1941, dinilai sebagai teknik perang yang paling berhasil dalam sejarah dunia. Karena dengan lumpuhnya pusat kekuatan Amerika Serikat di Pasifik, berarti telah memberikan peluang kepada angkatan bersenjataanya untuk menyerang dan menguasai Asia secara keseluruhan. Apabila pusat kekuatan Amerika Serikat itu menjadi lumpuh, maka sulitlah bagi Amerika untuk memberikan bantuan kepada sekutunya, apabila nantinya Jepang menyerang daerah-daerah di kawasan Asia Tenggara, yang pada umumnya dikuasai oleh negara-negara barat.

Sebelum Jepang mengumumkan perang, Negeri Belanda terpaksa kepala negaranya mengungsi ke London. Dengan

negeri induknya. Itulah sebabnya gubernur jenderal Belanda di Indonesia Mr. AWL Tjarda Starkenborg Stachouwer tanpa menunggu persetujuan dari negeri induk, telah menyatakan perang kepada Jepang lewat radio. Dengan kata lain Hindia Belanda termasuk blok Sekutu yang tergabung dalam pakta pertahanan, yang lazim disebut Front A-B-C-D (Amerika-British-China dan Ducht).

Setelah Jepang berhasil melumpuhkan pusat kekuatan Amerika di Kepulauan Hawaii, maka dengan serangan kilatnya yang terkenal itu Jepang secara beruntun dapat merebut Hongkong (25 Desember 1941), Filipina (2 Januari 1942) dan kemudian Semenanjung Malaya serta Singapura pada tanggal 25 Pebruari 1942. Dalam serangannya ke Semenanjung Malaya, Jenderal Yamashita berhasil menenggelamkan kapal induk Inggris *Princes of Wales* dan *Repulse*, yang dengan gigih mempertahankan bandar Singapura. Pertahanan A-B-C-D yang terpusat antara Hongkong dan Singapura telah dapat dikuasai, dan kini balatentara Jepang bergerak ke daerah Selatan, yaitu Kepulauan Indonesia yang secara potensial dapat menunjang perkembangan bagi industri perang Jepang.

Sebelum Jepang menduduki Pulau Jawa yang menjadi pusat Pemerintahan Hindia Belanda, daerah-daerah yang kaya sumber alamnya diduduki lebih dulu, terutama Kota Palembang dan daerah sekitarnya (14 Pebruari 1942¹) Kemudian dalam pertempuran laut yang tidak seimbang, angkatan Laut Belanda yang dipimpin oleh Laksanama Helfrigh dengan mudah dapat dihancurkan oleh Jepang, sedangkan angkatan darat Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Ter Poorten dapat dihalau ke daerah pedalaman Jawa Barat tanpa memberikan

1) Sartono Kartodirdjo et al. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai pustaka, Jakarta, 1977, halaman 1; Bandingkan dengan George Mc, Kahin, *Nationalism an Revolution in Indonsia*, Corneel, University, Ithaca, New2 York, 1961, halaman 101.

perlawanan yang berarti. Dengan kata lain mitos kebesaran Belanda yang selamaini diagung-agungkan di depan mata rakyat Indonesia sudah pudar tenggelam di kaki bukit keruntuhannya. Yuridis formal kekuasaan Hindia Belanda menjadi sirna, setelah terjadi persetujuan di Kalijati (10 Maret 1942). Momentum di Kalijati tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena sejak itu pulalah berakhir Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada umumnya dan daerah Keresidenan Palembang pada khususnya.

Ketika Kota Palembang diduduki balatentara Jepang pada tanggal 14 Pebruari 1942, dalam waktu yang relatif singkat tentara Jepang telah menyebar ke arah Lubuk Linggau melalui jalan darat, sebagian di antara mereka meneruskan ke Bengkulu dan sebagian ada yang menuju ke daerah Jambi. Pada akhir bulan Pebruari 1942, wilayah Sumatera Selatan secara keseluruhan telah diduduki militer Jepang, dan dengan demikian mulailah pemerintahan militer Jepang di daerah ini. Sebagian dari jabatan-jabatan penting yang dulu dijabat oleh orang-orang Belanda dalam wilayah keresidenan, sekarang dipegang oleh tenaga-tenaga Jepang dan selebihnya diserahkan kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia.²)

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Sumatera dibagi oleh Pemerintah Jepang dalam 10 *syuu* (keresidenan) yaitu Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Palembang dan Bangka-Belitung. Mengenai Keresidenan Palembang yang dulu dikepalai oleh residen diganti dengan nama *syuu* dan jabatannya disebut *syuu cakan*; daerah *afdeeling* diganti dengan *bun syuu* yang dikepalai oleh *gun co*; onderdistrik diganti dengan *fuku gun* yang dikepalai oleh *fuku gunco*; marga yang dikepalai oleh pesirah/depati diganti dengan *son* dikepalai oleh *son Co*, dan

2) Drs. G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Indonesia*, Timur Mas NV. Jakarta, 1955, halaman 63-64; Bandingkan dengan Drs. Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia babak Hindia Belanda dan Jepang*, Dewaruci Press, 1981, halaman 69.

akhirnya dusun-dusun disebut *ku* dikepalai oleh *ku co* yang dibantu oleh *kumi co* (penggawa). Kota Palembang sendiri yang menjadi ibukota *syuu* diatur oleh Pemerintah Kota (Palembang *syi*) yang dikepalai oleh *syi co* (walikota) dan langsung di bawah *syuu cogan*.

Khusus mengenai Kota Palembang yang dikepalai oleh *syi co*, daerah kekuasaannya diperluas dan mencakup beberapa daerah lain seperti: Marga Panulutan, Marga Parit dan Tanjungraja *Gun*, Marga Rambutan dan kayuagung *Gun*, Marga Sungai Pergas dan Palembang *Gun*, Marga Gesing dan Palembang *Gun*, Marga Talang Kelapa dan Palembang *Gun*, Dusun Maryana, Dusun Sukarami dan Talangbetutu dijadikan kampung. Dusun-dusun tersebut di bawah kekuasaan Palembang *Syi*, sehingga terlepas dari kedudukannya semula. Batas kekuasaan wilayah itu dituangkan dalam Palembang *Syuu-Rei* No. 1 tertanggal 13 Maret 1944 (2604) dan mulai berlaku sejak 1 April 2604 (1944).³⁾ Palembang Ilir dan Palembang Ulu terbagi atas beberapa kampung yang disebut *ku* dan dipimpin oleh *ku co*, yang dibantu oleh kepala-kepala Rukun Tetangga disebut (*kumi co*). Dengan demikian kedudukan kampung sama dengan dusun-dusun di daerah Uluan.

Pada zaman Hindia Belanda, jenis-jenis sekolah yang ada di dalam kota terdapat tingkat Taman Kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan Pertama. Jenis sekolah tersebut ada yang berbahasa pengantar bahasa Belanda dan ada pula yang berbahasa pengantar bahasa Belanda dan ada pula yang berbahasa pengantar bahasa Melayu. Itupun tidak banyak jumlahnya, karena harus disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial. Setelah masa pendudukan militer Jepang, sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda (*Froobelschool*, HIS dan MULO) terpaksa ditutup untuk sementara. Di dalam kerangka untuk mencapai cita-cita

3) Dokumen asli yang disalin oleh Mgs, Abdurrahman, yang pada waktu itu menjabat sebagai Gyseikokatyo di kantor Palembang *Syi*.

hakko i chiu (Kemakmuran Asia Timur Raya), guru-guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menanamkan cita-cita tersebut, karenanya perlu terlebih dahulu mereka mendapat latihan khusus. Dalam waktu yang singkat ternyata beberapa angkatan guru telah dilatih di ibukota Syuu, dan setelah itu barulah mereka ditugaskan mengajar di sekolah-sekolah rakyat (*syoto syogakko* dan *kota syokokko*) di daerah Uluan. Guru-guru di dalam kota tidak luput dari latihan yang diberikan sebelum mereka menjalankan tugas di sekolah-sekolah. Pada latihan itu mereka dilatih secara fisik, yaitu bagaimana cara melakukan gerak badan (*taisyo*) setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, baris-berbaris, mempelajari bahasa Jepang dengan hurufnya (*katakana*, *hiragama* dan *Honji*) dan menyanyikan lagu-lagu Jepang yang penuh semangat.

Daerah Keresidenan Palembang sebagai sumber bahan mentah dan gudang minyak yang dapat diharapkan untuk menunjang pelaksanaan Perang Asia Timur Raya, merupakan sasaran yang perlu dibina sebaik-baiknya, oleh karena itu ideologi *Hakko Ichi U* yang pada dasarnya merupakan alat tersembunyi ekspansi Jepang harus dipompakan kepada seluruh rakyat Indonesia di daerah ini. Dalam melancarkan usaha tersebut di atas pemerintah Jepang membentuk barisan propaganda, yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari daerah ini, terutama sekali guru dan kaum agama/guru agama. Barisan propaganda tersebut dikenal dengan nama *Sendenbu*, dan tugas utama yang dibebankan oleh Jepang kepadanya ialah menyebarluaskan ideologi *Hakko Ichi U*. Dalam hal ini tidak kurang pentingnya peranan Guru yang merupakan salah satu sarana yang efektif di antara sarana-sarana lain.

Kedatangan bangsa Jepang di daerah ini mula-mula disambut dengan hangat oleh seluruh rakyat yang ingin melepaskan diri dari penjajahan bangsa Belanda, karena Jepang dianggap sebagai juru selamat yang telah berhasil mengusir

bangsa bule dari bumi Indonesia. Dengan berbagai semboyan yang muluk-muluk seperti : Nippon-Indonesia sama-sama, Asia untuk bangsa Asia, Bangsa kulit putih musuh Asia, dan lain-lain, nampaknya Jepang sudah dapat memikat hati rakyat. Tetapi kemudian sikap rakyat berubah, karena ucapan dan semboyan-semboyan yang digembar-gemborkan itu tidak sesuai dengan perbuatan orang-orang Jepang itu sendiri. Rakyat mulai ragu-ragu dan gelisah penuh ketakutan.

Semenjak Jepang menduduki daerah ini, hampir semua kegiatan di segala bidang kehidupan masyarakat terhenti untuk sementara, termasuk kegiatan pendidikan dan pengajaran. Bidang pendidikan dan pengajaran barulah berjalan setelah beberapa bulan kemudian, yaitu setelah guru-guru mendapatkan latihan khusus dari Jepang. Rupa-rupanya situasi/kondisi pendidikan di daerah ini berbeda dengan apa yang terdapat di Jawa dan tempat lain di Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda baik jumlah maupun jenis sekolah yang dibuka di daerah ini tidak banyak. Bahkan pada zaman pendudukan militer Jepang, keadaan pendidikan semakin menyedihkan karena sekolah-sekolah di zaman Belanda yang jumlahnya belum memadai semakin dikurangi. Baik sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh badan swasta yang berbahasa pengantar bahasa Belanda ditutup. Penutupan berbagai sekolah pada waktu itu, tidak hanya disebabkan oleh faktor tersebut di atas, tetapi juga disebabkan oleh kebutuhan Jepang akan bangunan gedung yang dipakai untuk asrama, bengkel, depot logistik dan lain-lain.⁴⁾ Sebagai akibat tindakan Jepang itu, maka jumlah sekolah menjadi lebih sedikit, dan boleh dikatakan keadaan pendidikan di daerah ini sangat rawan.

Sistem pengajaran yang dipakai pada waktu itu adalah sistem sebelumnya dengan ditambah beberapa mata pelajaran

4) Kemnterian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang, 1954, halaman 630.

baru, antara lain bahasa Jepang serta hurufnya dan gerak badan (*taisho*) ke dalam kurikulum. Seperti yang berlaku pada waktu itu bahwa bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar disemua tingkat sekolah, sedangkan bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib.⁵⁾ Sebelum pelajaran dimulai para murid diharuskan mengikuti upacara penaikan/pengibaran bendera *Hinomaru* dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (*Kimigayo*), menghormat (*seikerei*) kepada kaisar Tenno Heika di Tokyo dengan menundukkan setengah badan menjadi 90°, mengucapkan sumpah setia kepada *Tenno* dan kemudian diteruskan gerak badan (*taisho*). Di samping sekolah-sekolah rakyat yang sudah ada di dalam kota yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia, Pemerintah Jepang mulai membuka Sekolah Guru, Sekolah Keputrian, *Misuyo Gakko-en*, *Minarai Gakko* dan *Sekyu-Kahyo Gakko* (Sekolah Perminyakan di Plaju). Sekolah Guru yang dibuka adalah *Syoto-Sihang Gakko/Kyo-in Yo-seijo* yang setingkat dengan CVO (*leergang*) dan *Kota Sihang Gakko* yang setingkat dengan *Noormaalschool*. Kedua sekolah ini berlokasi di Kompleks Pertokoan Gaya Baru sekarang ini, sedangkan asramanya di Bukit Benar.

Sistem persekolahan pada zaman pendudukan militer Jepang di daerah ini mungkin juga di daerah-daerah Indonesia lainnya, banyak mengalami perubahan yang mendasar karena sistem penggolongan, baik menurut golongan etnis maupun menurut status sosial dihapuskan.⁷⁾ Dengan demikian terjadilah perngintegrasian terhadap bermacam-macam sekolah sejenis, yaitu berbagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial (ELS, HIS, HCS, *Schakel school*, *Volkschool*, *Vervolgschool*) dilebur menjadi satu jenis sekolah rendah yang disebut Sekolah Rakyat 6 tahun

5) M.A. Aziz, *Japan's Colonialism and Indonesia*, Martinus Nijhoff The Hague, 1955, halaman 175

6) Kementerian Penerangan, Op cit, halaman 631

7) BP.3K. *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Balai pustaka, Jakarta, 1975, halaman 41.

(*Kokumin Cakko*). Sejak zaman itu pulalah dihapuskannya dualisme dalam dunia pendidikan dan pengajaran di daerah ini⁸) karena pemerintah militer Jepang hanyalah menyelenggarakan satu jenis sekolah rendah untuk semua golongan/penduduk/bangsa, dan hanya mempergunakan satu bahasa pengantar bahasa Indonesia. Dalam hal ini adanya kecenderungan demokratisirng dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang merupakan perintis bagi masa-masa mendatang.

Pada zaman pendudukan Jepang tidak semua cabang kesenian dapat berkembang, walaupun penduduk di daerah ini telah mengenal bermacam kesenian seperti : seni-drama, seni-suara, seni-ukir, seni-musik, seni-tari dan lain-lain. Bagi orang Jepang seni bukan untuk seni, melainkan seni digunakan untuk alat propaganda politiknya. Dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah *Sendenbu* (Jawatan Penerangan Jepang), yang diselenggarakan setiap ada pertunjukan. Seperti seni-drama dalam bentuk sandiwara, hampir setiap minggu dipertunjukkan di dua gedung bioskop, yaitu Bioskop Saga yang terletak di sebelah Hotel Musi dan Bioskop Elite yang berlokasi di sekitar Pasar 16 Ilir. Seni tari atau seni suara hanya diadakan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat-tempat di mana serdadu Jepang sedang mengaso sambil minum-minum. Seni suara lebih banyak diajarkan kepada murid-murid sekolah, yang lebih ditekankan pada lagu-lagu Jepang yang penuh semangat (*sisin*). Hanya dalam waktu-waktu tertentu saja penduduk kota dapat melihat film sebagai hiburan, yang biasanya dipertunjukkan ialah film-film yang menggambarkan kepahlawanan orang Jepang atau militer Jepang di medan pertempuran.

Ketika agama Islam diakui sebagai agama resmi dalam sistem Kesultanan Palembang, maka secara mayoritas penduduk kota dan daerah sekitarnya memeluk agama tersebut, wa-

8) Drs. Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, CV. Toha Putera, Semarang, 1955, halaman 57

laupun pada zaman kolonial Belanda perkembangannya selalu saja diawasi. Pada zaman pendudukan militer Jepang, pemuka-pemuka agama di daerah ini selalu mendapat perhatian khusus, yaitu menggunakan pengaruh kaum ulama untuk kepentingan pemerintah Jepang hal ini dapat kita lihat ketika balatentara Jepang menduduki daerah ini, maka salah seorang tokoh politikus Islam yang bernama A.S. Mattjik, selalu saja dibawa oleh Jepang ke daerah-daerah untuk meyakinkan penduduk, bahwa kedatangan mereka disini sebagai pelindung orang muslim. Bagaimanakah sikap orang Jepang terhadap muslim di daerah ini? Ada suatu analogi yang menarik atau tidak menarik yang dapat kita lihat. Di satu pihak, terutama di zaman penjajahan, ingin membiarkan masalah Islam dan di lain pihak ingin membentuk dan mengarahkannya. Kedua sikap ini pada dasarnya sangat tergantung pada posisi orang Islam itu sendiri. Artinya bila ia tidak mengganggu dibiarkan, tetapi apabila menunjukkan sikap yang militan seperti yang pernah dilakukan pada zaman Kolonial, maka ia diawasi dengan ketat. Pengawasan seperti ini berlaku pula pada zaman pendudukan militer Jepang di daerah ini.

Setelah pemerintah militer Jepang mulai stabil di daerah ini, maka kaum ulama/guru agama di daerah Uluu saja diundang pada pertemuan-pertemuan resmi, dengan maksud supaya kaum ulama/guru agama lebih berperan dalam memberikan informasi kepada penduduk setempat. Sikap pemerintah militer Jepang ini, merupakan suatu kebijakan yang sejalan dengan pusat penguasaan Jepang di Jawa.⁹⁾ Hal ini bukan tidak beralasan, bahwa dalam mengidentifikasi masyarakat di daerah ini, kaum ulama/guru agama menunjukkan kedudukan sebagai komunikator antara tradisi kecil (tradisi lokal) dengan tradisi besar (agama Islam). Golongan ini memiliki identitas yang sama dengan petani pada umum-

9) Harry J. Benda *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada zaman Pendudukan Jepang*, (terjemahan Daniel Dhakide), Pustaka Jaya, Jakarta, 1980, halaman 168.

nya, sehingga mempunyai lebih banyak alat komunikasi dengan rakyat pedesaan. Dengan melalui sistem pengajian, sistem tarikan atau sistem pesantren, golongan ini dapat mengadakan kontrol pada masyarakat-agraris, dan dengan demikian secara mudah dapat mengerahkan penduduk.

Peranan golongan ini tidak diragukan lagi dalam sejarah perkembangan di daerah ini, karena sebagian besar, protes sosial yang pernah dilancarkan terhadap pemerintah kolonial dipimpin oleh golongan tersebut. Hal-hal yang demikian ini sangat diperhatikan oleh Pemerintah Jepang, walaupun dalam segala tindakannya dapat dikatakan Jepang tidak berusaha membina kehidupan agama. Sebaliknya Pemerintah Jepang selalu menggunakan pengaruh Ulama/Guru-agama, untuk menggerakkan umat Islam agar bersedia berkorban dalam memberikan bantuan moral dan materiil kepada Jepang. Pada mulanya sekolah-sekolah yang berbau Islam tidak dilarang untuk hidup. Tetapi kemudian setelah diadakan pertemuan/konferensi umat Islam se Sumatera Selatan di Tanjung raja, maka mulailah golongan ini mencurigai sikap Jepang selama ini, karena diharuskan bagi setiap sekolah melakukan upacara penghormatan kepada *Tenno Heika* yang identik dengan cara melakukan sembahyang dalam Islam. Di samping itu ditekankan pula supaya umat Islam melakukan "Jihad fisabilillah" melawan sekutu. Anjuran yang mengandung paksaan ini sudah barang tentu tidak dapat diterima begitu saja, sehingga semua kegiatan sekolah-sekolah agama dihentikan, dan yang lebih penting lagi sikap golongan kiai/guru agama di daerah ini terhadap Jepang menjadi kurang simpatik.

Uluran tangan yang diberikan oleh orang Islam kepada Pemerintah Jepang selama ini, mulai dipertanyakan oleh sebagian besar penduduk, terutama sekali mengenai tindakan orang-orang Jepang yang merampas hak milik hasil tani rakyat, perlakuan terhadap pekerjaan-pekerjaan paksa (kuli BPP) di luar perikemanusiaan dan usaha untuk mengumpul-

kan anak-anak gadis di daerah pedusunan. Anjuran yang datang dari penguasa-penguasa militer Jepang setempat untuk mengumpulkan anak-anak gadis dengan janji-janji yang muluk-muluk, telah menciptakan kondisi-kondisi yang penuh rasa ketakutan. Dalam situasi seperti ini ada kecenderungan bagi orang tua untuk mengawinkan anak-anak gadisnya pada waktunya yang belum direncanakan. Rupa-rupanya pada tahun-tahun terakhir pendudukan militer Jepang di daerah ini, tidak sesuai dengan apa yang pernah mereka janjikan sebagai "juru selamat". Dengan demikian perkembangan terakhir mengenai sikap militer Jepang terhadap golongan ulama/guru agama merupakan kulminasi dari suatu kontak yang dekat menjadi pudar dan penuh penyesalan.

Di bidang perekonomian menunjukkan suatu gejala yang lebih parah daripada perekonomian di zaman kolonial Belanda, karena tata ekonomi yang sudah ada dijadikan ekonomi perang. Bahkan ada diantara bidang usaha primer di bidang pertambangan dan industri mengalami kelumpuhan total, karena bahan bakunya sangat tergantung dari luar negeri. Hubungan ekonomi dengan luar negeri putus sama sekali. Dengan kata lain mengenai struktur lembaga-lembaga ekonomi dalam hubungannya dengan produksi menurut pengertian teori ekonomi neoklasik perubahan dari pertanian ke industri, sama sekali tidak ada perubahan. Sehubungan dengan itu maka semua potensi yang dapat menunjang peperangan seperti sumber daya alam dan pangan, langsung dikuasai dan diatur oleh orang Jepang. Mengingat kota Palembang tidak memiliki basis-agraris, maka bahan makanan-pokok (beras) yang didatangkan dari daerah pedalaman dimonopoli oleh Jepang, yaitu suatu badan khusus yang dikenal dengan nama *Kumiai*. Semua alokasi barang yang dianggap kebutuhan pokok dipusatkan di Palembang dan diawasi secara ketat oleh Jepang. Untuk menyalurkan bahan-bahan pokok seperti minyak tanah, minyak goreng, gula, garam, beras dan lain-lain, ditunjuklah

toko-toko/warung tertentu yang disebut "toko gabungan"¹⁰⁾

Pelaksanaan untuk menyalurkan barang-barang tersebut di dalam kota atautkah di pedusunan, aparat pemerintah yang terendah seperti *kuco/kumico* memegang peranan penting. Jumlah yang dibagikan kepada penduduk tidaklah memadai, sehingga terpaksa membelinya diluar dengan cara gelap. Bagi penduduk kota pada waktu itu jauh lebih menderita daripada rakyat pedusunan, karena bahan pokok (beras) dikenakan larangan untuk dibawa ke kota. Dalam rangka meningkatkan pengadaan pangan, rakyat di daerah pedalaman diharuskan bertani untuk menanam padi, pisang, pepaya dan sayur-mayur. Di samping itu dianjurkan pula untuk mengubah tanah perkebunan karet dan kopi menjadi lahan pertanian. Rakyat yang menanam padi diharuskan menyerahkan sebagian hasilnya kepada Jepang melalui *kuco/kumico* setempat tanpa ganti rugi. Sebaliknya hasil kebun yang tidak langsung menunjang peperangan banyak mengalami kemunduran seperti perkebunan kina, perkebunan karet dan perkebunan kopi. Daerah-daerah yang memiliki monokultur itu telah membawa kesengsaraan yang luar biasa, karena barang komoditi tersebut tidak mempunyai harga di pasaran. Seperti penduduk di daerah Musi Banyuasin yang sebagian besar sebagai petani karet, pada zaman pendudukan militer Jepang merupakan penduduk yang tidak produktif.

Seperti apa yang telah dibicarakan di atas, bahwa industri perminyakan di Plaju dan Sungai Gerong merupakan pusat kilang minyak yang banyak menguntungkan pihak pengusaha asing (Barat). Tetapi ketika balatentara Jepang mendarat di Palembang, banyak diantara instalasi minyak dibumihanguskan orang-orang Belanda.¹¹⁾ Itulah sebabnya hasil produksi minyak sangat merosot, ketika Jepang menduduki daerah ini. Untuk mendapatkan minyak tanah keperluan sehari-hari pen-

10) Kementearan Penerangan, *op cit*, halaman 369

11) Djayusman, *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda* (KNIL) Angkatan, Bandung, 1978, halaman 76.

duduk pedusunan mengalami kesulitan karena bahan tersebut hilang dari peredaran dan tidak dijualbelikan. Minyak tanah yang biasanya digunakan penduduk sebagai alat penerangan, sekarang terpaksa diganti dengan damar atau karet mentah sebagai alat penerangan di dusun-dusun.

Sebelum Jepang menduduki daerah ini, di dalam kota Palembang banyak terdapat toko-toko yang dimiliki oleh orang-orang asing, yaitu Belanda, Cina, Arab dan Jepang. Toko milik Jepang yang terkenal pada waktu itu adalah *Nanyu*, *Neberitomo* dan *Showa* yang terletak di daerah yang tidak jauh dari Pasar 16 Ilir. Toko-toko kelontongan yang tersebut terpaksa ditutup atau menghentikan segala kegiatannya karena dirampas oleh Jepang. Sebagai akibat tindakan-tindakan Jepang tersebut, maka untuk mendapatkan sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok sulit didapatkan di pasar-pasar. Dengan tidak adanya toko-toko kelontongan yang dimaksudkan itu, maka disekitar Pasar 16 Ilir mulai timbul semacam pasar jual-beli barang bekas (*second hand*), terutama barang pakaian yang dikenal dengan nama "Pasar Ulo". Di tempat tersebut banyak sekali kita dapati barang-barang keperluan rumah tangga atau pakaian bekas yang diperdagangkan oleh penduduk, bahkan pada zaman awal Revolusi Fisik tempat tersebut masih tetap berfungsi sebagai tempat kegiatan pedagang pedagang kecil.

Pada mulanya setelah militer Jepang menduduki kota Palembang dan daerah sekitarnya, segala kegiatan organisasi baik yang bersifat politik maupun non politik dibubarkan. Di balik kesengsaraan dan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat di mana-mana pada masa pendudukan, masa yang relatif singkat itu telah membawa pengaruh dari perubahan pendudukan militer Jepang di daerah ini. Perubahan yang dimaksud tampak dalam masyarakat agraris tradisional, yaitu adanya semacam mobilitas sosial. Salah satu hal yang menonjol adalah tampilnya angkatan muda yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, yang aktif mengambil bagian dalam

kerangka mobilisasi umum untuk memperkuat pertahanan militer Jepang di daerah ini. Dalam hal ini golongan pemuda mendapat perhatian khusus dari pemerintah *Syu Cokan* di Palembang, karena dapat diharapkan dari kelompok tersebut yang masih bersih dari pengaruh luar, menjadi pendukung utama untuk memenangkan Perang Suci melawan Inggris-Amerika. Faktor lain yang tidak kurang pentingnya, yaitu kondisi militer Jepang sendiri di garis depan yang semula bersifat ofensif menjadi defensif, mengingat pertemuan ke pertempuran Jepang menderita kekalahan. Karena itulah dianggap perlu diadakannya pengerahan tenaga secara besar-besaran untuk memperkuat pertahanan perangnya.

Di samping pengerahan tenaga manusia yang dikenal dengan istilah Badan Pembantu Pemerintah (BPP) yaitu kerja paksa yang melampaui batas-batas perikemanusiaan, Jepang telah membentuk suatu organisasi pemuda di tingkat *bun syuu (onderafdeeling/distrik)* yang disebut *seinendan* (pemuda), *josi seinendan* (pemudi), *keibodan* (orang dewasa), *seinentai* (murid-murid sekolah) dan *fujinkai* (ibu-ibu). Mengenai *seinendan* dan *josi seinendan* yang merupakan organisasi kepanduan di daerah ini dipimpin langsung oleh militer Jepang, yang dalam kegiatannya diberi indoktrinasi menurut konsepsi Jepang dan baris-berbaris. Di samping itu pemuda pemudi diberi kesempatan untuk mengembangkan bakatnya dalam kesenian, dalam usaha untuk memberikan hiburan kepada serdadu Jepang. Semua kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari pengawasan kompetai dengan antek-anteknya^{1 2)} sehingga pemuda-pemudi dapat di arahkan kepada kebutuhan perang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya (*Dai Toa Senso*).

Sementara timbulnya organisasi pemuda-pemudi, di Pagaralam diadakan semacam pusat konsentrasi pendidikan semi militer, yang pada mulanya terdiri dari pemuda-pemuda

12) Kementerian Penerangan, *Op cit*, halaman 222.

yang pernah mendapat pendidikan sekolah menengah di zaman kolonial Belanda. Banyak di antara mereka yang berasal dari berbagai daerah keresidenan, yang dilatih dalam beberapa bulan sebagai *gyu gun* dan *heiho* antara lain: Dani Effendi, Simbolon, Rasyad Nawawi, Bunjani, Hasan Kasim, Bambang Utoyo, Alamsyah Usman, Bakar, Hrun Sohar, Beriyen, Munsir, Mahidin dan lain-lain. Banyak di antara mereka ini yang ikut berpartisipasi aktif pada awal Revolusi Fisik, dalam proses pembentukan Angkatan Bersenjata di daerah ini, yaitu dengan membentuk badan-badan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Di antara mereka yang berprestasi baik, dan yang dikirimkan ke daerah-daerah ibukota *bun syu* untuk membina pemuda-pemuda, sebagai lanjutan pembentukan lasykar-pembantu tentara Jepang yang disebut *heiho*. Mereka berasal dari rakyat biasa yang pernah memperoleh pendidikan Sekolah Rakyat/Sekolah Desa, yang berasal dari berbagai latar belakang sosial. Mobilitas sosial yang terjadi dikalangan pemuda di daerah ini untuk memasuki pendidikan latihan semi militer tersebut, telah dimanfaatkan oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat untuk membentuk berbagai lasykar pemuda, ketika penduduk di daerah ini mendengar berita Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Antara Harapan dan Kenyataan Pada Awal Revolusi Fisik

Revolusi Indonesia adalah suatu revolusi yang "multi kompleks", karena ia tidak hanya suatu proses "dekolonisasi", akan tetapi suatu revolusi yang penuh dengan ketegangan sosial dan konflik politik di antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat pada umumnya ¹³⁾ dan penduduk kota Palembang pada khususnya. Ketegangan politik di tingkat

13) George Mc Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, New York 1961, halaman 179-1982.

nasional, sedikit banyaknya telah mempengaruhi pula perkembangan politik di daerah ini, yaitu antara golongan Islam dengan golongan sosialis/komunisme, antara golongan Republikein dengan golongan non-Republikein atau yang lazim disebut "golongan Ko". Pertentangan-pertentangan antar golongan ini, telah mewarnai penduduk kota sampai ke daerah-daerah pedalaman, sehingga sangat dirasakan sekali oleh rakyat petani di daerah ini, lebih-lebih setelah Amir Sariffudin memberikan informasi kepada pemuka-pemuka masyarakat di Palembang dalam bulan Oktober, ¹⁴⁾ yang dalam kesempatan itu dapat pula beliau bertatap muka dengan pemuda-pemuda Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Awal rentetan ketegangan itu sudah dimulai dari daerah Tebing Tinggi, yaitu munculnya saudara Zen Zenibar dengan kawan-kawannya pada bulan Oktober 1945¹⁵⁾ yang mengadakan aksi lokal, untuk mempengaruhi penduduk menentang pemerintah RI yang baru saja didirikan. Untuk mengatasi hal tersebut dan mengamankan orang-orang menamakan dirinya PKI, Dr. AK Gani segera menugaskan Mayor Rasyad Nawawi sebagai kepala polisi Militer ke sana. Demikian pula pengikut-pengikut Pangeran Emir Noer yang setia, telah mempergunakan kesempatan untuk mempengaruhi rakyat di daerah Musi Rawas dan Musi Ilir untuk mematuhi segala perintah yang berasal dari golongannya. Tetapi akhirnya mereka dapat diatasi, setelah terjadi pertemuan khusus di Sekayu di bawah pimpinan Kapten Usman Bakar.

Ketegangan-ketegangan yang timbul di daerah Uluan telah berpengaruh pula di kalangan lasykar pemuda yang ada damai, sehingga semua anggota BKR dan lasykar-lasykar Pemuda dapat dikoordinasi di bawah satu komando Militer

14) Osman Raliby, *Documentasi Historica*, Bulan Bintang, Jakarta 1953, halaman 432.

15) Mayor Moh. Ali BA. et. al., *Buku Peringatan HUT Sriwijaya ke XXVII*, Dinas Penerangan daerah TNI-AD IV/Sriwijaya, Palembang, 1972, halaman 100-101.

di Palembang. Memang tak dapat dapat disangkal oleh semua pihak, bahwa peranan Dr. AK.Gani sebagai tokoh yang disegani oleh kawan dan lawan, telah memainkan peranan penting dalam menghadapi naik turunnya semangat perjuangan di daerah ini.

Berdasarkan sumber yang ada, bahwa pada tanggal 13 Oktober 1945 tentara Sekutu di bawah pimpinan Mayor Forde dan kemudian digantikan oleh Mayor Hutchinson, telah mendarat di Palembang melalui perairan Sungai Musi.¹⁶⁾ Mereka diizinkan untuk menempati tempat-tempat tertentu, terutama di daerah Talang Semut dan lokasi Benteng Sultan yang terletak di pinggir Sungai Musi. Tentara Sekutu yang terdiri dari satu brigade, terbagi dalam berbagai kesatuan yang berkebangsaan Inggris, India (Islam dan Hindu) dan Belanda. Sebelum pendaratan Sekutu di Palembang, Dr. AK Gani sebagai kepala pemerintahan RI telah menerima telegram (5 Oktober 1945) dari Komite Nasional Sumatera (Adinegoro) yang isinya supaya Sekutu diberi izin mendarat di Kota Palembang.¹⁷⁾ Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tentara Sekutu dalam menjalankan tugas-tugasnya di dalam kota, dapat dibenarkan melalui jalan-jalan tertentu yang disebut *Corridor*. Oleh karena semakin hari semakin banyak tentara Sekutu datang di Palembang, maka mulailah timbul kecurigaan di kalangan anggota Pemerintah RI.

Mula-mula masyarakat yang tinggal di dalam kota, kurang menanggapi kedatangan tentara sekutu itu. Tetapi setelah ternyata jumlah personalnya semakin lama semakin banyak di antaranya terdapat orang-orang Belanda bekas inter nir yang telah dipersenjatai, lebih-lebih setelah mereka melakukan tindak-tanduk yang tidak simpatik dengan sikap ber-

16) Op cit., halaman 55

17) Tim Penulis IDKD, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Sumatera Selatan*, Proyek IDKD 1979/1980, Palembang, hal 71.

musuhan terhadap penduduk sekitarnya, maka mulailah penduduk mempertanyakan kehadiran mereka di daerah ini. Keadaan kota yang tadinya telah hangat oleh aksi pemuda dalam rangka perampasan senjata dan perbekalan dari Jepang, ketegangan di dalam kota yang menjurus kepada jalan kekerasan tidak dapat dihindari. Kenyataan historis yang tak dapat diingkari, yaitu setelah tentara Sekutu meninggalkan kota ini pada tanggal 24 Oktober 1945 dan kedudukannya digantikan oleh serdadu Belanda di bawah pimpinan Letkol. Molinger,¹⁸⁾ maka perjuangan rakyat untuk melengkapi segala sesuatu untuk kepentingan negara yang baru lahir, berubah sifatnya kemudian untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan kata lain, perginya tentara Sekutu dari daerah ini, seperti perjuangan rakyat dihadapkan suatu alternatif melawan penjajah Belanda yang akan menegakkan kembali kekuaannya di bumi persada Indonesia.

Dalam hal perebutan senjata dan perbekalan logistik lainnya yang dikuasai oleh Jepang, eks *gyu gun* dan *heiho* bersama pemuda yang dianggap sebagai tenaga revolusioner telah ikut aktif dalam perjuangan itu. Mayor Dhani Effendi eks *gyu gun* adalah salah satu komandan yang paling berhasil dalam merebut persenjataan dan perbekalan dari Jepang di daerah ini, sehingga membuatnya secara *de facto* komandan yang paling lengkap persenjataannya di awal Revolusi Fisik. Berbeda halnya pada zaman pendudukan Jepang, yaitu berbagai sektor masyarakat diorganisasi oleh penguasa untuk mendukungnya bila sekutu mendarat di daerah ini. Pelajar-pelajar di sekolah diorganisir melalui guru-gurunya, para alim ulama/kiai; yang menjadi motor penggerak dan pengambil keputusan dalam menghadapi serdadu Jepang yang mudah kalah itu, sehingga kedudukan Jepang di daerah ini berada dalam dua peristiwa yaitu saat-saat menantikan sebagai tawanan perang dan pembalasan yang datang dari rakyat setempat sebagai akibat perbuatannya sendiri.

18) Mayor Moh. Ali BA, *Op cit*, halaman 57

Sejak lama disadari adanya masalah-masalah sosial-ekonomis yang menyangkut perikehidupan penduduk di daerah ini secara keseluruhan seperti : perbedaan sosial, pajak yang tinggi yang tidak disukai, upah buruh yang rendah dan kekurangan lapangan kerja dan sebagainya. Tidak hanya bangsa Belanda dan Jepang yang ikut memikirkan hal tersebut, tetapi juga bangsa Indonesia yang telah memiliki pemerintahan sendiri menginsyafi hal tersebut tanpa kemampuan untuk memikirkan suatu penyelesaian yang tuntas dan sungguh-sungguh. Selama masa pemerintah kolonial Belanda di daerah ini, dalam waktu berbagai *Kolonial Verslaag* selalu menyebutkan keadaan menurunnya tingkat hidup rakyat di pedusunan. Demikian pula laporan-laporan ahli-ahli ekonomi Belanda dengan penjelasan yang sama, tetapi tidak diambil tindakan yang dapat memakmurkan masyarakat. Hal ini lebih parah lagi ketika masa pendudukan Militer Jepang, dimana keadaan sosial-ekonomi penduduk dibiarkan begitu saja. Namun bagi mereka yang hidup pada strata sosial terbawah merupakan suatu problema yang tidak habis-habisnya. Lebih-lebih pada saat Revolusi Fisik, pemerintah RI belum sempat merealisasikan yang terkandung dalam pasal 33 U U D 1945 karena keadaan yang tidak memungkinkan.

Setelah meletus "Perang Lima Hari Lima Malam" di kota Palembang pada awal tahun 1947, terpaksa angkatan bersenjata kita dan pemerintah sipilnya mengungsi ke daerah pedalaman. Kota Palembang dan daerah sekitarnya diduduki oleh Belanda, sehingga secara psikologis telah memberikan angin baik bagi golongan tertentu untuk hidup berdampingan. Dengan kata lain dapat dikatakan pertempuran Lima Hari Lima Malam yang telah dimenangkan oleh pihak Belanda, telah ikut menciptakan situasi sementara orang yang beranggapan klasik, mengenai pro dan kontra kehadiran Belanda di daerah ini. Peristiwa tersebut telah memberikan peluang kepada pemuda-pemuda revolusioner, untuk melakukan penculikan-penculikan dan kadang-kadang pembunuhan terha-

dap orang-orang yang mau bekerjasama dengan Belanda. Faktor keamanan dan ketertiban yang tidak menentu ini, mendorong adanya urbanisasi ke kota, terutama orang-orang yang dulunya berfungsi sebagai agen-kolonial atau orang-orang yang dekat dengan Jepang yang pernah bertindak berlaku keras.

Radikalisasi revolusi ini tidak hanya terbatas pada kota-kota kecil di luar ibukota keresidenan, tetapi juga meluas ke dusun-dusun yang dapat dijangkau oleh serdadu Belanda pada waktu itu. Keadaan yang tidak menentu ini, mengakibatkan menurunnya hasil produksi karet rakyat, yang pada awal Proklamasi menunjukkan prospek harga yang cukup baik. Keadaan yang tidak stabil dan penuh rasa takut di kalangan rakyat petani karet atau kopi, yaitu di satu pihak harus mematuhi Pemerintah RI dan di lain pihak di bawah pengaruh serdadu Belanda. Berbeda halnya di dalam Kota Palembang yang cukup aman, di mana penduduk kota dininabobokan oleh makanan yang berlimpah ruah, seperti roti, keju, terigu, mentega, susu, dan sebagainya. Keadaan yang menyolok ini merupakan daya tarik tersendiri, dan dibuat sedemikian rupa oleh Belanda agar penduduk memihak kepadanya.

Sejak Perjanjian Renville ditandatangani dan diumumkan, pihak Belanda dengan giat memperkuat kedudukannya di kota-kota kecil yang didudukinya, di samping usaha mereka di dalam Kota Palembang untuk membentuk "Negara Sumatera Selatan" yang dipimpin oleh Abdul Malik, dalam rangka untuk memecahbelah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak berdaya. Mengingat situasi keamanan yang tidak memungkinkan dan pusat Pemerintah RI sendiri sudah diijrahkan ke daerah pedalaman sebagai akibat Aksi Militer I dan Aksi Militer II maka pelayaran dan perdagangan di daerah ini tidak begitu lancar. Keadaan ekonomi rakyat di daerah ini tidak berbeda dengan daerah-daerah Indonesia lainnya, karena semua jalan ke luar sudah dijaga oleh kapal pe-

rang Belanda untuk memutuskan hubungan dagang dengan Singapura. Usaha Pemerintah RI untuk memperbaiki ekonomi sebagai sarana penunjang kebutuhan pokok rakyat, tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Rakyat terpaksa memenuhi kebutuhan dengan apa adanya, walaupun ada usaha pemerintah untuk menjual barang-barang komoditi ekspor yang dihasilkan oleh rakyat (kopi, karet, rotan) melalui seribu satu macam jalan selundupan. Mengingat ketatnya blokade ekonomi di perairan Selat Bangka, maka usaha tersebut sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat.

Setelah pengakuan kedaulatan 1949 — kedudukan Pemerintah RI dikembalikan ke tempat semula, maka mulailah ada kemajuan dalam mengatur pemerintahan termasuk bidang ekonomi sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas, dengan menambah modal dan keterampilan, sehingga dalam proses pertumbuhannya mengandung kekuatan sendiri untuk menciptakan investasi baru.¹⁹⁾ Pokok pikiran yang terkandung di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah ini, pemerintah berpegang teguh kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebabnya usaha pemerintah yang baru saja kembali dari daerah pedalaman, mulai memperkembangkan sistem ekonomi rakyat yang dilaksanakan dari bawah yaitu "koperasi". Apa yang pernah dianjurkan oleh Bung Hatta ketika beliau singgah di Palembang dalam perjalanannya ke Bukit Tinggi pada awal Revolusi Fisik, bahwa ekonomi bangsa Indonesia harus dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri dengan azas gotong royong,²⁰⁾ mendapat tempat di hati rakyat banyak dan menjadi titik tumpu harapan. Masyarakat petani sebagai golongan mayoritas di daerah ini, pada umumnya masih tetap memiliki rasa solidaritas yang cukup tinggi, sehingga mulailah berkembang tumbuh idealisme dan semangat berjuang untuk kepentingan bersama.

19) Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, 1955, halaman 39

20) Kementerian Penerangan, *Op cit*, halaman 371

Berkat usaha Kantor Inspeksi Koperasi Sumatera Selatan dalam memberikan bimbingan dan penerangan kepada rakyat, maka mulailah timbul keinsyafan terhadap pentingnya "koperasi" sebagai usaha bersama, dalam mencapai kesejahteraan rakyat yang merata bagi semua golongan. Pada waktu itu lahirlah Koperasi Kaum Tani, Koperasi penghasil kerajinan, Koperasi Pertukangan, Koperasi Penjualan Produksi, Koperasi Keperluan Rumah Tangga, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Penggilingan Padi, Koperasi Penggergajian Kayu dan sebagainya.²¹⁾ Tetapi kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang diharapkan oleh rakyat tak kunjung tiba, karena antara harapan dan kenyataan masih banyak memerlukan waktu, dan tidak cukup idealisme saja dalam mengelola kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini, rakyat di pedusunan dalam menanggapi KUD kurang mendapat perhatian sepenuhnya.

Dalam lapangan agama dan kepercayaan, terutama agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk di daerah ini, sejak zaman sebelum kemerdekaan dan sesudahnya menunjukkan adanya perkembangan, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Di dalam Kota Palembang sendiri tercatat sebanyak 27 buah mesjid sampai pengakuan kedaulatan, sedangkan sampai tahun 1979 jumlahnya menjadi 149 buah.²²⁾ Perkembangan agama Islam di dalam kota, adalah berkat usaha organisasi Muhammadiyah dan para ulama/guru agama, untuk menyebarkan ajaran itu di kalangan umat. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, protes sosial yang pernah dilancarkan pada zaman kolonial Belanda, sebagian besar diorganisasi oleh Serikat Islam, bahkan pada zaman Proklamasi golongan ini di samping golongan lainnya telah memegang peranan penting, dalam membangkitkan kembali semangat anti kafir untuk menentang Belanda.

21) *Ibid.*

22) Wawancara dengan H. Moh. Fauzi, Kepala Tata-usaha Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 17 Februari 1979.

Bertitik tolak dari pengertian bahwa revolusi Indonesia itu didukung oleh semua golongan politikus, maka pada permulaan Revolusi Fisik di daerah ini kita dapati berbagai organisasi pemuda seperti : Napindo, Pesindo, Hazbullah, Muja-hiddin, Ansor, Hizbulawaton dan sebagainya. Semuanya ini merupakan tenaga-tenaga revolusioner dan pendukung utama dari partai politik yang timbul kemudian. Pada mulanya mereka bersatu padu dalam menghadapi musuh yaitu Belanda. Tetapi setelah Pemerintah RI kembali ke Kota Palembang dan Negara Sumatera Selatan menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia, maka mulailah golongan-golongan politik menonjolkan ideologinya seperti : Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partindo, Parindra, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Kristen Indonesia dan lain-lain. ²³⁾

Perjuangan mereka semakin hebat untuk kepentingan golongannya sendiri, terutama sekali partai Masjumi yang timbul pada zaman pendudukan Jepang, ²⁴⁾ banyak memperoleh dukungan dari masyarakat di daerah ini, lebih-lebih setelah diadakan Mukhtar Masyumi yang pertama di Yogyakarta tahun 1950. Mulai saat itu masyarakat petani di daerah pedalaman mengalami proses pengkotak-kotakan, yang menjurus ke arah perkembangan yang tidak sehat. Di dalam membawakan pengaruhnya masing-masing ideologi, nampak terjadi persaingan wibawa, yang kadang-kadang terjadi pula pertentangan antara Masyumi dengan PNI yang sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Pertentangan antar golongan yang membawakan partainya masing-masing, telah mengacau rakyat ke arah perpecahan untuk memenangkan pemilihan Umum tahun 1955.

23) Drs. Ma'moen, Abdullah et. al, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Sumatera Selatan*, Proyek IDKD 1979/1980 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 167.

24) Harry J. Benda, *Op cit*, halaman 184

Berbicara mengenai pendidikan di daerah ini pada masa Revolusi Fisik, menunjukkan adanya suatu kemajuan yang sangat menonjol dan agaknya telah membantu proses pendemokrasian masyarakat. Rupa-rupanya setelah diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia setempat tidak hanya organisasi atau lasykar perjuangan sebagai alat mempertahankan kemerdekaan itu saja, yang dapat perhatian, tetapi juga usaha-usaha di bidang pendidikan dan pengajaran tidak pula ketinggalan. Memang sangat dirasakan oleh berbagai golongan, perlunya lembaga pendidikan menengah dan menengah tinggi di daerah ini, mengingat lembaga pendidikan itu di zaman kolonial Belanda dan Jepang sangat langka. Kemajuan di bidang ini sangat dirasakan dan diakui oleh kebanyakan orang di daerah ini, tetapi lebih banyak mempunyai arti kuantitas daripada kualitas.

Dengan dipelopori oleh Dr. AK Gani dan didukung oleh beberapa tokoh pendidikan di daerah ini, pada tanggal 1 Pebruari 1946 mulai dibuka tiga buah sekolah menengah pertama di Palembang yaitu : Sekolah Guru Menengah (SGM), Sekolah Kepandaian Putri (SKP), yang keduanya mengambil tempat di daerah Pertokoan Gaya Baru sekarang ini dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jalan Tengkuruk. Sekolah Guru Menengah dipimpin oleh Abdul Malik (eks Walinegara Sumatera Selatan), sekolah kepandaian Putri dipimpin oleh ibu Syahrizal Syahab dan Sekolah Menengah Pertama dipercayakan pada RA Rani (eks Kepala Jawatan Pendidikan dan Pengajaran Sumatera Selatan). Sementara itu telah dibuka pula SMP di Baturaja, SMP di Pagaralam, SMP di Manna (Bengkulu Selatan) dan kemudian di kota Bengkulu sendiri dibuka Sekolah Guru dan Sekolah Menengah Atas dengan muridnya lebih kurang dua puluh (20) orang.²⁵⁾

Sebagai akibat adanya kesempatan belajar yang diberikan kepada setiap anak yang memiliki kemampuan, maka

25) Kementerian Penerangan, *op cit*, halaman 632

perkembangan jumlah murid dari tingkat sekolah rendah sampai ke tingkat sekolah menengah dari tahun ke tahun bertambah terus, lebih-lebih setelah tahun 50-an dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah ini. Tak dapat disangkal bahwa maju-mundurnya sekolah-sekolah tersebut, sangat ditentukan oleh turun naiknya temperamen politik pada waktu itu. Ketika terjadi Aksi Militer I (21 Juli 1947), sekolah-sekolah menengah yang ada di dalam kota terpaksa ditutup, dan atas usaha pemerintah RECOMBA (*Regerings Commisaris Bestuur Anngelegenhoren*) mulai dibuka sekolah-sekolah seperti: *Middelbare School*, MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*). *Ambachs school* dan *Normalsschool* di Palembang. Di samping usaha Pemerintah Recomba, Perguruan Taman Siswa yang dipimpin oleh Yosodipuro membuka Taman Dewasa dan atas usaha beberapa orang guru yang dikoordinir oleh RA Rani telah dibuka pula Sekolah Menengah Oemoem (SMO). Sekolah Normal yang telah berjalan satu tahun diubah menjadi Sekolah Guru B (SGB), yang mengambil tempat di Jalan Inderapura dan dipimpin oleh Nuswar Alamsyah. Kemudian setelah pengakuan kedaulatan berdirilah Sekolah Guru A (SGA) dan dibawah pimpinan SA Sitohang mulai dibuka Sekolah Menengah Atas (SMA/B).²⁶⁾

Mengenai perkembangan pendidikan Sekolah Rakyat di wilayah Keresidenan Palembang pada waktu itu, tidak banyak yang dapat kita informasikan dalam laporan ini, karena terbatasnya data yang diperoleh. Hal ini dapat difahami mengingat situasi daerah ini pada zaman Revolusi Fisik, dimana pusat pemerintahan RI selalu berpindah-pindah dari satu tempat/kota ke tempat lain, yaitu Palembang ke Lahat Lubuk Linggau – Curup dan akhirnya mengungsi ke Bengkulu, Pengungsian yang terpaksa ini selalu disertai bumi hangus, sehingga banyak arsip yang ikut terbakar. Tetapi se-

26) *op cit*, halaman 369

cara menyeluruh dapat dikatakan bahwa jumlah Sekolah Rakyat pada saat-saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan sangat sedikit. Betapa rawannya keadaan pendidikan di daerah ini, bahkan di dalam Kota Palembang sebagai ibukota keresidenan hanya tercatat 10 buah Sekolah Rakyat Negeri saja.²⁷⁾

Segala usaha pemerintah Recomba untuk menambah jumlah Sekolah Rakyat di daerah Uluu dan sekaligus memberantas buta huruf, sehingga Kantor Pendidikan dan Pengajaran di Palembang mengambil kebijaksanaan untuk menyelenggarakan pendidikan guru secara *crash-programe*, yang dikenal dengan nama "Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar Kewajiban Belajar" (KPKPKB). Oleh karena pelaksanaan KPKPKB ini banyak mengalami kesulitan teknis, sehingga sampai pada waktu yang ditargetkan tidak membawa hasil yang dapat diharapkan, maka terpaksa dihapuskan atau dilebur menjadi sekolah guru B.

Palembang, yang dianggap sebagai daerah yang banyak tertinggal dari daerah-daerah lain dalam dunia pendidikan, nampaknya termasuk daerah yang cukup gigih berusaha dalam bidang ini. Kalau dulu pintu sekolah secara sengaja diusahakan agar hanya terbatas kepada anak-anak dari kelompok tertentu, kini sudah terbuka lebar bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan ini Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 31. Pintu yang terbuka lebar bagi semua warga negara Indonesia, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik menyangkut kecerdasan otak maupun dalam segi kemampuan biaya.

Sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain, perkembangan pendidikan di daerah ini yaitu Palembang dan daerah sekitarnya, telah menimbulkan semacam mobilitas sosial yang

27) Masykuri & Sutrisno Kutojo, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, Proyek IDKD 1980/1981, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Palembang, halaman 85-86.

bersifat horizontal dan vertikal. Pada masyarakat Palembang sendiri yang hidup dan mengenal lingkungan feodal dalam bentuk strata-sosial, perkawinan antar golongan yang memiliki latar belakang yang berbeda, sudah mulai cenderung ke arah pembauran. Demikian pula dalam hal memasuki sekolah pendidikan umum yang sama sampai ke tingkat yang lebih tinggi (akademi dan perguruan tinggi), nampaknya kesempatan itu telah dipergunakan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Apakah mereka itu berasal dari anak penguasa tradisional, anak ulama/guru agama, anak guru, anak pedagang, anak petani karet/kipi, anak pegawai negeri dan entah dari mana lagi, walaupun kita tidak dapat mengetahui secara pasti berapa dari mereka sebenarnya yang dapat dikategorikan sebagai anak petani, pedagang, pegawai dan lain-lain. Sementara itu banyak juga di antara mereka yang meneruskan sekolahnya keluar daerah sesudah tahun 50-an, karena di daerah ini sendiri belum banyak memiliki lembaga pendidikan yang setingkat dengan akademi atau perguruan tinggi.

Bagi orang-orang tua yang dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi yang pada zaman kolonial Belanda tidak diberi kesempatan, merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk mendapatkan kehormatan di kalangan masyarakat agraris-tradisional. Kebanggaan yang mengandung harapan ini, tampaknya lebih berorientasi kepada lapangan birokrasi kepegawaian daripada menjurus ke arah wiraswasta. Hal ini mungkin sekali disebabkan pengaruh yang telah dibina pada zaman kolonial Belanda, yaitu golongan elite yang memerintah dan golongan non-elit yang dianggap rakyat biasa. Golongan elit yang termasuk lingkaran agen-agen kolonial jauh lebih baik keadaan sosial-ekonominya daripada rakyat biasa. Contoh yang konkrit ini telah memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat petani yang baru saja lepas dari penjajahan. Keteledoran dari masyarakat untuk hidup sendiri dan percaya kepada kemampuan sendiri telah banyak memberikan peluang kepada kelompok etnis lainnya (non-pri-

bumi), terutama di bidang perekonomian dan pertokoan. Maka tidak mengherankan apabila ada pendapat yang mengatakan, bahwa merosotnya peranan golongan pribumi dalam perdagangan komoditi ekspor akhir-akhir ini, karena mentalitas pribumi di daerah ini lebih baik memilih gaji bulanan dan melakukan pemborosan ²⁸⁾ daripada berusaha disektor lain yang besar kemungkinan akan membawa resiko. Prospektif yang pernah dikemukakan oleh Onghokham sebagai seorang sejarawan —walaupun tidak semua dapat dibenarkan pendapat itu, tetapi merupakan suatu analisa historis yang cukup menarik, yaitu sampai di mana *bargaining-owners*-nya dalam hal politik yang ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah ini. Demikian antara harapan dan kenyataan semakin jauh, yang merupakan masalah penting dan harus kita renungkan bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang lebih baik.

28) Onghokham, "Merosotnya peranan Pribumi dalam Perdagangan Komoditi", dalam *PRISMA* No. 8 Tahun ke-XII, Agustus 1983, halaman 3-19.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

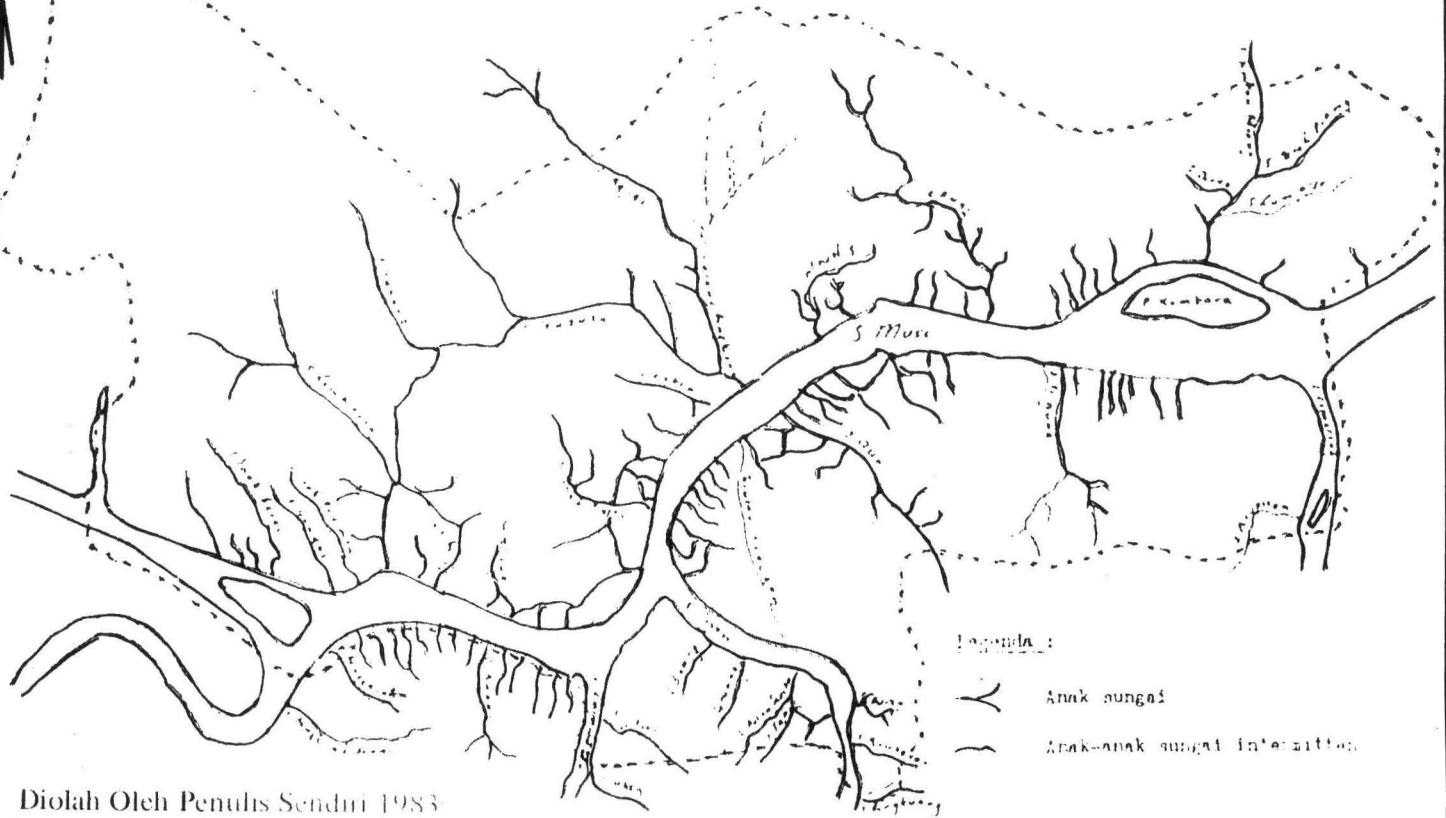
- Aziz, M.A., *Japan's Colonialism and Indonesia*, Martinus Nijhoff The Hague, 1955.
- Abu Achmadi, Drs. *Sejarah Pendidikan, CV. Toha Putera, Semarang, 1955.*
- Abu Achmadi, Drs. *Sejarah Pendidikan, CV. Toha Putera, Semarang, 1955.*
- Anon, "Schetsen van Palembang," dalam *TNI.II.*, 1846.
- Bayu Suryaningrat, Drs, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia babak Hindia Belanda dan Jepang*, Dewaruci Press, Jakarta, 1981.
- Brian Harrison, *South-Easth Asia a short History*, Mc Millan & Co. New York, 1957.
- B.P.3K. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1979.
- *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Jakarta, 1977.

- Benda, Harry. J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, 1980.
- Collenbrander, H.T. *Koloniale Geschiedenis's Gravenharge*; Martinus Nijhoff, 1925.
- Court, H.M. *An Exposition of the relation of the British Government with the Sultan and state of Palembang and the Design of the Netherland's Governement upon that Country with accounts and Maps of Palembang and the Island of Bangka*, London, 1826.
- Cin's sosial Daerah Tk. I Sumatera Selatan, *Perintis Kemerdekaan Indonesia, Riwayat perjuangan Perintis Kemerdekaan Sumatera Selatan*, Palembang 1978.
- Djayusman, *Hancurnya angkatan perang Hindia Belanda (KNIL)*, Angkasa, Bandung, 1978
- Drewes, G.W.J. "Further Data concerning Abd al-Samad al-Palimbani, dalam *BKI*, Jilid 123, No. 283, 1976.
- Graff, H.J. de, *Geschiedenis van Indonesia's*—Gravenhage : W Hoeve Bandung, 1949.
- Humas Kotamadya, *Buku Penemuan Hari jadi Kota Palembang*, Pemda Kotamadya Palembang, 1973
- Kahin, G.Mc. T. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca-New York, 1961.
- Kielstra, E.B. & N.J. Krom, *Nederlandsch-Indie*, Deel II, Den Haag Elviesier, 1912.
- Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang 1954.

- Ma'moen Abdullah, et. al, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Sumatera Selatan*, Proyek IDKD 1979/1980, Palembang, 1980
- Masykuri & Sutrisno Kutojo, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, Proyek IDKD. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Palembang 1981.
- P de Roo De La Faille. *Dari zaman Kesultanan Palembang, Bhratara*. Jakarta, 1971.
- Quanmar, C.A.J. Ph., *Land en volk van Nederlandsch-Indie* (Den Haag Zut phen. H.J. Thieme, 1933).
- Richter, J.F.P. *Economische Geographie van Zuit Sumatera*, dalam TEG, 1911.
- Scelceh Marga Oentoek Keresidenan Palembang, No. 18 tahun ke-II No. 9 Palembang, 1932.
- Stapel, F.W. *Geschiendenis van Nederlandsch-Indie*, Jilid V, Joost van Vondel, Amsterdam, 1940.
- Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia suatu alternatif*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982.
- *Beberapa masalah dan Metodologi Sejarah Indonesia*, dalam LEMBARAN SEJARAH no. 6, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah mada, Yogyakarta, 1970.
- Soemitro Djoyohadikusumo, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, 1955.
- Sevenhoven, J.L., *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Bhratara, Jakarta, 1971.

- Stibbe, D.G. *Encyclopadie van Nederlandsche-Indie*, Twedee Druk, 's Gravenhage-Martinus Nijhoff, Leiden, 1917.
- Sutjipto Tjiptoatmodjo, F.A. *Kota-kota Pantai disekitar Selat Madura, (abad XVII sampai Medlo abad XIX)*, Univ. Gajah Mada, Yogyakarta, 1983 (Desertasi).
- Toean Moechtar Prabu Mangkunegara, *Verzameling Groeps-gemeenschap's Ordonanties*, Percetakan Meru, Palembang 1941
- Tim Peneliti IDSN, *Sumatera Selatan ditinjau dari sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan*, Proyek IDSN 1982/1983, Palembang, 1972.
- Tim Peneliti, *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Selatan*, Proyek IDSN 1982/1983, Palembang 1983.
- Tim perumus, *Risalah Sejarah perjuangan Sultan Machmud Badaruddin II*, Kotamadya Palembang, 1980.
- Van Leur, J.C., *Indonesia Trade and Society*, W van Hoeve Ltd-the, Hague, Bandung, 1955.
- Van Royan, J.W. *De Palembangsche Marga and haar Grond en Waterrechten*, G.L. van den Berg Adrianis Boekhandel, Leiden, 1927
- Weelders, M.O., *Het Sultanaat Palembang 1811-1925*, -Gravenhage : VKI, 1975.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tat Negara Indonesia*, Timun Mas NV, Jakarta, 1955
- Winkler Prins Encyclopedie*, XV, Amasterdam, 1952.
- Z entraaf, H.C. W.A. van Goudoever, *Sumaterantjes*, 's-Gravenhage Uitgereij W. van Hoeve, 1947.

PETA KOTA MADYA PALEMBANG
Skala 1 : 180.000



Diolah Oleh Penulis Sendiri 1983

